



Buku Literasi Budaya ini adalah himpunan esai dan opini pilihan yang terbit lima tahun terakhir di pelbagai media dan kesempatan. Terhimpunnya tulisan–tulisan di buku ini tak lain dan tak bukan merupakan ikhtiar merawat literasi dari penulis dan penerbit buku ini.

Esai dan opini di buku ini memiliki beragam tema. Membentang dari sastra, budaya, sosial, politik, hingga pendidikan. Keragaman tema itu menandai beragamnya pula perjumpaan penulis dengan bacaan dan ruang diskusi yang dihadiri selama ini. Tak jarang, tulisan–tulisan di buku ini lahir dari pendiskusan penulis dengan kawan–kawan pegiat literasi, aktivis, jurnalis, dan sesama akademisi. Bahkan, juga hasil dialog dan buah ‘berguru’ dari para senior dan para guru tak jarang menjadi inspirasi penulisan karya demi karya di buku ini.

Buku ini, selain dimaksudkan untuk memperkaya khazanah literasi budaya dan politik di tanah air, juga menarik dibaca oleh kaum milenial dan alfa (generasi Y dan generasi Z) yang sedang tumbuh dan lagi produktifnya di negeri ini. Banyak dari tulisan–tulisan di buku ini berkesesuaian dengan keseharian generasi muda yang sedang surplus–surplusnya saat ini.

Semoga bermanfaat.  
Salam literasi.

ISBN 978-623-0274-91-0



082330777575

publischeria

IA PUBLISHER

Literasi Budaya

Nasrullah



# Literasi Budaya

Nasrullah

# LITERASI BUDAYA

Himpunan Esai tentang Sastra, Pendidikan, dan  
Budaya Politik

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa Hak dan atau tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah)

# LITERASI BUDAYA

Himpunan Esai tentang Sastra, Pendidikan, dan  
Budaya Politik

**Nasrullah**



IA PUBLISHER

# **LITERASI BUDAYA**

Copyright © 2021. Nasrullah  
viii + 150 halaman, 14 x 20 cm

Penulis : Nasrullah  
Penyunting : Panji Aswan  
Proofreader : Diannita Riski  
Tata Letak : @kinhana.story  
Sampul: Javan Art  
ISBN : 978-623-6274-91-0

Diterbitkan Oleh:

## **IA Publisher**

Imprint CV. Wonderland Family Publisher  
Jl. Raya Mantup, Dsn. Pangaron, Pengumbulanadi, Tikung, Lamongan,  
Jawa Timur 62281  
Hotline : 082330777575  
E-mail : iapublisher01@gmail.com  
FB : IA Publisher

Cetakan 1, September 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All right reserved

# PENGANTAR

Tulisan-tulisan di buku ini memiliki latar belakang beragam. Dari itu, memiliki bentuk yang beragam pula. Ada yang berupa artikel esai untuk publikasi di surat kabar, ada yang bahasanya luwes *a la* tulisan yang dipublikasi di website, ada pula yang berbentuk opini untuk menanggapi isu yang sedang menghangat.

Keragaman ini kiranya dapat dibaca sebagai pengaya ketimbang memandangnya sebagai perusak pemandangan. Pun demikian, tak menjadi dapat dianggap sebagai masukan bermanfaat dari pembaca kepada penulis.

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas kekuatan dan kesempatan berkarya yang diberikan di tengah pandemi ini. Tak ada kuasa berarti selain kuasanya di tengah situasi sekarang ini yang serbasulit dan tak menentu. Sebagai orang yang percaya akan hal itu, tak bisa tidak penulis mengucapkan syukur atas segala nikmat yang masih diberikan-Nya.

Kepada ibunda tercinta dan almarhum bapak, kakak, dan paman, penulis ucapkan rasa terima kasih tak terhingga. Merekalah yang berjuang tanpa lelah dan tak kenal berhenti hingga penulis dapat berkarya sekecil apa pun. Termasuk hadirnya tulisan demi tulisan di buku ini.

Terkhusus, kepada istri tercinta dr. Nurul Faten Izzati bersama calon penerus di dalam kandungannya, mertua, dan adik-adik ipar, penulis banyak berucap terima kasih atas sokongannya. Begitu pun untaian maaf atas seringnya penulis merepotkan mereka semua. Tak terhingga untaian maaf dan terima kasih itu penulis persembahkan atas rasa syukur tak terhingga karena mampu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang membahagiakan.

Ucapan terima kasih jua tak lupa penulis ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah membantu penulisan dan pembukuan karya-karya di buku ini. Terkhusus pula ucapan terima kasih kepada media-media dan kawan-kawan jurnalis yang telah bersedia memublikasikan tulisan-tulisan di buku ini: harian *Fajar*, *Disway Kaltim*, *Makassar Terkini*, *Arus Budaya*, *Sketsa Online*, *Pena Skolastra*, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas persahabatannya yang produktif ini.

Semoga artikel-artikel di buku ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Terima kasih. Salam literasi.

Kuala Lumpur, 1 Agustus 2021

Penulis,

Nasrullah

# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
SASTRA DAN LITERASI.....	1
Kapasitas Literasi dan Kritik Sastra dengan Perspektif.....	2
"Penari dari Kutai" di <i>Dunia Sukab</i> Seno.....	14
Puitika Cinta dan Kerja .....	23
Mengungkap 'Ruang Terdalam' Puisi sebagai 'Latar Depan' .....	27
Sastra dan Rupa–Rupa 'Perlawanan' .....	30
Literasi dan Kontestasi Budaya .....	36
SOSIAL BUDAYA .....	51
Pikiran Manusia Pascakolonial .....	52
Kaum Milenial dan Kekerasan .....	56
Kenaifan Pascakolonial hingga Bencana Milenial .....	60
Memaknai Slogan Hari Jadi Bone ke-691 .....	65
Jokowi, Papua, dan Kalimantan .....	72
PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN .....	77
Cendekia di Luar Kampus .....	78
Intelektual dan Aktivistis .....	82
Otonomi Unhas, Jebakan atau Tantangan? .....	87
Merefleksi Pendidikan Pasca-Pandemi .....	91



Dari Produksi Pengetahuan Hingga Kebijakan .....	96
Universitas Komisaris .....	101
Mahasiswa Cerdas dan Mahasiswa Progresif.....	106
<b>BUDAYA DAN POLITIK.....</b>	<b>113</b>
Kekuasaan Berlebih.....	114
Menjaga Moral dan Etika Publik .....	119
Membela Hak dan Kepentingan Publik .....	123
Elite dan Oligark dalam Demokrasi .....	128
Kritik, Demokrasi, dan Rasa Takut .....	133
Aktivis '98 dan Angkatan 2019 .....	138
Oposisi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi .....	142
Paras Depan Manusia dan Ruang Terdalam Kebudayaan .....	146
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>150</b>

# **SASTRA DAN LITERASI**

# Kapasitas Literasi dan Kritik Sastra dengan Perspektif

Saut Situmorang pernah bilang, “Kalau ada orang menilai puisi atau karya sastra lainnya dengan mengatakan ‘menurut perasaan saya’, sudah tinggalkan saja orang itu, tidak ada gunanya”. Pernyataan Saut itu pun mengundang respons dan bukan tidak mungkin menuai antipati dari sesama pegiat sastra.

Samsir Marangga, seorang Sarjana Sastra lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Samarinda, yang kini melanjutkan studi magisternya di bidang serupa di Universitas Airlangga Surabaya, pun pernah menulis topik yang sama. Tentang kritik sastra tanpa “ilmu sastra”. Judul tulisannya adalah *Hilangnya Kesakralan Puisi dan Meluruskan Karya Sastra dengan Kritik Sastra*. Kedua tulisan Samsir ini dipublikasi di laman media sosialnya dan di sebuah koran di Samarinda. Hasilnya, ramai dibincangkan publik, baik di media sosial, maupun di forum-forum pemerhati sastra di Kaltim. Saya termasuk penikmat obrolan itu dan mendokumentasikan kedua tulisan Samsir di atas.

Dari peristiwa Saut dan Samsir itu saya pun becermis. Rupanya, ada sedikit kebelumahaman sebagian kalangan mengenai istilah kritik ini, terlebih kritik sastra. Kritik dipahami sebagai “celaan, cemoohan, dan ajang mencari-cari kesalahan (karya) orang”. Ada pula yang lantas menagih-nagih solusi ketika dikritik—kalau ini terutama pembela rezim yang sedang barangkali. Itu lebih keliru lagi. Padahal tidak demikian wujud kritik sastra di ilmu sastra itu. Kritik sastra, minimal terdiri dari dua hal, yakni analisa dan evaluasi terhadap sebuah karya. Pun, jika ada solusi, itu bonus tapi tak mesti ada.

Dikiranya lagi, dari membaca tulisan Samsir oleh sebagian kalangan, bahwa kritik sastra itu hanya milik ‘orang sastra’—mahasiswa dan Sarjana Sastra—saja. Padahal, bukan itu maksudnya. Maksud keduanya (Saut dan Samsir) yang saya pahami—sebagai sesama Sarjana Sastra— adalah “*come on*, sastra itu ada ilmunya, tolong jangan semena-mena dan semau-mau “perasaan” Anda dalam menilai dan mengkritik karya sastra”. Intinya, karena sastra adalah sebuah ilmu, alias ada ilmunya, gunakanlah ilmu itu. Kalau tidak tahu ilmunya, serahkan kepada ahlinya. Jika yang ahli adanya seorang pembelajar atau Sarjana Sastra, apa boleh buat. Tapi, kalau ada yang ahli namun bukan mahasiswa dan Sarjana Sastra, lebih bagus lagi. Yang tak elok tentu adalah, tak tahu ilmunya lantas disertai tanggung jawab untuk menilai dan mengkritik sastra. Terlepas dia “orang sastra”—belajar sastra secara akademis—atau bukan, yang penting menguasai ilmunya.

Saut dan Samsir, keduanya adalah Sarjana Sastra, menulis kritik dan menerbitkan buku puisi. Barang tentu lulus mata kuliah kritik sastra. Pun tentu telah menulis penelitian sastra secara ilmiah. Dari situ, saya bisa memahami mengapa keduanya, dan mungkin banyak lagi orang di luar sana, begitu getol membela “ilmu sastra”. Sebagaimana barangkali para dokter banyak yang geleng-geleng kepala melihat Sarjana Sastra (kalau ada) begitu “seolah-olah” ahli bicara tentang Covid-19 dari kacamata medis. Mungkin juga ini gejala

“pasca-kebenaran” yang tak lagi menghormati basis keilmuan dan keahlian suatu persoalan.

Ilmu sastra paling tidak ditopang oleh tiga mata pengetahuan: teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jika hendak melakukan penelitian ilmiah, tidak boleh tidak seorang pembelajar sastra mesti khatam dan lulus metode penelitian sastra. Jadi, teori sastra, sejarah sastra, metode sastra, dan kritik sastra adalah pilar-pilar utama ilmu sastra. Saya meyakini, inilah yang dibela habis oleh Saut dan Samsir.

Lantas, bolehkah orang bukan mahasiswa sastra dan non-Sarjana Sastra menulis atau melakukan “kritik sastra”? Jawabannya adalah tentu saja boleh, tidak ada yang berhak melarang. Dengan catatan tentu asal tahu ilmunya, dan atau mampu melakukannya. Perkara ini bukan soal boleh atau tidak, ini soal “pantas” atau “tidak”. Tidak “etis” dan kurang pantas saja tentunya ada pemandangan (mohon maaf) “orang sok tahu” suatu perkara yang ada ilmu dan institusi keilmuannya, padahal dia sendiri tidak mengetahuinya. Jika saja orang itu mumpuni, tentu lain cerita. Itu suatu hal yang patut diapresiasi dan dihormati.

Bukankah persoalan “etis” itu adalah persoalan kepantasan? Dan, bukan persoalan benar salah atau boleh tidaknya. Itu yang perlu diluruskan dan perlu dipahami agar tidak keliru dalam menilai sikap “kritis” atas praktik menilai dan mengkritik sebuah karya sastra di luar sana.

Yang dikritik, dikoreksi, diingatkan, atau bahkan mungkin “dikutuk” oleh Saut dan Samsir adalah ketika seseorang “merasa” dan “mendaku” sedang mengkritik atau menilai sebuah karya sastra, namun sebenarnya hanya sedang “merasai/ menikmati” dan “mengomentari” karya sastra itu. Tentunya penilaiannya tergantung “perasaan” sang komentator, dan minus “ilmu sastra” apatah lagi metode (ilmiah)-nya. Tak ada perspektif intinya. Syukur-syukur jika tidak menganggap “ilmu dan metode sastra” itu tidak penting dipelajari

hanya karena sudah menganggap dirinya mampu berbicara dan menilai karya sastra (dengan perasaannya) meski tak harus mempelajari ilmunya. Hal seperti ini tentu kurang bagus—untuk pemajuan literasi— dibiarkan berlarut- larut. Sesuai dengan judul salah satu tulisan Samsir di atas, bahwa karya sastra (dan kehidupan bersastra) harus “diluruskan” dengan kritik sastra.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa belajar ilmu sastra itu, tak mesti di institusi resmi, sebagaimana orang di luar pembelajar akademis sastra sering bilangkan. Itu tak salah memang. Tak ada yang berhak juga memaksa. Hanya saja memang akan lebih baik jika belajar di institusi sesuai bidangnya dan pada “ahlinya”. Yang paling penting sebetulnya adalah mampu memahami dan menerapkan ilmu serta metodenya sesuai “kaidah” keilmuan. Kelebihan dunia akademik sesungguhnya adalah kemampuan “saintifikasi” dan “sistematisasi” pengetahuan, termasuk dalam menilai dan mengkritik karya sastra. Jika itu mampu dilakukan tanpa harus menempuh jalur akademis, tentu sangat menggembirakan dan luar biasa. Hal itu layak diapresiasi dan dihormati.

## **Kritik Sastra dan Penciptaan Karya**

Dalam ilmu sastra, sayangnya memang tidak dikenal kritik sastra perspektif “perasaan”. Yang ada adalah kritik sastra dengan deretan perspektif seperti formalisme struktural, feminis, ekokritik, marxis, postruktural, posmodern, poskolonial, multikultural, psikoanalisis, dan sederet lagi perspektif kritik sastra lainnya yang beriringan dengan perkembangan filsafat dan teori-teori sosial humaniora. Terang bahwa kegiatan membaca dan menilai sastra (baca: kritik sastra) bukanlah urusan “kaleng – kaleng”. Ada ilmu pengetahuan berikut teori dan metode di dalamnya yang dilakukan secara sistematis.

Dengan banyaknya perspektif yang perlu dipelajari seorang mahasiswa dan Sarjana Sastra; dari teori, sejarah, hingga penerapan kritiknya terhadap karya di atas, maka saya pun dapat menghargai “perasaan kritis” Saut dan Samsir menyaksikan “ilmu”-nya seperti “diobok - obok” sesuka hati oleh orang yang menurut tolok ukur ilmu sastra, sayangnya tak (terlalu) sesuai, namun seolah dibiarkan begitu saja atau malah sering kali seperti “dirayakan”. Tentu tak berlebihan jika Saut dan Samsir merasa pantas membela marwah (*dignity*) ilmu yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun itu sekaligus menjalankan tugas kesarjanaannya untuk meluruskan yang dinilainya sudah menyimpang, minimal yang menurutnya tak berkesesuaian secara keilmuan sastra.

Hal itu tak pantas lantas dibilang “egoisme sektoral”, saya kira. Tugas para sarjana memang sebisa mungkin mengingatkan secara elegan. Paling minimal membuat tulisan dan menyebarkan gagasannya kepada publik untuk dibaca, dibincangkan, dan diperdebatkan hingga dikritik kembali kalau perlu. Hal itu baik untuk bahan refleksi sekaligus jalan pemajuan literasi, khususnya di Kaltim.

Dari para ilmuwan sastra, salah satunya adalah Terry Eagleton, kita belajar bahwa tugas kritik adalah selain menilai karya, juga sekaligus mendidik pembaca. Tepatnya mendidik selera pembaca, lebih tepat lagi mendidik “publik” pembaca. Bagaimanapun, sastra tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang netral. Pun, juga tidak bisa dimaknai sebagai suatu hal yang bebas nilai. Secara kritis, sastra dapat dilihat sebagai sebuah alat hegemoni, alat memengaruhi pembaca dan masyarakat—disadari atau tidak, diakui atau tidak. Seperti media massa dan beragam rupa media lainnya, sastra adalah seni yang berisi keindahan estetis sekaligus kandungan politis nan ideologis. Karya sastra merupakan bagian dari diskursus publik. Olehnya, kritik diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab publik, selain untuk mendidik khalayak pembaca, bahkan juga penulisnya.

Sebagai catatan kesaksian, bayangkan bagaimana suasana hati dan pikiran para penggemar dan pembaca karya Faisal Oddang—sebagai pemenang beberapa kali penghargaan sastra di level nasional—menyaksikan karya penulis idolanya dikritik habis dari perspektif poskolonial oleh Harry Isra—yang menjadi juara sayembara kritik sastra DKJ 2017. Karya Oddang disebut “*Memandang Seperti Penjajah*” dalam kacamata poskolonial yang digunakan oleh Harry Isra. Dan, Oddang—sapaan Faisal Oddang—mengakui secara terbuka bahwa sebelum adanya kritik tersebut dia sendiri tidak/belum terlalu paham apa dan seperti apa itu cara pandang poskolonial.

Dengan jiwa besar, di hadapan para pembaca dan penggemarnya (bahkan barangkali juga pengagum dan pemuja setianya), Oddang mengakui dan menerima secara terbuka kritik elegan itu. Bahkan, di forum diskusi yang mirip pengadilan sastra baginya itu, yang dilaksanakan di sebuah lapangan depan aula kampusnya, Oddang justru berterima kasih kepada pengkritik karyanya. Dirinya seperti paham, bahwa begitu karyanya sudah dilepas ke publik, dia sebagai pengarang “sudah mati”, dan karyanya adalah milik pembaca, milik publik. Maka, begitu ada kritik terhadapnya, itu adalah hak publik sebagai konsekuensi dari karya sastra sebagai bagian dari diskursus publik.

Kerendahan hati Oddang, diikuti dengan perkataan bahwa dirinya akan terus belajar lagi dan memperbaiki aspek pengaryaannya adalah kebesaran jiwa yang menjadi penanda bahwa dirinya kelak akan menjadi penulis “besar”. Tepatnya, penulis yang turut dibesarkan oleh kritik yang dihormatinya secara sadar.

Peristiwa berkesan di atas dihelat lima tahun lalu, tepatnya tahun 2016. Sebagai refleksi, bagi yang mengenalnya, silakan menilai masing-masing bagaimana Oddang dan Harry bertumbuh mekar hari ini setelah lima tahun dari pergulatan intelektualnya kala itu. Saya beruntung dapat menyaksikan peristiwa langka itu.



Kisah dan kesaksian di atas adalah salah satu contoh bagaimana “kritik sastra” mendidik pembaca, sekaligus penulis/peng-karya itu sendiri. Ada evaluasi dan asupan bergizi terhadap karya dan penciptaan karya di situ. Kisah itu pula adalah penanda kapasitas literasi masing–masing antara peng-karya dan kritikusnya.

## **Institusi Kritik dan Sosiologi Pengetahuan**

Kalimantan Timur memang secara sosiologis baru sekitar 12 (dua belas) tahun terakhir memiliki institusi pendidikan tinggi yang kefokusannya belajarnya Sastra, khususnya Sastra Indonesia. Itu kalau kita menjadikan Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai tolok ukur utama. Meski di Universitas Balikpapan (Uniba) setahu saya ada jurusan Sastra Inggris, di Fakultas Sastra, lebih duluan daripada Unmul.

Sivitas Akademika menyebut Jurusan Sastra di Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya sebagai jurusan “sastra murni”. Artinya kefokusannya secara institusional belajarnya sastra (dan bahasa) secara dominan. Uniba duluan memiliki institusi ini meski untuk Sastra Indonesia, Unmul tetap yang pertama saya kira, di Kaltim, bahkan di Pulau Kalimantan (Indonesia) ini. Soal bagaimana sastra dipelajari di kampus Uniba, dan bagaimana dampaknya ke luar kampus, saya tidak tahu persis dan belum pernah meneliti lebih jauh.

Jurusan lain yang belajar sastra sebetulnya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra, baik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maupun Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris dan atau Pendidikan Bahasa dan Sastra lainnya. Kalau ini, Kalimantan Timur sudah lama memilikinya untuk menyuplai kebutuhan guru bahasa dan sastra. Institusi ini, selain fokus studinya adalah pendidikan, bisa dibilang mayoritas mata kuliahnya diarahkan untuk mempelajari bagaimana

berbahasa yang baik dan benar. Pun, ada mata kuliah sastra, hingga kritik sastra, dia tidak dominan sebagaimana jurusan sastra di Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya. Itu penilaian sosiologis saya.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, pada bagian reflektif ini, saya ingin mengatakan bahwa jika (tentunya tidak harus) universitas negeri terbesar di sebuah provinsi, seperti Universitas Mulawarman di Kaltim dan Universitas Borneo di Kaltara, menjadi tolok ukur kehadiran sebuah fakultas (*faculty: to do*) yang mempelajari sastra secara akademis, maka sesungguhnya Kaltim baru memulainya 12 tahun lalu. Dengan tolok ukur kehadiran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman yang didirikan pada tahun 2009. Itu pun, efektivitas pembelajaran sastra secara masif dan tersistematis perlu dicek lagi kapan berjalan secara efektif mengingat di awal pendirian setiap institusi, khususnya sebuah institusi pendidikan di perguruan tinggi tentu membutuhkan penyesuaian dan permbenahan di awal berdirinya. Baik secara kurikulum maupun ketersediaan tenaga pengajarnya.

Dalam benak kecil saya, pernah tebersit satu perasaan haru bercampur sendu ketika menyaksikan sebuah pamflet Dies Natalis ke-60 dari satu Fakultas Ilmu Budaya--dulunya bernama Fakultas Sastra (FS), dulunya lagi bernama Fakultas Sastra dan Filsafat sebelum diubah dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS) di wilayah lain Republik ini, di mana saat itu FIB UNMUL juga hendak merayakan Dies Natalis-nya yang ke-10. Itu tepat pada tahun 2019 lalu sekaligus FIB UNMUL diresmikan sebagai Fakultas defenitif setelah disahkan oleh Dikti. Jika FIB yang ber-Dies Natalis ke-60 itu adanya di Pulau Jawa dan Bali, tentu bisa dimaklumi, karena pendidikan modern kolonial mula-mula memang dihadirkan di sana, tentu dengan kepentingan kolonial kala itu juga. Namun, wilayah tempat kampus tersebut berdiri, serupa dan hampir semasa saja dengan kehadiran Unmul di Kaltim. Saya pun lantas menghitung, ada selisih 50 tahun

(1/2 abad) dari kehadiran institusi Fakultas Sastra/Fakultas Ilmu Budaya dari keduanya.

Saya pun mencari makna dan menanyakan ke seorang “Profesor” apa arti dari selisih 50 tahun alias setengah abad itu. Kode jawaban dari Profesor itu adalah dengan menyebut nama besar seorang Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Diskusinya panjang kali dalam soal Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Budaya, terkhusus lagi Sosiologi Sastra. Lebih spesifik lagi sosiologi pengetahuan. “Institusi”, termasuk institusi kebudayaan, terkhusus lagi institusi sastra, memang menjadi satu subjek pembahasan serius dalam kajian sosiologi budaya dan sosiologi sastra.

Keberadaan institusi sastra secara akademis di perguruan tinggi penting dicatat karena bertalian dengan satu bidang kajian dalam sastra yakni Sosiologi Sastra, seperti disebut di atas. Tentu Jurusan Sastra di perguruan tinggi bukanlah satu-satunya penentu pemajuan dunia sastra di masyarakat Kaltim. Tulisan ini memang tidak bermaksud mengatakan itu. Tapi, mengabaikan kehadiran institusi perguruan tinggi dalam membaca perkembangan (sejarah) pemajuan sastra, tentu juga adalah hal yang tidak cukup. Seperti ada yang kurang.

Institusi pendidikan itu penting dalam rangka “men-sistematisasi dan men-saintifikasi pengetahuan” yang berserak di pengalaman banyak masyarakat. Termasuk di masyarakat sastra. Peran “men-sistematisasi dan men-saintifikasi pengetahuan” oleh perguruan tinggi inilah yang tidak banyak dimiliki oleh institusi atau komunitas lain di luarnya. Pun, peran ini juga yang membedakan peradaban Eropa—yang menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan sains dan teknologi di era kebangkitannya—dengan peradaban sebelumnya, sebut saja misalnya peradaban Islam, Cina, dan India. Peradaban Eropalah yang dianggap paling berhasil “men-sistematisasi dan men-saintifikasi pengetahuan” yang diserapnya dari peradaban-peradaban lain. Meski Eropa dikenal bukanlah penemu dan perintis banyak ilmu-

ilmu itu, namun peran “men-sistematisasi dan men-saintifikasi” hingga mampu “menginstitutionalisasi” pengetahuan di universitas dan di institusi ilmu pengetahuan lainnya, Eropalah jawaranya. Dunia mengakui itu. Kita pun belakangan mengadaptasi sistemnya.

Dengan begitu, institusi sastra di perguruan tinggi dan komunitas sastra di masyarakat, meminjam kalimat Professor Faruk, Guru Besar Ilmu Sastra UGM Yogyakarta, “mestilah saling menghidupi dan saling mengasupi.” Barangkali, itu mengapa di UGM ada Pusat Kebudayaan—selain Pusat Studi Kebudayaan—sebagai wadah bertemunya para seniman dan sastrawan, budayawan dengan para mahasiswa dan Sarjana-Sarjana Sastra untuk saling mengasupi. Saling asih, asuh, dan asah dalam filosofi Jawa-nya, yang sempat diajarkan kepada kami selaku pembelajar oleh salah satu Profesor di sana.

## **Catatan Reflektif**

Masyarakat punya bahan dan kaya pengalaman. Kampus punya ilmu, metode, dan kemampuan men-sistematisasi pengetahuan. Perjumpaan dan pertalian itulah yang mestinya dilakukan. Apa yang sering disebut sebagai “ego sektoral” mestinya dihilangkan. Kolaborasi adalah istilah dan praktik populer di abad ke-21 ini yang layak diadopsi. Masyarakat dan kampus mesti menyatu.

Secara sosiologi pengetahuan dan kacamata institusional akademis sastra, Kaltim memang mesti diakui memiliki selisih setengah abad dengan wilayah lain di Indonesia. Namun, rupanya paling pertama di Kalimantan yang memiliki Fakultas Ilmu Budaya, di mana di dalamnya terdapat jurusan sastra “murni”. Kita tak perlu berkecil hati dan merendah diri (merasa inferior) karenanya. Pun, tak perlu pula berbesar kepala dan membusung dada untuk

menyikapinya. *Self-denial*, hanya menambah daftar tunda pembenahan internal yang didasari akan kesadaran kritis untuk berbuat lebih baik dan memajukan kebudayaan.

Menyadari posisi sosiologis dan pentingnya peran institusionalisasi di atas, saling memuji tentu baik, namun tak boleh berlebihan. Kita mesti berbenah banyak untuk bisa berkontribusi lebih baik untuk peradaban dan keadaban di Bumi Etam. Kritik berbasis ilmu pengetahuan perlu dan penting untuk saling mendidik. Terutama dalam kehidupan bersastra dan berkebudayaan. Kapasitas literasi dan indeks kehidupan berbudaya adalah tugas bersama untuk ditingkatkan.

Sebagai cerminan akan pentingnya kehidupan berkebudayaan, tahun lalu Yogyakarta dan Bali sebagai pemilik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang tinggi, dinilai mampu mengatasi pandemi Covid-19 secara efektif. Salah satu faktor penting yang dicatat para ahli dan peneliti budaya adalah “tingkat kesadaran dan partisipasi” masyarakatnya yang tinggi. Selain itu, bekerjanya lapis-lapis kebudayaan di tengah masyarakat juga menjadi faktor penting yang ditelisik lebih dalam.

Kalimantan Timur juga mencatat keunikan serupa meski tak menyeluruh. Kabupaten Mahakam Hulu membuktikan beberapa bulan awal mekanisme budaya masyarakatnya dan didukung oleh kebijakan pemerintahnya, mampu bekerja dan menahan angka penyebaran Covid19 di angka nol alias *zero case*.

Literasi, berikut kapasitas yang mengikutinya, tak mesti dibaca pada soal baca tulis semata. Literasi melampaui soal baca tulis saja. Meminjam konsep Alwy Rachman, sebagai Budayawan dan Akademisi Ilmu-Ilmu Humaniora, bahwa kapasitas literasi adalah kapasitas membaca kebudayaan sekaligus kemampuan untuk dibaca (baca: dikritik) oleh kebudayaan. Literasi rupanya adalah aksi membaca sekaligus kesediaan untuk dibaca dan dievaluasi. Tentunya

untuk kepentingan saling mendidik dan bertumbuh bersama. Di situ kapasitas menilai dan kesediaan dikritik menjadi penting.

Jika dikaitkan dengan kemampuan mengkaji karya sastra dan mengkritik kebudayaan, maka kapasitas literasi sesungguhnya adalah cermin kemampuan memahami dan menilai suatu karya dengan kapasitas dan keilmuan memadai sekaligus kebersediaan dengan rendah hati dan jiwa besar untuk menerima kritik dan hasil evaluasi secara elegan.

Jika itu sudah dapat kita amalkan dengan baik, niscaya kapasitas dan level literasi manusia di Kaltim dapat mencapai pada taraf tinggi sekaligus menjadi masyarakat berkeadaban luhur secara menyeluruh. Sekaligus, sikap kritis dan teguran intelektual ala Saut dan Samsir seperti dilukiskan di awal tulisan ini, akan semakin berkurang seiring semakin menebalnya kapasitas literasi dan kecendekiaan kita di hadapan “kritik”, khususnya kritik sastra “yang berperspektif”.

Semoga ikhtiar kita menuju ke sana.

\*) Tulisan ini dipublikasikan pertama kali oleh *madahetam.com* pada awal Agustus 2021.

## "Penari dari Kutai" di *Dunia Sukab Seno*

**L**ama saya tidak menulis, apalagi mengulas karya. Barangkali setengah semester lebih. Membaca, iya. Nonton *Youtube* dan *Netflix* jangan ditanya. Yang pertama sangat sering, yang kedua kadang-kadang selama pandemi ini. Ibarat bisul, tulisan ini adalah bisul yang pecah setelah seperempatan tahun membahana tak tahu saluran keluar ke bumi. Setidaknya tulisan ini memberi tanda bahwa saya masih ada dan bacaan yang mengendap itu akhirnya meluncur juga di halaman-halaman tulisan ini.

Dua bulan terakhir, bahkan lebih barangkali, saya banyak membuka cerita-cerita rakyat yang dikemas jadi cerita anak oleh tim Badan Bahasa (dulu bernama pusat bahasa) Kemendikbud. File digital karya-karya tentang wilayah budaya dari Sabang sampai Marauke di-*upload* di website Kemendikbud<sup>1</sup>. Saya pun akhir-akhir ini

---

<sup>1</sup> Di koleksi digital yang bisa diunduh sepuasnya ini, berjumlah sekitar 800-an *e-book* pdf cerita rakyat, cerita anak, dan kumpulan cerita pendek Indonesia, juga dimuat beberapa cerita rakyat dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dua penulis dari Kaltim dan menulis tentang cerita rakyat Kaltim (Dayak Benuaq) di koleksi ini adalah Djumri Obeng dan Korrie Layun Rampan. Djumri Obeng menulis buku *Perjalanan ke*

banyak menguliknya. Setidaknya, di tengah kondisi pandemi yang kian berat, bacaan mesti di-*setting* ringan. Biar hidup saja yang berat, bacaan jangan.

Di *repository* website kemendikbud itu ketemu juga cerpennya Seno yang "jadul". Judulnya *Ngesti Kurowo*. Saya belum sempat membacanya, juga tak tahu apa isinya, tentang apa. Saya hanya terkesima bahwa cerpen itu bertarikh tahun 1984 dan dimuat di buku *Cerita Pendek Indonesia 4* suntingan Satyagraha Hoerip, dan diterbitkan oleh Depdikbud. Sekadar bocoran, di *repository* Kemendikbud tersebut di atas tersedia *Cerita Pendek Indonesia 1, 3, dan 4*<sup>2</sup>. Saya tidak menemukan yang ke-2. Yang ada *Tiga Puluh Cerita Pendek Indonesia Modern: Tahun 1920-1940*<sup>3</sup>. Keempat buku ini saya pilih-pilih karya di dalamnya yang ingin saya baca. Seperti membaca sejarah (sosial budaya) dalam sastra.

Yang bikin saya tertarik sebetulnya adalah Seno, yang lebih sering saya jumpai tulisannya tentang karakter Sukab di koran *Kompas* Minggu rupanya ada dalam jejeran penulis berikut karyanya di buku-buku kumpulan cerpen lawas Indonesia itu. Artinya, Seno menulis, khususnya menulis cerpen sudah sejak saya belum lahir. Sudah lama sekali. Konsisten. Produktif. Kritis. Kadang atau mungkin lebih sering "*nyeleneh*". Tapi, membaca analisisnya tentang sastra dan kesastraan juga bukan tidak bikin pusing kepala.

Meski saya bukan "pembaca (setia) Seno", setidaknya saya pernah membaca sekilas dan memiliki skripsinya di IKJ tentang penulisan skenario--yang dibukukan itu. Seno juga seorang Doktor di bidang ilmu Sastra. Tak tahu apakah masih rektor di IKJ atau tidak lagi, saya belum mengecek. Yang pasti, sosok satu ini adalah sosok serbabisa. Pertama dan terakhir bertemunya di sebuah konferensi

---

*Gunung Lumut (Cerita Rakyat Suku Dayak Benuaq)*, terbit tahun 1993. Sementara Korrie menulis buku *Asal Usul Api*, diterbitkan 2001 oleh Pusat Bahasa Kemendikbud.

<sup>2</sup> Masing-masing berjudul *Cerita Pendek Indonesia 1* (1979); *Cerita Pendek Indonesia 3* (1979); *Cerita Pendek Indonesia 4* (1984).

<sup>3</sup> Terbitan tahun 1994, suntingan Widodo Djati dan Suryati Syam.



internasional *Inter-Asia Cultural Studies*, di Universitas Airlangga, tahun 2015 lalu. Sudah lama. Saya mengikuti panel diskusinya, lalu bertanya sebagaimana lazimnya ritual konferensi internasional, lalu mengobrol sejenak setelah acara, mengajak berfoto, lalu menghilang pindah ke diskusi panel lainnya selama tiga hari. Seno membahas mengenai "kekerasan" dalam sastra dan sinema kala itu--kalau tidak salah. Saya lupa pastinya, yang saya ingat ada 65-nya, ada 98-nya. Barangkali. Bukan itu juga yang ingin dibahas di tulisan ini, melainkan cerpen Seno tentang Kalimantan. Ya, tentang Tanah Kutai di Kalimantan Timur.

\*\*\*

Setelah lama tak sempat membaca tulisan Seno di *Kompas* Minggu tentang "Dunia Sukab", saya pun menjumpai cerpennya di buku lawas versi digital Kemendikbud tadi. Saya pun memutuskan membuka akun lama Ipusnas di *gadget* saya. Lalu, di tab yang layarnya agak lebar.

Tablet, benda satu ini paling banyak berjasa dalam membuat leher saya kaku karena kebanyakan menunduk membaca halaman per halaman *pdf* dan *e-book* selama pandemi. Bahkan, sebelum pandemi menyerang beberapa tahun sebelumnya, saya sudah akrab dengan tablet untuk membaca *e-book* di Ipusnas, Ikaltim, dan *pdf-pdf* gratisan lainnya. Belakangan ketika sudah sedikit berduit dan terpaksa belanja *online*, toko buku digital pun sempat akrab. Yang pasti, pandemi dan buku digital berjodoh mempertemukan saya dengan karya-karya Seno di Ipusnas. *Dunia Sukab* dan *Obrolan Sukab* ada di situ.

Saya awalnya membaca *Obrolan Sukab*, yakni kumpulan tulisan kolom udar rasa di *Kompas* dan *PanaJournal.com*. Setelah merasa bosan karena *setting*-nya kebanyakan tentang Jakarta yang kurang

akrab dengan hidupku, saya pun memutuskan pindah membaca *Dunia Sukab*. Oh iya, sebelumnya ketika mengulik *Dunia Sukab*, saya mencoba mencoba membuka buku-buku Seno di Ipusnas yang jumlahnya lebih selusin itu. Banyak yang bahasanya santai tapi isinya terlalu serius, menurutku. Kecuali cerpen *Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi* yang rada "imajinatif dan sedikit dikesan erotis" itu. Mungkin saya saja yang belum akrab dengan Seno berikut karya-karyanya.

Saya kembali ke *Dunia Sukab* yang gagal kuunduh ke rak buku pinjaman Ipusnas-ku. Hampir sebulan barangkali. Akhirnya bisa juga.

Dan, betapa takjubnya saya ketika membaca judul pertama di buku itu: "*Penari dari Kutai*". Wah, boleh juga menurutku. Kubacalah akhirnya cerpen itu dalam satu tarikan napas hingga selesai. Alamak, kulihat tahunnya, 1984. "Beghh..." gumamku. "Lebih tua dari aku. Seumuran karya *Ngesti Kurowo* di kumpulan *Cerita Pendek Indonesia 4* suntingan Satyagraha Hoerip itu," pikirku. Sukab ternyata seniorku andai aku anak Jakarta, wkwkwk. Andai aku jadi juniornya di geng anak muda Jakarta di zamannya, barangkali dia yang ajari aku baca Fredi S. di opletnya si Doel yang diasistensi Om Mandra.

## ***Penari dari Kutai*: Potret Perempuan Transmigran Jawa, Mandau, dan Celurit**

Lama sekali sudah rasanya saya menginginkan adanya kajian khusus pasca-Orde Baru (*post-Orba*) di studi sastra, kajian budaya, dan studi-studi sosial humaniora di Indonesia. Sebagaimana barat mencetuskan posmodernisme (*post-modernism*), Asia Timur menggaungkan *post-cold war*, dan India serta pelbagai negeri bekas jajahan lainnya dengan poskolonial (*post-colonial*). Di Indonesia, khususnya di Kalimantan, tidak bisa tidak turut dipengaruhi lanskap sosial budaya, ekonomi, dan politiknya oleh rezim Orde Baru. Disukai

atau tidak, disetujui atau tidak. Sejarah sosial budaya negeri ini telah mencatatnya. Hanya saja, di perbincangan sastra, masih kalah dengan cerita cinta kaum urban, ataupun isu poligami di dunia sastra "Islami" belakangan ini.

Seno adalah salah satu perekam sejarah Orde Baru yang konsisten di dunia sastra. Pun dalam dunia jurnalistik dan akademis tentunya. Seno adalah perekam "atmosfer" Orba dalam kekhasan sastranya tentang "otoritarianisme", pembungkaman, penculikan, penghilangan orang, developmentalisme/ideologi pembangunan, modernisasi, transmigrasi, kohesi sosial budaya antar-etnik, kemiskinan dan ketimpangan, kemajuan dan penyingkiran, "Jawa-sentrisme", dan seterusnya. Tema-tema ini hadir dalam karya-karya Seno dari masa Orde baru hingga setelahnya.

Tak berlebihan barangkali kalau saya meyebut Seno sebagai sastrawan post-Orba; dengan definisi sastrawan yang mengangkat tema-tema seputar produksi dan reproduksi kebudayaan Orde Baru hingga pengaruh dan dampaknya sejak awal lahirnya (Orba) hingga setelahnya sampai hari ini.

\*\*\*

Di cerpen *Penari dari Kutai*, Retno adalah perempuan transmigran Jawa yang merupakan penari tarian Kutai di Upacara Erau. Retno adalah istri Balu, lelaki bersenjata mandau yang memberinya lima orang anak. Lalu ada Barjo, lelaki yang memadu kasih dengan Retno, belakangan diketahui oleh Balu. Barjo tak disebutkan secara eksplisit dari mana asalnya, identitasnya bisa ditebak dari senjata yang dibawanya ketika berhadapan dengan Balu--celurit.

Ya, di tahun 1984, simbolisasi celurit (bukan keris) dan mandau (disebut juga badik yang digunakan oleh Balu) sudah ada anasir-anasir tak sedapnya. Jamak diketahui kemudian, di bagian tengah

dan barat Pulau Borneo ini, merebak konflik itu justru setelah Orde Baru runtuh. Belasan tahun kemudian. Seno dengan "canggih" merekam itu sebagai sebuah gejala.

\*\*\*

Retno, sang penari tarian ritual Erau diselamatkan oleh Balu di tengah kondisi kesulitan sebagai transmigran beberapa tahun sebelumnya. Tambang rakyat menimbulkan penyakit menular. Retno yang ada di sekitar rawa dan hutan di sekitar pendulangan emas itu mengalami kesulitan hingga kritis. Datanglah Balu menyelamatkan, menolong, lalu menikahinya. Anaknya lima. Kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Balu dicitrakan suka mabuk-mabukan dan menampar lalu memukuli Retno.

Kemudian, datanglah Barjo sebagai orang ketiga. Memberi perhatian kepada Retno yang sedang tidak bahagia rumah tangganya bersama Balu. Balu cemburu dan menantang Barjo bertarung. Barjo meladeni, hingga terjadilah pertarungan berdarah. Barjo tewas, sementara Balu terluka parah. Retno, sang perempuan, penari dari Kutai itu tak bisa berbuat apa-apa. "*Ngenesis*". Tokoh perempuan dalam cerita ini tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan dua laki-laki yang bernafsu saling membunuh karena memperebutkannya. Sebuah cerita cinta segitiga berdarah di Tanah Kutai, Tenggara, era 80-an.

Menarik menelisik bahwa Seno di tahun 1984 sudah "menangkap" kekurangan harmonisan itu melalui "duel" dua laki-laki atas nama perebutan "cinta"--atau apa pun namanya--dari seorang perempuan. Dua laki-laki, berbeda latar identitas budaya (dengan mandau dan clurit sebagai simbol), meski bisa jadi sama dari segi kelas sosial. Keduanya sama-sama hidup di arus bawah dari hierarki material Kalimantan kala itu--bertarung memperebutkan seorang

perempuan transmigran yang dari namanya saja sudah bisa ditebak dari mana asalnya kala itu<sup>4</sup>.

## Sungai, Rawa, dan Alam Kalimantan

Sungai adalah jalur transportasi utama di masa itu. Ketinting adalah alat transportasinya. Ada pula kayu-kayu yang keluar hutan-hutan dan diangkut ke hilir dan muara. Mungkin menuju ke laut atau ke pabrik-pabrik kayu lapis di Samarinda dan sekitarnya. Yang pasti, industri kehutanan lagi jaya-jayanya kala itu. Itu yang dipotret oleh Seno.

Rawa adalah tempat mencari emas. Tulis Seno di cerpen ini. Dengan demikian, Kalimantan Timur sepertinya memang mengandung emas. Selain emas hitam atau batubara yang sedang *booming* dan *down* lalu digali lagi hingga hari ini. Hanya saja kekayaan itu rupanya sedari dulu menurut Seno tidak memberi kesejahteraan yang cukup bagi orang Dayak Kenyah sekalipun. Bahkan kepada transmigran seperti Retno yang jauh-jauh dari Jawa meninggalkan kampung halamannya sampai ke Tanah Kutai, Pulau Kalimantan.

Dari "balok-balok kayu ribuan kubik" yang diangkut oleh perahu besar, dan kandungan emas di rawa-rawa dan hutan, jelas bahwa alam Kalimantan adalah penyedia kekayaan alam yang besar. Hanya saja, utang yang tak terbayar, dan kapal kecil warga yang hendak ke hulu tergoyang akibat perahu besar pengangkut kayu yang lewat adalah simbolisasi bagaimana rakyat kecil terombang-ambing oleh

---

<sup>4</sup> Karena kata Syamsir Marangga, sekarang ini jangankan Retno, di Buton saja yang dulu akrab nama La Fulan, sekarang nama Messi pun sudah ada di sana. Apalagi Retno--barangkali.

"yang besar", yang mengangkut kekayaan alam Kalimantan berupa kayu-kayu ribuan kubik.

## **Transmigrasi, Emas, Malaria Kalimantan: Sastra sebagai Penghadiran Sejarah Sosial**

Sastra adalah perekam *cultural sense of reality*. Itulah salah satu peran sastra dalam membaca masa lampau untuk bercermin di masa kini dalam rangka menatap dan merencanakan masa depan. Itu jugalah yang menyandingkan karya sastra dengan sejarah dalam membaca kelampauan pada kacamata historisisme baru (*new historicism*).

Dalam cerpen ini, Seno menggambarkan program transmigrasi yang gagal. Gagalnya di mana? Yakni pada terbengkalainya Retno sebagai anak seorang transmigran yang harus jatuh ke tangan Balu yang dicitrakan suka mabuk-mabukan, menampar, dan memukuli Retno. Kasarlah intinya. Tapi, Retno tidak bisa memilih jalan lain karena Balu telah meyelamatkan hidupnya. Begitulah nasib perempuan, anak seorang transmigran, yang hidup di arus bawah, di Tenggarong, era Orde Baru tahun 80-an dalam cerita ini.

Tambang emas 'rakyat', malaria, "tauke" pemberi utang, dan kemiskinan adalah potret arus bawah yang Seno hadirkan di cerita ini. Seperti itukah Kalimantan, khususnya Tenggarong di masa itu? Apakah keagungan upacara Erau di mana Retno menari berbanding terbalik dengan kehidupan Retno yang anaknya lima orang tapi tak terjamin hidupnya? Andai saja jaminan sosial atau tingkat kesejahteraan rakyat Tenggarong masa itu baik, maka anak Retno, yang merupakan penari Erau dari Kutai itu, tidak akan terbengkalai. Pikiran Seno dapat dibaca demikian.

## Di Mana Sukab?

Tokoh/karakter sukab ada di akhir cerita. Muncul di dermaga menjemput Retno yang meminta diantar ke seberang. Seberangnya entah di mana. Bisa jadi ke Tenggarong seberang, Samarinda seberang, atau mungkin ke pulau seberang. Kembali ke Jawa atau mungkin Seno punya maksud lain yang kita tidak tahu sampai hari ini.

Sukab bagai tokoh "posmo". Minimal poststruktural. Perannya bukan hanya satu. Bisa tokoh utama, bisa figuran. Bisa narator ulung dalam cerita, bisa juga muncul dan hilang secepat kilat. Datang tak diundang, pulang entah ke mana. Seno memang penulis merdeka. Termasuk karakter ciptaannya juga merdeka mengelilingi Indonesia dan alam imajinasi pembaca-nya Seno. Di *Penari dari Kutai* ini, Sukab seperti polisi India, muncul setelah perkelahian selesai, *hehe*.

\*\*\*

Sudah dulu. Mari *ngobrolin* Sukab dan Retno-nya Seno, sang penari dari Kutai itu.

KL, 8 Juni 2021

\*) Tulisan ini adalah pemantik diskusi komunitas Sindikat Lebah Berpikir dan dipublikasikan pertama kali di *ullamappatang.com*

## Puitika Cinta dan Kerja

**P**uitika, kerja, cinta adalah tiga kata yang bisa mewakili pertalian kata–kata puitis Samsir Marangga di buku puisi perdananya ini. Kerja dan cinta, cinta dan kerja adalah dua substansi yang memengaruhi manusia dalam bersikap dan bertindak. Cinta adalah faktor terdalam, sedangkan kerja adalah superego, faktor pemaksa dari luar diri manusia. Meskipun demikian, cinta bisa tak berdaya di hadapan paksaan kerja sebagai superego.

Cinta dan kerja; aspal dan batubara, tergambar dalam lukisan puitik Samsir di buku ini. Cinta disimbolisasi melalui ungkapan–ungkapan rasa rindu, sendu. Lalu, “kerja” hadir pada aspal di Buton dan batubara di Samarinda. Mustahil dua hasil tambang itu melantai di bumi kalau tak ada cucuran “kerja”, kira-kira begitu cara bacanya.

Puisi berjudul *Selamat Ulang Tahun Aspal; Aspal (Tak) Pandai Berteman; Air Mata Buton* adalah kehadiran aspal dan Buton sebagai latar. Sementara, Batubara dan Samarinda dapat kita cerna dengan renyah di puisi *Mahakam (Tak Lagi) Jujur*, dan *Kita Adalah Puisi*. Puisi–puisi ini melukiskan “ruang” naratif sang penyair.



Puisi berjudul *Pengertian Puisi: Untuk Saut Situmorang* menegaskan kritik sosial Samsir pada kenyataan hidup yang disaksikannya.

*puisi adalah tambang aspal  
tidak habis dalam waktu 300 tahun,  
tapi jalan rayanya masih rusak.*

*puisi adalah pesisir pantai yang indah  
kini rusak karena penambangan pasir.*

.....

Di puisi yang sama, kondisi kerja Samsir bumikan benderang untuk menggugah mata silau kita akan puisi yang meneriakkan para tenaga honorer yang tiap lima tahun sekali dipolitisasi.

*puisi adalah pekerja honor  
yang tulus membangun negri  
tapi gajinya serupa harga parkir masuk mall kapitalis*

Jelas bahwa wacana tentang *labour* (baca: kerja) adalah tukikan tajam dari sang penyair. Tenaga honorer yang sempat membuat

Presiden negeri ini “heran” karena kondisi upah yang diterima dihadirkan Samsir sebagai interupsi keadaan.

\*\*\*

Cinta adalah daya dorong manusia dari dalam, sementara kerja adalah daya paksa yang menarik dari luar. Keduanya sering kali mesra, namun tak jarang saling bersilang amarah. Apakah cinta manusia dipengaruhi oleh relasi kerja dalam wujud sistem menata rumah bertangga bernama ekonomi? Ataukah (relasi) kerja dipengaruhi cinta dalam mengatur rakusnya bandar–bandar aspal di Buton sana, dan batubara di Samarinda sini? Tengok dan resapilah alunan puitika Samsir di karyanya ini, barangkali sang penyair menyimpan jawabnya di lipatan–lipatan bait puisinya.

Puisi-puisi cinta Samsir bisa dilihat dari *Hujan Meminta Kenangan; Menulis Kesepian; Kenangan Berguguran; Kenangan Ada di Angkringan, Tepian, dan Taman*. Tapi, puisi cinta Samsir tak jarang beririsan dengan kerja, kesedihan, dan keadaan yang memaksa air mata bercucuran. Singkatnya, cinta, rindu, kesedihan tak dibuat “cengeng”, melainkan diasupi energi untuk ‘menghadapi’ kenyataan.

\*\*\*

Jika lahir banyak tanya, mengapa harus “cinta” dan “kerja”? Menjawabnya mestilah menghela napas sejenak, lalu menegaskan bahwa seperti itulah nyatanya setelah menyelami sajak–sajak di antologi puisi Samsir ini. Samsir meneriaki keadaan yang tersungkur memalukan, namun ia tak kehilangan sisi puitisnya. Di lain sisi, ungkapan cinta dialunkan sendu tak lantasi mengubur lantanganya suara–suara kritis itu.

Itulah puitika kerja di hamparan timpangnya keadaan. Di sisinya ada cinta. Cinta disulam tetap sendu, romantik, (tak) marah–marah, namun tetap berbahaya. Pulau Buton dan tanah Kalimantan melabuhkan ribuan kenangan membaca. Di sebelahnya ada amarah atas kerakusan manusia atas manusia dan menikam alam. Semesta dibuat bergelora, menyalakan cinta yang seringkali disirami limbah aspal dan batubara. Di dua tanda bahaya ini, banyak kerja berujung sia–sia, di sisinya juga bergelantungan suara tangis air mata. Kabarnya, ada tatap mata kosong anak–anak hingga nyawa yang terbaring sia–sia.

Buton yang aspal dan Samarinda yang batubara adalah lambang–lambang ‘space’ (ruang) puitik Samsir. Seperti kapal Pelni yang bolak balik Buton–Kaltim, seperti itu pula rindu dan tinju Samsir didudukkan bersisian. “Ada cinta di sana, ada kerja di sini, biarlah puisiku yang bicara melebihi rasa tahu manusia”. Bisa jadi, itu pesan lantang dari bingarnya Mahakam menyambut dan mengenang Selat Makassar.

Cinta dan kerja dalam puitika melebur dalam teriakan puitis persis di ujung telinga mereka yang disandera kerakusan, dan yang suka bersolek dalam gelap. Di situ, puisi–puisi di buku ini pantas dibaca sebagai suara anak muda yang menolak kalah oleh superego bernama “kehidupan”.

\*) Tulisan ini adalah pracitra dari buku puisi Samsir Marangga berjudul *Aspal, Batubara, dan Puisi yang Marah*

## Mengungkap ‘Ruang Terdalam’ Puisi sebagai ‘Latar Depan’

**E**pilog ini bermaksud memberi penghormatan atas hasil pembacaan 66 puisi di buku Panji Aswan ini. Epilog sesungguhnya adalah literasi kritis sebagai penghargaan atas karya penulis yang dibaca, dihayati, lalu mengungkapkan ‘ruang terdalam’ yang terkandung oleh teks puisi sebagai ‘latar depan’.

Ruang terdalam, atau sering disebut sebagai ‘struktur batin’ (bahasa) adalah wilayah beroperasi dan berakrobat bahasa-bahasa puisi. Dengan begitu, seorang penulis puisi, juga pembacanya, sesungguhnya adalah orang-orang pilihan yang mampu menjangkau struktur batin dan atau ruang terdalam bahasa sebagai sarana ungkap makna. Kecuali dari itu, mereka bukanlah orang-orang istimewa di hadapan puisi, untuk tidak mengatakan orang kebanyakan yang biasa saja. Pejabat bahkan aristokrat dan miliarder sekalipun, tak terkecuali. Semua jadi orang biasa jika tak mampu menyelami bahasa batin sang jiwa di lapis dalam bahasa puisi.

Puisi-puisi “*Di Perahu, Aku Mabuk Rindu*” dapat dibaca sebagai daya ungkap sang jiwa tentang cinta. Kita dibawa ke dalam tanya,

seperti apakah itu cinta? Apakah aku yang merindumu di beranda perahu adalah cinta? Ataukah aku yang ingin memilikimu bahkan jika harus kutukar pun dengan seisi bumi (yang sebenarnya bukan milikku) adalah cinta? Apakah cinta berhenti jika aku, kau, dirimu menjadi kita yang menyatu? Ataukah cinta adalah kepuasan sang jiwa yang tak mesti menggenggam jemarimu tanda aku memilikimu? Panji membawa kita ke seni berteka-teki bernama 'cinta' itu.

Erich Fromm berpesan bahwa *maqom* cinta tidaklah dapat disamakan dengan egoisme (yang diperluas). Seorang pencinta adalah sosok yang mencintai setiap orang, mencintai segala sesuatu dengan rasa cinta sepenuhnya. Tak ada pengecualian di sana, apalagi tawar-menawar. Hanya caranya saja yang berbeda. Sementara egoisme (yang diperluas) membawa manusia ke laku mencintai seseorang, tapi di sisi lain tak mencintai (membenci) lainnya. Kata Erich Fromm, seorang egois belum layak disebut sang pencinta.

Membaca puisi-puisi Panji di buku ini, kita seakan diajak ke dalam ruang percakapan bernama 'cinta'. Apakah cinta itu? Bagaimana wujudnya? Seperti apa percakapan cinta dengan diri sendiri, sang pujaan hati, keluarga dekat, dan orang lain.

Puisi-puisi Panji di buku ini sebagian besar dibangun dengan 'style' bercakap. Aku, kau, dan dirimu dihadirkan untuk bercakap tentang cinta. Apakah itu cinta yang rindu, cinta yang marah, cinta yang kecewa, ataukah cinta yang 'aduhai'. Rasa dan laku cinta dihadirkan (*represent*) melalui keintiman percakapan jiwa di antara subjek-subjek pemilik cinta itu. Erich Fromm menyebutnya para pendiri cinta yang menolak untuk jatuh (cinta), karena sesungguhnya cinta itu didirikan, bukan jatuh (apalagi jadi derita kemudian). Cinta itu sepentasnya aktif dan produktif, tegas Fromm.

Penghadiran cinta di puisi-puisi Panji menceburkan kita seperti apa itu cinta, bagaimana rasanya, dan tak lupa bagaimana

seharusnya cinta itu. Dan, tak jarang Panji ingin membuatnya seolah jenaka, meski tak berarti kehilangan makna serius. Tapi, itulah Panji Aswan dengan sajak-sajak cintanya di buku ini.

Anak muda yang sedang diguncang ombak cinta di perahu rindu tak salah jika menyelami puisi-puisi (tentang) cinta lukisan Panji Aswan di buku ini. Bisa jadi, dari buku ini, kita menemukan bagaimana laku ideal mencintai dan seperti apa jalan bahagia menuju singgasana bernama cinta itu. Kita semua berhak untuk mengetahuinya.

Samarinda, 1 Maret 2019

\*) Tulisan ini adalah epilog buku puisi Panji Aswan berjudul *Di Perahu, Aku Mabuk Rindu*

# Sastra dan Rupa–Rupa 'Perlawanan'

**B**erbicara tentang Sastra dan Perlawanan mengingatkan kita pada dua aras kebudayaan dalam sastra dan seni. Karlina Supeli (2013) pada sebuah pidato kebudayaan enam tahun lalu menegaskan kembali pembelahan itu.

*“Sastra dan seni itu, panglimanya ada dua; estetika dan atau politika,”* tulis Karlina Supeli.

Dalam sebuah esai, yang kemudian dibukukan ke dalam kumpulan esai berjudul *'Membaca Sastra Memaknai Budaya'*, saya menulis tentang *'Kaum Estetis dan Kaum Politis'* untuk merespons tulisan seorang kawan penyair muda yang terkesan 'mengeluhkan' keadaan kepenyairan di universitas, terkhusus di Fakultas Ilmu Budaya.

Dalam sastra, estetika tentunya penting, sangat amat penting malah. Di situ kaum estetik benar. Tapi, tidak cukup bagi kaum politis. Kira–kira begitu dialog dan perdebatan imajinernya. Lagi pula, sejarah

telah mencatatanya, dan orang-orang besar di zamannya telah mencatat pula bahwa sastra memiliki peran besar dalam peradaban.

Sastra, dalam mengambil peran dalam peradaban, salah satunya adalah mengambil peran dalam perlawanan. Baik peran sebagai perlawanan terhadap kebodohan, kezaliman, ataupun yang paling sering dilupakan dan diabaikan adalah, sastra sebagai pemilik peran, sebagai penyimpan ingatan—untuk ‘melawan lupa’.

Sastra memiliki peran dalam ‘merawat ingatan’ (*rememorizing memory*). Dalam konteks ini, sastra dinilai sebagai perawat ingatan yang monumental. Sastra disebut sebagai ‘monumen’. Setara dengan Monas, Tugu Pahlawan, dsb.

## Memilih Jalan Sastra

Dalam perjalanan kesusastraan, kita mengenal banyak kutipan yang sering diucapkan di berbagai kesempatan pidato, orasi, ataupun diskusi mengenai sastra dan kebudayaan.

Seperti misalnya, ucapan Kennedy di bawah ini:

*“Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya.”* (John F. Kennedy)

Kennedy malah menempatkan sastra sebagai pengoreksi dari laku berpolitik bangsanya. Juga sebagai pembersih dan pelurus politik yang kotor dan bengkok.

“Aku bertanya,

tetapi pertanyaanku

membentur jidat penyair-penyair salon,



yang bersajak tentang anggur dan rembulan,  
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya  
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan  
termangu-mangu di kaki dewi kesenian.”

(19 Agustus 1977, W.S. Rendra, *Sajak Sebatang Lisong*)

Kutipan sajak W.S. Rendra di atas adalah contoh peran sastra dalam melawan kebodohan. Pada waktu itu, di ITB Bandung sedang digalakkan ‘*Gerakan Anti-Kebodohan*’. Gerakan ini menemukan data bahwa ada 8 (delapan) juta anak Indonesia tanpa pendidikan alias tidak sekolah atau putus sekolah. Kritik ini juga melahirkan film “*Yang Muda yang Bercinta*” di mana Rendra juga menjadi aktornya dan Sumanjaya sebagai sutradara.

Gerakan anti-kebodohan yang dikampanyekan Rendra tersebut dalam karya-karyanya melahirkan apa yang kita kenal di Indonesia sebagai ‘Wajib Belajar 9 Tahun’.

Di karya lain, Seno bicara tentang sastra dan jurnalisme. Dunia yang lama digelutinya, bahkan hingga kini.

*“When journalism is silenced, literature must speak. Because while journalism speaks with facts, literature speaks with truth.”*

(Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena ketika jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran.)

[Seno Gumira Ajidarma, ‘*Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara*’]

Seno menempatkan sastra dalam peran melawan pembungkaman. Pembungkaman terhadap pengungkapan fakta jurnalistik. Atau, dalam kata lain, pembungkaman kebenaran dengan

'manipulasi data dan peristiwa', maka sastralah yang mengambil peran 'menuliskan kebenaran' (*truth*).

Praktik yang paling terang dan monumental dalam sejarah kesusastraan Indonesia adalah Widji Thukul. Thukul bukan hanya membuat puisi perlawanan dan menyerukan pembangkangan. Tapi juga terjun langsung mengorganisasi perlawanan di masyarakat. Sampai mengorbankan nyawa, harta, dan kemerdekaannya sendiri. Widji Thukul adalah penyair yang getol melawan Soeharto dan berperan dalam menurunkan rezim Soeharto pada tahun 1998.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

Dituduh subversif dan mengganggu keamanan

Maka hanya ada satu kata: lawan!”

(Wiji Thukul, 1986, *Peringatan*)

Thukul adalah sastrawan, penyair Indonesia yang dikenal sejarah sebagai penyair yang getol menyuarakan dan melakukan perlawanan. Bukan hanya dalam karyanya, namun juga dalam praktiknya di lapangan.

## **Peran Peradaban Sastra**

Sastra dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat berada pada ranah kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan dianggap sebagai ruang di mana kekuatan kelompok dominan diawetkan dan dimampatkan. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni. Yakni, sebuah cara memengaruhi kesadaran masyarakat secara halus.

Apakah sastra digunakan untuk merayu dan menggombal masyarakat? Bisa jadi.

Tapi, sastra juga bisa dijadikan sebagai alat dalam men-*counter* gombalan. Dalam bahasa ilmiahnya, sastra menjadi alat hegemoni, sekaligus sebagai alat meng-*counter* hegemoni.

Selain itu, seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa sastra juga berperan dalam mengawetkan ingatan. Sekaligus juga bisa digunakan sebagai penginterupsi dari ingatan yang diawetkan tersebut. Dalam hal ini, sastra dalam konteks perlawanan dinilai sebagai jalan untuk 'mencairkan pembekuan ingatan'.

## **Refleksi: Belajar dari Sastra**

Sastra ternyata tidak hadir sebagai penghibur dengan kandungan estetikanya semata. Ada unsur politika di samping poetika dan estetikanya. Sastra juga dikenal tidak hadir dalam ruang hampa. Hal itu akan disadari ketika cara pandang, perspektif, dan paradigma kita memandang sastra tidak statis dan positivistis. Melainkan dinamis, dan juga kritis.

Dari uraian di atas pula, direfleksikan bahwa, konsep melawan dalam sastra tidak semata secara fisik, bahkan memang bukan itu terutama. Melainkan, secara imajiner, *soft* (halus), dan ideologis.

Pendeknya, sastra melawan dengan pikiran dan pengetahuan estetik-politis-ideologisnya. Melawan kebodohan ala Rendra, melawan pembungkaman ala Seno, dan menumbangkan rezim *status quo* seperti Widji Thukul. Dan, yang tak kalah pentingnya, sastra terus memelototi praktik hegemoni dan pewarisan ingatan dari sebuah perjalanan sejarah masyarakat.

Itulah sastra, sesekali puitis lagi romantis, lalu tak jarang berlaku politis lagi ideologis.

\*\*\*

Makroman, 15 September 2019

\*) Tulisan ini disusun sebagai bahan diskusi seminar/dialog sastra bertema **Sastra dan Perlawanan** oleh Himpunan Mahasiswa se-FIB UNMUL, Samarinda.

## Literasi dan Kontestasi Budaya

**P**andemi memang betul-betul membuka banyak endapan potensi perubahan sosial budaya. Banyak yang berubah akibat pandemi Covid-19 ini, dari cara pandang hingga perilaku berkebudayaan. Pemberitaan terakhir dan masih hangat berlangsung adalah tentang bantuan 2T (dua triliun) dari keluarga Akidi Tio, salah satu keluarga pengusaha asal Palembang dan berlomba-lombanya pejabat dan pengusaha menjanjikan bonus kepada peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Konon, bantuan keluarga Akidi Tio itu diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan akibat dampak pandemi Covid-19 sekarang ini. Sementara itu, berlomba-lombanya para pengusaha dan pejabat selain Kemempora yang lazim menyiapkan bonus kepada peraih medali di Olimpiade itu, menjanjikan bonus kepada peraih medali emas Olimpiade di tengah banyaknya rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan, dikatakan sebagai bentuk rasa bangga dan terima kasih kepada atlet yang telah mengharumkan nama negara di level internasional.

Terkait bantuan dua triliun dari keluarga Akidi itu, beritanya bukan main hebohnya. Seperti diwartakan oleh banyak media massa,

gubernur dan kapolda hadir dalam seremoni penyerahan bantuan secara simbolis. Yang menarik “*diulik*” adalah meski uang yang terhitung cukup fantastis tersebut “belum ada” atau “belum diterima” oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Polda Sumatra Selatan, mengapa pihak Polda dan Pemprov Sumsel “berani” melakukan serah terima secara simbolik, hingga melibatkan media untuk publikasi ke publik? Kenapa pula Heriyanti, putri Akidi Tio, begitu “percaya diri” mengumumkan ke publik akan menyumbang dengan jumlah uang yang super-fantastis itu kalau uang tersebut belum secara nyata ada di tangannya? Mestinya, baik pihak keluarga maupun Polda dan Pemprov Sumsel tidak perlu terburu-buru “memamerkan” rencana bantuan berjumlah sangat besar itu sampai benar-benar ada.

Namun, di tengah kehebohan dan pujian, tulisan Hamid Awaludin bertajuk: *Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat para Pejabat*, pada 1 Agustus 2021, awal bulan ini, muncul bak melawan arus deras itu. Tulisan itu seolah mengingatkan publik, khususnya juga ke pejabat publik agar lebih berhati-hati dan tetap rasional agar tidak mengulangi peristiwa serupa yang sudah beberapa kali pernah terjadi. Prof. Hamid ingin, di tengah kondisi sulit sekarang ini, publik dan pejabatnya tetap rasional dan tidak kehilangan akal sehat. “Kita memang butuh bantuan untuk meringankan beban ekonomi orang-orang tidak mampu akibat pandemi ini, namun jangan juga sampai membuat publik heboh dan bisa tertipu tanpa “menganalisis” secara akurat terlebih dahulu”, begitu kiranya pesan yang hendak disampaikan sosok yang pernah menjadi menteri dan duta besar itu.

Kemampuan analisis ini, sayangnya terkait dengan “kapasitas” literasi seseorang dan atau suatu komunitas masyarakat. Prof. Hamid seperti mengoreksi kemampuan dan kapasitas kita dalam “berliterasi” di tengah kehidupan serbasulit di masa pandemi ini. Itu salah satu poin penting yang perlu dicatat.

Di samping itu, berlomba-lombanya pejabat dan pengusaha untuk menjanjikan bonus, selain yang lazim diberikan negara selama

ini, dapat dinilai pula sebagai bentuk “aktualisasi diri” kelas atas dengan menumpang pada euforia masyarakat—yang mayoritas kelas bawah—yang merasa bangga akan capaian prestasi pebulutangkis Indonesia di level olimpiade tahun ini. Meskipun, bisa jadi rakyat yang senang itu, sedang kesulitan juga di tengah pandemi ini dan tak kurang—kurangnya butuh bantuan dari negara dan kaum berpunya.

### Konsumsi sSmbolis, Aktualisasi Diri, dan Sindrom *Crazy Rich*

Di media sosial, bahkan sebelum virus korona menyerang, memang banyak sekali konten yang mengangkat topik mengenai kehidupan orang—orang yang dibilang “gila kaya-nya”. Pelabelan *crazy rich* dan istilah “sultan” bertebaran di media sosial. Barangkali ini meniru judul novel yang sekaligus telah difilmkan: *Crazy Rich Asians* karya Kevin Kwan itu.

*Crazy rich* jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sepadan dengan: orang yang “gila” kayanya, atau orang dengan kekayaan yang gila. Atau, jangan—jangan—dengan sedikit bercanda—*crazy rich* ini dimaknai sebagai “orang kaya gila” (OKG), yang dibilang ‘*crazy*’ karena senang memamerkan barang mewah yang dimilikinya (*self-presentation*).

Di masa Orba memang dikenal istilah “OKB”, singkatan dari Orang Kaya Baru. Fenomena ini muncul akibat terjadinya “*booming*” minyak dan kayu di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatra. Beberapa juga menunjang perdagangan antarpulau sehingga melahirkan pengusaha—pengusaha dan pedagang baru yang kaya. Beberapa di antara mereka memang senang memamerkan kekayaan yang dimilikinya dengan membangun rumah besar dan bertingkat, memamerkan mobil mewah, dan perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin emas, terutama jika ada

pesta pernikahan atau arisan. Tapi, belum ada media sosial untuk beraktualisasi di masa Orde Baru. Itulah bedanya dengan sekarang.

Dewasa ini, di Indonesia, media sosial begitu masif. Konten dan liputan begitu mudah. Praktik memublikasi konsumsi “simbolis” pun makin menjadi-jadi. Dengan begitu, puncak piramida kebutuhan Abraham Maslow, yakni *self-actualization* (aktualisasi diri), terwadahi oleh adanya media sosial, yang dipermudah lagi dengan maraknya media daring berbasis internet. Jadilah orang-orang begitu mudah mengaktualisasikan dirinya melalui konten media sosial, khususnya melalui Facebook, Instagram, dan Youtube. Kelebihannya lagi, apa yang viral di media sosial, akan cepat diadopsi oleh media daring dan media massa untuk dipublikasi ulang (*re-post*). Atau, lazim pula dipublikasi ulang oleh pesohor alias orang terkenal seperti selebritas atau *host* acara terkenal yang membuat kanal sendiri di Youtube dan Instagram.

Para pesohor yang disebut selebritas dan *influencer* inilah yang kemudian memopulerkan istilah *crazy rich* dan “sultan”. Maka muncullah label “*crazy rich*” dan “sultan” Surabaya, “*crazy rich*” dan “sultan” Tanjung Priok, “*crazy rich*” dan “sultan” Medan dan masih banyak lagi “*crazy rich*” dan “sultan” lainnya. Cirinya kurang lebih sama, punya koleksi barang-barang mewah, dan bersedia dipamerkan olehnya sendiri maupun oleh media dan pesohor melalui media sosial dan media daring. Media massa biasanya belakangan ikut menyorot ketika sudah dianggap “viral”.

Fenomena “sultan” dan “*crazy rich syndrome*” ini sesungguhnya adalah fenomena budaya kelas atas. Fenomena *high class consumption*, meminjam istilah Jean Baudrillard. Konsumsi, dan bukan lagi semata produksi, merupakan faktor penentu konstruksi kelas secara kebudayaan di era serbamedia sekarang ini. Fenomena masyarakat pascamodern, kata Baudrillard, ditentukan oleh konsumsi barang-barang (komoditas) simbolis dalam mendefinisikan dan mengonstruksi kelas sosial. Kelas sosial ditentukan oleh konsumsi



simbolis. Dengan begitu, media sosial menjadi saluran untuk mengonstruksi kelas dengan cara memamerkan konsumsi simbolis seorang “*crazy rich*” atau yang biasa juga dibilang “sultan” itu. Terakhir ini, tidak hanya pamer barang simbolis, namun juga “bonus dan bantuan simbolis”.

## **Kapasitas Literasi dan Relevansi Budaya**

Secara konseptual, dari KBBI daring terdapat tiga definisi literasi: (1) *n* kemampuan menulis dan membaca; (2) *n* pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu: -- *computer*; (3) *n* kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Martin Suryajaya, penulis filsafat dan kritikus sastra, pada kanal pribadinya mendefinisikan literasi pada dua hal. Pertama, terkait dengan baca tulis, dalam arti kata bebas dari buta huruf. Kedua, literasi dimaknai sebagai praktik mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan.

Alwy Rachman, kolumnis literasi, akademisi ilmu budaya, dan budayawan, mendefinisikan literasi tak sekadar mengenai pemberantasan buta huruf semata sebagaimana lazim menjadi program pemerintah di masa Orde Baru hingga awal reformasi di Indonesia. “Literasi adalah aksi manusia dalam membaca kebudayaan sebagaimana manusia itu dibaca oleh kebudayaan,” seperti dikutip oleh Identitas Unhas dalam sebuah publikasinya.

Dengan begitu, dari definisi Alwy Rachman di atas, literasi terkait dengan kemampuan dan kapasitas seseorang dalam “membaca” keadaan lingkungan sekitarnya, dan dunia, serta kesiapan dan

kesigapan seseorang untuk dibaca, dikritik, dan dikoreksi oleh keadaan lingkungan dan dunia sekitarnya.

Soal kemampuan dibaca ini, bertalian dengan konsep terbaru dalam kajian budaya abad XXI, yakni relevansi. Seberapa relevankah seseorang dengan gerak zaman dan perubahan sosial budaya dan teknologi hari ini? Artinya, relevansi memvalidasi kapasitas seseorang di hadapan lingkungan dan dunia yang dijalaninya. Relevansi ini pun pada akhirnya terkait dengan kapasitas literasi seseorang maupun sebuah kelompok masyarakat.

Terkait relevansi budaya, menarik menghubungkannya dengan satu tema lazim dalam *cultural studies* (kajian budaya), yakni kontestasi budaya. Kontestasi budaya berpretensi menjadikan satu konstruksi dan artikulasi budaya dari satu kelompok merebut dominasi dan hegemoni akan apa dan siapa yang paling relevan dalam praktik budaya masyarakat dewasa ini. Budaya yang manakah yang dianggap dominan sehingga berhak mengatur apa dan siapa yang valid dan relevan?

## **Pencitraan (Self-Actualization) dan Masyarakat Tontonan (The Society of The Spectacle)**

Pencitraan atau aktualisasi diri di media adalah bagian dari masyarakat tontonan (*society of spectacle*), meminjam istilah Guy Debord (2000) dalam *The Society of The Spectacle*. Sementara itu, masyarakat tontonan ini tumbuh beriringan dengan lahirnya masyarakat konsumsi di Eropa pasca-Perang Dunia II sejak tahun 1950 dan 1960-an. Hadirnya masyarakat konsumsi ini, yang kemudian melahirkan masyarakat tontonan ditandai dengan semakin masifnya industri iklan dan media massa yang menopang industri hiburan. Simbol-simbol bertebaran sebagai upaya konstruksi simbolis

untuk mengidentifikasi kelas sosial dan afiliasi identitas kultural seseorang.

Fenomena di atas berlanjut hingga hari ini yang dinamai era pasca-fordisme. Di mana, konsumsi simbolis merupakan penggerak roda kapitalisme lanjut hari ini. Tanpa konsumsi simbolis, mustahil kapitalisme dapat selamat dalam beberapa kali krisis. Hal ini pulalah yang disoroti oleh mazhab Frankfurt dalam tesisnya mengenai industri budaya. Industri budaya adalah roda penggerak modal pada sistem kapitalisme lanjut sekaligus penyelamat kapitalisme dari krisis yang terjadi beberapa kali pasca-Perang Dunia II.

Kepenontonan, lebih didukung lagi oleh kehadiran media sosial dan media daring yang berbasis internet. Orang semakin mudah memamerkan diri dan barang-barang simbolis yang dimilikinya seperti mobil mewah, perhiasan mewah, rumah mewah, pakaian mewah, dan banyak lagi kemewahan lainnya, melalui media sosial dan media daring yang jumlahnya semakin marak. Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial dan media daring (*online*) inilah yang membuat siapa saja, termasuk kelas bawah, menengah, dan atas serta identitas budaya mana pun dapat mengakses dan menggunakannya. Kemudahan inilah yang akan meyuburkan kontestasi budaya lintas kelas dan lintas identitas kultural di media, khususnya media sosial dan media daring, yang lazim disebut media baru (*new media*) ini.

Dengan begitu, jadilah media baru (*new media*) ini sebagai arena kontestasi budaya (*cultural contestation*), baik yang berbasis kelas dan gender, maupun yang berbasis identitas kultural seperti etnik, agama, dan ras.

## Dari kontestasi Wacana ke Kontestasi Budaya

Antje Wiener (2017) dalam *A Theory of Contestation* menuliskan bahwa “kontestasi didefinisikan sebagai “praktik sosial [yang] menimbulkan keberatan terhadap isu-isu tertentu yang penting bagi orang banyak”; [...], kontestasi ... melibatkan berbagai praktik sosial yang secara diskursif mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap norma yang ada.”

Lebih lanjut, “sebagai praktik diskursif, kontestasi dapat diamati dengan mengacu pada ucapan/ujaran dan bahasa. Namun, seperti yang ditekankan oleh *A Theory of Contestation*, makna konsep tersebut melampaui definisi praktik sosial yang keberatan atau resisten terhadap norma yang ada”.

Rodenberg & Wagenaar (2018: 4) dalam *Cultural Contestation* menjabarkan bahwa “kontestasi budaya berkaitan dengan identitas yang diekspresikan dalam lanskap simbolis suatu masyarakat. Lanskap ini terdiri dari praktik budaya, ekspresi, dan aturan perundangan, serta objek budaya”. Karena lanskap tersebut memberikan pesan yang jelas tentang siapa yang termasuk dalam komunitas/kelompok (tertentu) dan siapa yang tidak. Hal tersebut mengungkapkan dan menegaskan politik identitas dan politik penerimaan serta politik penolakan. Ekspresi budaya sangat penting untuk identitas kelompok, dan segera setelah ekspresi ini menjadi ancaman bagi identitas kelompok lain, kontestasi yang kuat tak dapat dihindari.

Dengan demikian, kontestasi budaya berpretensi dalam menyeleksi siapa yang termasuk dalam suatu kelompok, dan siapa yang bukan. Proses identifikasi diri tersebut menciptakan eksklusi dan inklusi sehingga berpotensi melahirkan resistensi dari yang dieksklusi. Proses identifikasi diri ini juga yang melahirkan politik identitas, yang apabila melahirkan respons dan resistensi dari kelompok yang

dieksklusi, akan melahirkan kontestasi budaya antara kelompok yang mengeksklusi dan kelompok yang dieksklusi secara simbolis tadi.

Ekspresi dan objek budaya sesungguhnya tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri. Kelompok-kelompok dalam masyarakatlah yang menghubungkan makna dengan mereka (secara atributif dan asosiatif) dengan membangun dan mengartikulasikan narasinya. Dalam kasus kontestasi budaya, beberapa narasi ini saling bertentangan. Dan ketika itu terjadi, saling silang narasi dan wacana tak terhindarkan, dan tensi perdebatan dan kompetisi/persaingan narasi dalam bentuk wacana antarkelompok budaya menjadi terus berlangsung (Ross, 2009).

Dengan kata lain, kontestasi budaya adalah buah dari artikulasi dan konstruksi budaya yang berasosiasi dengan suatu kelompok dan individu, di mana konstruksi dan artikulasi tersebut saling mengoreksi dan berkompetisi dengan konstruksi dan artikulasi budaya lainnya. Dari situlah kontestasi budaya tercipta di mana sering kali melibatkan aspek kelas sosial, identitas kultural, gender, dan ideologi tertentu.

Sikap seorang penyair yang mempertentangkan pejabat yang begitu terbuka kepada peraih medali Olimpiade berikut janji-janji bonusnya dengan kondisi rakyat yang berjalan kaki dari Sumatra ke istana untuk menuntut keadilan, namun tidak dipedulikan sama sekali adalah bentuk sanggahan, interupsi, sekaligus kritik kepada pejabat negeri ini. Praktik itu pun adalah bentuk dari kontestasi wacana kelas bawah terhadap dominasi wacana kelas atas dan dapat dimaknai berujung pada kontestasi budaya berbasis kelas sosial. Bahwa rakyat kelas bawah yang sedang ditindas kurang direspons aspirasinya ketimbang kelas atas yang dijamu dan diberikan kemudahan.

Begitu pula publikasi melalui media sosial dan media daring dari salah satu organisasi sosial keagamaan di negeri ini menanggapi sumbangan 2T dari salah satu keluarga pengusaha. Hal tersebut dapat juga dilihat sebagai kontestasi wacana sebagai wujud

kontestasi budaya berbasis identitas kultural (kelompok sosial dan agama). Satunya berbasis individu/keluarga, satunya lagi berbasis kolektif/organisasi. Kebetulan lagi, terdapat warganet yang mengasosiasikan (calon) penyumbang 2T tersebut dengan agama dan ras tertentu. Jadilah isu agama dan ras, selain wacana kelas, menyertai kontestasi wacana di media sosial dan media daring ini. Bahwa selain penyumbang 2T– yang belum pasti bahkan berpotensi hoaks–tersebut, terdapat organisasi sosial keagamaan yang sudah menyumbang senilai triliunan rupiah, namun tidak perlu seheboh demikian.

Kontestasi wacana dan identitas kultural ini setidaknya telah menjadi konsumsi pembaca media sosial dan media daring di Indonesia. Tentunya, peran literasi dibutuhkan dalam menyikapi berlimpahnya wacana media dan kontestasi budaya di negeri ini beberapa waktu terakhir.

## **Pentingnya Literasi di Tengah Kontestasi Budaya**

Dari penjelasan–penjelasan konseptual di atas, mengenai literasi, masyarakat tontonan, dan kontestasi budaya, maka dapat dibaca bagaimana fenomena sumbangan 2T, sultan dan *crazy rich syndrome*, dan perlombaan pameran bonus Olimpiade di tengah pandemi, hadir lalu dikonsumsi melalui di media sosial, media daring, dan media massa hari ini.

Praktik pameran kemewahan dan kekayaan, berlomba mengumumkan sumbangan di tengah bencana dan pandemi, serta berlomba mengumumkan bonus kepada juara Olimpiade, dapat dibaca sebagai gejala *spectacle* (kepenontonan). Praktik–praktik seperti itu adalah bentuk tontonan yang disuguhkan oleh orang–orang kelas atas. Mereka seperti ingin mengatakan bahwa eksistensi

mereka sebagai kelas atas hadir di segala keadaan, dari dukacita maupun sukacita.

Secara psikologis, *crazy rich syndrome* ini dapat dibaca sebagai bentuk aktualisasi diri (*self-actualization*) dari masyarakat kelas atas, sebagai wujud tertinggi dari piramida kebutuhan Abraham Maslow. Apa yang dibutuhkan dari aktualisasi diri ini sesungguhnya adalah pengakuan diri (*self-recognition*). Itu jugalah yang dapat menjawab mengapa para pejabat dan pengusaha berlomba mengumumkan akan menyumbang dan menjanjikan bonus kepada korban pandemi dan peraih emas Olimpiade: kebutuhan akan aktualisasi dan pengakuan diri.

## **Lantas Bagaimana dengan Kontestasi Budaya?**

Praktik “pamer” harta, “pamer” bantuan, dan “pamer” bonus dari orang-orang kaya dan pejabat—elit/kelas atas—tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi dan konstruksi budaya kelompok kelas atas. Beberapa juga dihubungkan dengan ras dan agama seorang penyumbang, sehingga membuat makin ramai respons dan reaksi dari kelompok lainnya.

Sebut saja seorang penyair yang mengkritik perilaku pejabat yang langsung menelepon peraih medali di Olimpiade, sementara rakyat yang menuntut pencabutan HGU di sebuah hutan di Sumatra, tidak digubris sama sekali. Selain itu, ada postingan dan berita daring salah satu ormas keagamaan terbesar yang sudah menyumbang untuk penanganan Covid-19 di Indonesia senilai lebih satu triliun, namun tidak seheboh keluarga Akidi yang kepastiannya saja belum jelas. Kasus pertama hendak mengoreksi elite kelas atas yang tak mau ketinggalan menyambut pemenang Olimpiade berikut janji bonusnya. Sedangkan, kasus kedua hendak mengoreksi perilaku orang-orang

kaya (khususnya barangkali yang dinilai mengidap *crazy rich syndrome*) agar tak perlu terlalu menonjolkan bahkan terkesan “memamerkan” diri sebagai sosok dermawan secara individu dan keluarga, apalagi jika itu baru sekadar janji dan belum pasti adanya. Mengingat, ormas keagamaan terbesar tersebut memang melakukannya secara kolektif melalui organisasi dan terkesan tidak mengumumkannya secara berlebihan, bahkan bisa dikata minim publikasi dibanding “penyumbang 2T” yang sampai melibatkan Polda dan Pemprov setempat, serta diliput oleh media nasional.

Sahut–menyahut antarkelas sosial dan identitas kultural inilah yang melahirkan kontestasi budaya melalui narasi di media sosial, media daring, dan bisa jadi juga di media massa. Yang satu mengkonstruksi diri dan mengartikulasi praktik budayanya, yang lain menyahut dan mengoreksi serta melahirkan kompetisi naratif hingga menjadikan kontestasi wacana dan narasi yang tak terhindarkan pada konsumsi berita media kita.

Dengan demikian apa pentingnya literasi di tengah kontestasi budaya ini?

Di atas sudah dijelaskan bahwa, literasi mengacu pada kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, kegiatan mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan, hingga aksi membaca dan dibaca oleh kebudayaan. Dari beberapa cakupan definisi di atas, dapat diekstraksi bahwa literasi mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, literasi dalam hal kemampuan mengonsumsi dan mengolah informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini apa yang dituliskan oleh Hamid Awaludin di salah satu media daring di atas, adalah salah satu bentuknya. Sekaligus, menunjukkan wujud literasi kedua di bawah ini terkait kemampuan menganalisis dan



memproduksi pengetahuan. Prof. Hamid mengoreksi nalar publik kita, khususnya para pejabat publik, yang seolah mudah diperdaya oleh janji bantuan fantastis seperti yang sudah terjadi beberapa kali di masa lalu. Kita diajak untuk lebih mawas lagi cerdas dalam mengonsumsi dan mengolah informasi yang disajikan.

Kedua, literasi dalam hal membaca dan menganalisis keadaan serta memproduksi pengetahuan. Dengan maraknya konstruksi dan aktualisasi para orang kaya dalam memamerkan kemewahan dan kedermawanannya, apalagi di tengah bencana yang banyak orang membutuhkan bantuan, publik diharap mampu menganalisis secara rasional dan tetap kritis terhadap praktik dari sindrom orang kaya “gila” (*crazy rich*) seperti itu. Bagaimanapun, media sosial dan media daring memudahkan bagi para *crazy rich* dan pejabat untuk mempertontonkan kemewahan dan kedermawanannya, sekalipun itu bisa saja isapan jempol belaka sebagaimana tulisan kedua Hamid Awaludin mengenai sumbangan 2T ini yang berjudul *Bagaimana jika Janji Sumbangan Rp 2 Triliun Tidak Direalisasikan?* Tulisan demi tulisan Hamid Awaludin ini tak lain dan tak bukan adalah wujud literasi dalam hal membaca, menganalisis, lalu memproduksi pengetahuan agar kapasitas literasi publik Indonesia dapat meningkat sehingga tidak mudah percaya pada hal yang belum pasti kebenarannya, apatah lagi di masa–masa sulit seperti sekarang ini.

Ketiga, literasi dalam hal membaca, dibaca, dan dikoreksi oleh kebudayaan. Sikap kritis seorang penyair di atas yang mempertentangkan sikap pejabat yang sangat terbuka kepada peraih medali Olimpiade bahkan sampai dijanjikan bonus begitu banyak, namun tak bersimpati pada korban penggusuran dan sengketa lahan ber-HGU di Sumatra adalah bentuk literasi ketiga ini. Setidaknya para pejabat dan kaum mempunyai di negeri ini siap menerima kritikan dan koreksi terhadap apa yang dilakukannya. Selain itu, praktik para pengidap *crazy rich syndrome* yang gemar memamerkan kemewahan dan kedermawanannya di media sosial dan media daring dibaca lalu

dikoreksi oleh Prof. Hamid dan oleh salah satu ormas sosial keagamaan terbesar di negeri ini.

Darinya itu, literasi mengajarkan kita, pemerintah, dan para *crazy rich* (OKG) untuk bersiap dibaca, dikritik, dan dikoreksi perilakunya oleh kapasitas literasi publik. Sekaligus, literasi berperan menginterupsi kemudian mencegah praktik kultural kelas atas menjadi standar validasi dan indikator relevansi di kehidupan publik dewasa ini, khususnya mengenai konsumsi dan aktualisasi simbolis yang berpotensi menjadi dominan dan bersifat hegemonik. Pendeknya, literasi dapat mencegah konsumsi simbolis berlebihan menjalar ke lapisan bawah yang makan saja sudah susah di tengah pandemi hari ini.

## **Simpulan Reflektif**

Apa yang berkontestasi secara wacana sebagai wujud kontestasi budaya berbasis kelas sosial dan identitas kultural di media dewasa ini, di mana fenomena sumbangan 2T dan bonus Olimpiade sebagai contoh kasus berikut kontestasi wacana terhadapnya, dapat dikatakan membutuhkan peran literasi dalam membaca, mengolah informasi, menganalisis, hingga mengoreksi, dan memproduksi pengetahuan balik terhadapnya.

Kapasitas literasi menjadi kunci dalam membaca dan menilai kontestasi wacana dan narasi yang merupakan artikulasi dari kontestasi budaya. Baik kontestasi budaya berbasis kelas sosial, maupun yang berbasis identitas kultural.

Olehnya itu, di era serbamedia saat ini, literasi adalah sandingan penting dari kontestasi budaya melalui praktik wacana dan narasinya di ruang publik.

Karena, di dalam literasi yang kuat terdapat kontestasi budaya yang sehat.

# **SOSIAL BUDAYA**

# Pikiran Manusia Pascakolonial

**P**enajahan pikiran jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Begitu klaim utama para pemikir poskolonial, atau yang lazim juga kita sebut sebagai pemikir poskolonial. Manusia manusia pascakolonial akan merasa dirinya benar dan merdeka, padahal sesungguhnya masihlah berada pada bayang-bayang ‘mantan’ penjajahnya.

Manusia pascakolonial pun, lazimnya dijangkiti suatu penyakit psikologis yang disebut ‘inferior kompleks’. Ketidakpercayaan tingkat dewa. Sebut saja senangnya ber-Eropa-Eropa atau ber-Korea-Korea dibanding bertradisi-tradisi. Inferior kompleks adalah bentuk ketidakpercayaan pada diri dan kemampuan sendiri. Termasuk ketidakpercayaan kepada sesama anak bangsa sendiri, bisa jadi.

Penyakit yang paling mematikan lagi adalah ‘justifikasi diri’. Justifikasi diri terjadi dengan menganggap diri si bekas jajahan sebagaimana yang (pernah) ditempelkan oleh bekas/mantan penjajah.

‘Apalah kita ini, kita ini memang malas dasarnya, jadinya begini.’

‘Memang bubuhan Timur ini, sumbunya pendek, taunya berkelahi saja.’

Dan seterusnya, dan seterusnya.

Kenaifan seperti cap ‘malas’ dan ‘bersumbu pendek’ adalah konstruksi kolonial. Si bekas penjajah ini menempelkannya kepada ‘pribumi’ (*native*)/ penduduk asli, karena telah menguasai ‘struktur’ dan ‘sistem’ terlebih dahulu dengan senjata. Sehingga, potensi perlawanan selanjutnya dimatikan dengan proses pemapanan ‘label/cap’ pada si terjajah/jajahan. Jadilah si terjajah/bekas jajahan ini, sibuk dengan kesinisan sesamanya. Kita lebih sering mengenalnya pula dengan nama ‘politik belah bambu’.

‘*Divide et empera*’ (membelah untuk menguasai) yang lazim kita sebut politik belah bambu ini salah satunya dimudahkan dengan cap kali cap plus labeling kepada jajahan/pribumi. Manusia-manusia pascakolonial ini, hidup dengan label-label di jidatnya masing-masing. Belum lagi di pikiran kepalanya masing-masing, tertanam inferioritas dan kecurigaan kepada sesama.

Prasangka (*prejudice*) dan stereotip tertancap dalam-dalam di dada dan kepala. Jadilah manusia-manusia pascakolonial ini berjalan sempoyongan, tidak tegak, dan berat beban kehidupannya. Menjalani hidup penuh beban dan tidak tenang. Cara berpikir dipenuhi dengan anasir-anasir lama warisan mantan penjajah. Sulit untuk keluar darinya, apatah lagi ketika upaya ‘dekolonisasi pikiran’ tidak dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Satu lagi penyakit psikologis bekas jajahan adalah sifat oportunistis. “Menjilat ke atas, menindas ke bawah”. Cari aman sendiri, dan tidak peduli dengan nasib orang lain. Barangkali saking lamanya menderita, maka dendam dengan kemiskinan. Jadilah segala cara dihalalkan. Filosofi kepiting dalam baskom juga pas untuk ini. Ketika temannya sudah hendak sampai ke puncak, maka ditarikannya untuk turun ke bawah. Tidak senang melihat sesamanya berhasil.

Sesungguhnya sifat ini lahir karena kelangkaan kekayaan/sumber daya karena direbut penjajah. Maka, jalan keluarnya adalah rebut bersama kekayaan itu dari penjajah, bukan malah sikut-sikutan dengan sesama.

\*\*\*

Pikiran manusia pascakolonial mantan jajahan ini mesti dibersihkan dari 'inferioritas, prasangka, stereotip, dan sikap oportunist'. Ketiganya adalah bikinan mantan penjajah yang masih membayangi sekarang ini. Jika ketiganya sudah bersih, cara berpikir 'naif' dengan menyalahkan orang, tanpa membidik struktur, sistem, regulasi, dan kebijakan juga harus dibereskan.

Berhentilah menyalahkan orang yang sudah terang benderang dikejang struktur dan sistem. Bebaskan mereka dari jebakan itu jika tak ingin cap-cap naif itu hilang. Selain menyesak hati, juga menunjukkan kedangkalan berpikir. Bergelar sarjana sampai doktor dan profesor sekalipun, lulusan luar negeri atau kampus biasa, kenaifan berpikir adalah penyakit lintas arena. Tidak peduli siapa dia. Obatnya hanya cara berpikir kritis kata Paulo Freire dan eksponen mazhab Frankfurt.

Pada akhirnya, menjadi manusia-manusia pascakolonial memang berat. Di bagian ini, Dilan dan Milea salah besar, bahkan tidak ada apa-apanya.

Manusia pascakolonial harus membereskan dua hal. Pertama, dirinya yang ditancapi anasir-anasir kolonial berupa inferioritas, prasangka, stereotip, dan sikap oportunist. Kedua, struktur dan sistem, regulasi dan kebijakan yang menguasai kekayaan/sumber daya. Struktur dan sistem menjadi superego. Diri dan superego berupa struktur dan sistem ini menjadi penentu kesadaran dan sifat-sifat manusia pascakolonial di atas.

Inferioritas, prasangka, stereotip, dan sikap oportunistis lahir karena sumber daya dikuasai penjajah. Manusia-manusia pascakolonial ini tak punya apa-apa. Struktur dan sistem sosial menjadikannya kaum papa di negeri sendiri. Dengan demikian, kesadaran dan kesabaran penting, akan tetapi kesabaran dan kesadaran itu dalam rangka menghilangkan penyakit-penyakit psikologis tersebut, plus mengarahkan sumber masalah kepada struktur dan sistem dominan yang membuat kekayaan dan sumber daya yang melimpah tidak terbagi secara adil dan merata kepada masyarakat banyak, kepada manusia-manusia pascakolonial.

Samarinda, 3 Oktober 2019

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *makassarterkini.id*



## Kaum Milenial dan Kekerasan

**B**eberapa hari terakhir kita menyaksikan tindakan aparat kepolisian terhadap demonstran mahasiswa di aksi September 2019 ini. Kemarin (25/9) kelompok pelajar SMA dan sederajat, ada yang menyebut SMK dan atau STM, dalam beberapa video yang beredar terlihat menjadikan polisi sebagai bulan-bulanan.

Polisi yang awalnya garang dan percaya diri melakukan kekerasan dibuat lari terbirit-birit. Beberapa yang sempat dijangkau massa pelajar ini tak luput dari keroyokan. Persis seperti apa yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa sehari sebelumnya, di beberapa kota—yang sempat terlihat di video media sosial adalah Jakarta, Makassar, dan Medan.

\*\*\*

Apa yang bisa dimaknai dari peristiwa ini? Pelajar pelajar SMA dan SMK ini—ada pula yang menyebutnya sebagai STM—seperti ‘gerah’ dengan keadaan. Mereka bisa jadi terlebih gerahnya menyaksikan kakak-kakaknya yang mahasiswa ‘dianiaya’ oleh polisi

ketika menyuarakan perjuangannya. Bisa jadi, sikap 'solider' ini lahir karena empati terhadap sesama generasi milenial.

*'Sialan ini polisi, gak punya hati. Mentang-mentang punya senjata, laras, sama pentungan seenaknya saja mukul, nendang sama nembak. Besok turun yuk teman-teman, kita bantu kakak-kakak kita yang dihajar polisi'. Kira-kira begitu perasaan dan pikiran yang ada di benak dan hati pelajar-pelajar itu.*

Polisi seperti '*public enemy*' anak muda (mahasiswa dan pelajar SMA sederajat). Kenapa? Bisa jadi karena sikap semena-mena dan tindakan tidak bersahabatnya sebagai pemegang institusi kekerasan di negeri ini (*Repressive State Apparatus*). Sebagai pemilih otoritas kekerasan, polisi tak jarang terlibat tindakan kekerasan yang oleh 'perasaan publik', termasuk oleh kaum milenial, sudah kelewat batas dan tidak manusiawi. Belum lagi yang tertangkap kamera memasuki rumah ibadah dengan tetap menggunakan sepatu laras. Sudah begitu, tidak ada permohonan maaf dan sanksi institusional yang bisa mengobati luka dari perasaan publik yang telanjur geram.

\*\*\*

Karakter kaum milenial yang bisa dengan mudah mengakses informasi melalui *gadget* membuat penggumpalan kejengkelan dengan polisi dan institusi kepolisian kian mengental. Tabungan/akumulasi kejengkelan yang mengental inilah, bisa jadi membuat pelajar STM kemarin menumpahkan amarahnya kepada polisi yang dijumpainya. Baik polisi yang ditemui di jalan, maupun yang mereka hadapi di gedung DPR.

Jebakan kekerasan ini bisa dilihat sebagai hal yang awalnya diproduksi oleh negara. Dalam hal ini oleh institusi kepolisian. Bagaimanapun, polisi sebagai 'pemilik otoritas kekerasan' negara difasilitasi dengan senjata dan pentungan. Begitu otoritas tersebut

‘dianggap disalahgunakan’ oleh publik, terlebih jika dinilai berlebihan kepada generasi milenial, maka akan begitu cepat tersebar. Solidaritas pun lahir dan menyebar begitu cepat. Jadilah polisi dikecam dan dibalas tindakan kekerasannya.

\*\*\*

Tindakan kekerasan negara akhirnya ‘terpaksa’ dibalas pula dengan kekerasan. Kekerasan demi kekerasan oleh negara tersebut, akhirnya kemudian dibalas ‘semampunya’ oleh anak muda pelajar STM sebagai bentuk solidaritas terhadap kakak-kakak mahasiswanya yang direpresi polisi. Balas membalas melalui kekerasan akhirnya menjebak polisi dan anak muda ini dalam pusaran konflik yang entah apa dan kapan ujungnya.

Polisi sebagai institusi negara sepantasnya bisa menahan diri dan tidak begitu represif kepada anak muda milenial yang sedang surplus di negeri ini. Hanya jebakan kekerasan (*violence trap*) dan lingkaran kekerasan (*circle of violence*) yang akan tercipta jika polisi terus menerus tidak mengubah pola pengendaliannya.

Karena, sepertinya, di negara yang tidak ada oposisi permanen di rezim Jokowi kali ini, di mana Presiden dan DPR sedang mesramesranya, mereka pada akhirnya berhadapan langsung dengan rakyat banyak. Mereka (Pemerintah dan DPR) berhadapan langsung dengan kaum milenial sebagai ‘*avant garde*’ (garda terdepan) dari rakyat banyak Indonesia hari ini.

Jangan sampai, di tengah ‘kegerahan publik’ hari ini berlaku prinsip “Apa yang penguasa jual, kita (rakyat) beli”. Kalau sudah begitu, kekerasan demi kekerasan akan terus jadi pemandangan dari proses bertumbuhnya generasi milenial Indonesia di era surplus demografi-nya tahun 2019 ini. Jika sudah demikian, siapakah yang harus peduli?

Presiden? DPR? Kampus? KPK?

Atau polisi?

Mari menjawabnya bersama.

Samarinda, 26-9-2019

# Kenaifan Pascakolonial hingga Bencana Milenial

**K**esadaran naif manusia pascakolonial penting menjadi perhatian serius di ranah kebudayaan. Jika tidak, perihal ini bisa membikin repot 3/4 bagian belahan bumi. Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negeri pascakolonial di mana manusia-manusianya tak sedikit yang masih terjebak pada 'kesadaran naif'.

Cara berpikir hasil dari kesadaran ini (naif) sering dilekatkan dengan paradigma liberal. Paradigma liberal dalam hal melihat fenomena, dikenal cenderung memandang peran manusia secara determinan. Manusalah pusat segalanya. Faktor di luar manusia, dinilai tidak terlalu signifikan.

Jika Anda 'bodoh', ya itu karena Anda 'malas' belajar. Bukan karena fasilitas dan akses belajar Anda yang bermasalah. Perihal itu masuk daftar kesekian, jika pun teringat untuk dimasukkan. Jika ras dan etnik A banyak yang kaya raya, itu karena mereka rajin dan ulet, sementara ras dan etnik B sampai X 'malas' berusaha dan kerjanya 'berkelahi' saja dengan sesamanya. Bukan karena struktur dan sistem

yang dibangun menguntungkan ras dan etnik A dan tidak mengakomodasi B hingga X, dan seterusnya. Begitu kira-kira ilustrasi berpikirnya.

Perihal-perihal di atas sesungguhnya telah dikoreksi oleh Syed Hussein Alatas dalam karya monumentalnya '*The Myth of Lazy Native*' (Mitos Pribumi Malas) pada tahun 1977. S.H. Alatas, Profesor Kajian Melayu di NUS Singapura itu dengan gamblang mengkritik produksi budaya kolonial setahun sebelum Prof. Edward Wadie Said di Columbia University, Amerika sana menelurkan karya paling monumentalnya abad lalu itu, '*Orientalism*' di tahun 1978.

Kedua karya ini bisa dibilang menjadi tonggak pemikiran para pemikir bekas jajahan dalam upaya melakukan '*clearing*' terhadap anasir-anasir kenaifan kolonial dalam menjustifikasi dan melabeli pribumi bekas jajahan. Jika Alatas mengambil *setting* Asia Tenggara sebagai lokus kajian, Edward Said menggunakan Arab, Asia Barat, sebagai wilayah studi karya monumentalnya tersebut. Dua-duanya bisa dikata super sekali dalam membongkar dan mengkritik keras 'kenaifan pascakolonial' para bekas penjajah (*ex. colonizer*) di Asia tersebut.

\*\*\*

Indonesia bagi para ahli disebut sedang menghadapi surplus demografi. Sebuah keadaan yang memaksakan dua skenario. Pertama, *benefit demography* (keuntungan demografi). Kedua, *disaster demography* (bencana demografi). Sementara itu, demografi yang sedang surplus ini lazim disebut sebagai generasi milenial.

Disebut sebagai generasi milenial, karena kehidupannya dirawat dan diasupi oleh teknologi informasi. Dunia digital adalah dunianya. Game online dan media sosial adalah habitusnya. *Gadget* adalah pasangan intimnya. Sumber nilainya bukan lagi orang tua, guru

mengaji, ustaz, dan bapak pendeta (pemuka agama), apalagi guru dan dosennya. Sumber nilai paling utama adalah *Uncle Google* dan *Aunt YouTube* serta *Bro and Sist social media*. Di *gadget*, semua kehidupan berpusat dan berputar.

Sandang, pangan, dan 'colokan' adalah kebutuhan dasar generasi milenial. Akan tetapi, ekonomi tetap jadi tumpuan. Generasi milenial tetap diharapkan dan ingin produktif. Berpenghasilan dan membangun hidup sesuai zamannya. Hanya saja bagaimana peluang kerja dan produktivitasnya di negeri pascakolonial seperti Indonesia?

Sampai tahun 2019, ekonomi Indonesia terjebak di angka pertumbuhan lima koma sekian persen. Sangat rendah. Subsidi banyak dicabut, harga melejit naik. Pengangguran tinggi, dan angka serapan kerja rendah. Para ahli menyebut Indonesia masuk dalam '*low-middle income trap country*'. Jebakan negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Miris sekali di tengah berlimpahnya angkatan kerja milenial.

Neoliberalisme sering disematkan sebagai biang dari keterjebakan negara-negara pascakolonial ini. Tak terkecuali di Indonesia. Salah siapa? Rakyatnya? Pemerintahnya? Tepatnya kekeliruan fatal kebijakan ekonomi pemerintahnya yang mengambil jalan di '*track*' sistem neoliberal. Kita sedang dibawa ke dalam jebakan neolib.

Olehnya, kaum milenial akhirnya meradang. Susah kerja, ekonomi melemah. Milenial Indonesia sedang menghadapi jebakan ekonomi neoliberal di negeri pascakolonial yang jika tak ada putar haluan kebijakan ekonomi, tak berlebihan jika kita akan menyaksikan sebuah bencana demografi. Bencana milenial di negeri pascakolonial, Indonesia 2045, ketika angkatan-angkatan kerja produktif ini menganggur tak bisa kerja sementara kekayaan negerinya beterbangan keluar dan menumpuk di segelintir tangan konglomerat.

\*\*\*

Aksi September tahun ini adalah penanda milenial Indonesia dalam menjawab keraguannya selama ini. Bisa dikata, pantas saja aksi September 2019 ini para milenial membanjiri lautan jalanan. Generasi ini bisa jadi cemas akan masa depannya, dan frustrasi melihat ulah generasi tua yang makin tak menjanjikan 'jaminan' masa depan cerah menyambut era bonus demografi.

Jebakan negara berpenghasilan menengah rendah (*'low-middle income state trap'*) mau tidak mau berdampak para generasi milenial Indonesia yang sedang surplus di negeri ini. Sementara itu, neoliberalisme makin menguat. Kenaifan pascakolonial tak kunjung berhenti. Kondisi ini berpotensi menghasilkan frustrasi massal bagi generasi milenial jika tak berusaha sendiri keluar dari jebakan itu. Kita sepantasnya membaca demikian peristiwa September yang menewaskan Randi dan Yusuf di Kendari, dan juga seorang adik STM-nya di Jakarta sana.

Generasi tua dengan 'poetika politik' lamanya yang selain sarat 'anasir kolonial', juga masih dijangkiti 'anasir-anasir Orba'. Generasi tua dengan poetika politik tua-nya di negeri ini sepertinya sudah perlu gantung jaket dan memberikan ruang kepada poetika politik muda dan baru yang lebih segar nan bebas dari anasir kolonial dan anasir-anasir orba (Orde Baru ala rezim Soeharto).

Bangsa dan negeri ini harus sembuh dan bebas dari kedua anasir itu.

Tentunya, jika bangsa dan negeri ini tak ingin melihat generasi milenialnya semakin meradang. Beruntung jika hal itu kembali terjadi, tidak ditanggapi dan dihadapi dengan 'kenaifan pascakolonial' oleh pemilik 'poetika politik tua' di negeri ini.



“Generasi tua, pliss jangan lebay, tak usah terlalu nyinyir.”

“Kami masih lama, masa anda su mau lewat, sebentar lagi.”

Kira kita begitu percakapan generasi milenial yang hendak dituturkan kepada pemilik ‘poetika politik tua’ di negeri ini, yang kebetulan sedang (masih hendak) berkuasa.

\*\*\*

Kenaifan pascakolonial hingga jebakan bencana milenial sangat penting dilihat secara reflektif. Tujuannya, untuk memandang dan mengukur optimisme dalam menatap apa yang sering disanjung begitu romantis nan bias dewasa ini, ‘bonus demografi’ yang melibatkan kaum milenial, di negeri pascakolonial ini.

Semoga saja tak berbuah bencana.

Samarinda, 4 Oktober 2019

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *makassarterkini.id*

# Memaknai Slogan Hari Jadi Bone ke-691

*Ya tutu ya upe, ya capa ya cilaka.*

(Siapa berhati-hati akan beruntung, siapa teledor akan celaka)

**S**epintas, makna dan pesan slogan ini baik. Tapi, sayangnya baik saja tidak cukup. Slogan di atas lemah di hadapan ilmu bahasa. Apatah lagi ilmu sastra. Lazim dipahami bahwa ilmu bahasa dan ilmu sastra merupakan bagian dari rumpun ilmu-ilmu budaya. Tulisan ini berupaya menggunakan cara pandang keilmuan tersebut untuk membedah slogan pada Hari Jadi Bone ke-691 di atas.

Jika diartikan secara bebas, atau lazim disebut sebagai parafrase, “*ya tutu ya Upe, ya capa ya cilaka*” berarti “*siapa berhati-hati dialah yang beruntung, siapa teledor dialah yang celaka*”. Sekali lagi, sepintas tidak ada masalah pada kalimat di atas. Namun, di hadapan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bahasa dan kajian budaya<sup>5</sup>,

---

<sup>5</sup> Lebih spesifik lagi, dalam linguistik (ilmu bahasa) dan kajian budaya dikenal pendekatan semantik (ilmu makna), pragmatik (ilmu makna dari ujaran), psikolinguistik

sesungguhnya slogan yang disebarluaskan secara masif di media sosial tersebut mengandung ‘masalah’.

## Persoalan Makna dan Implikasi Psikologis

Secara semantis, terdapat makna ‘negatif’ yang melekat pada kata ‘cilaka’, khususnya pada kalimat “*ya capa ya cilaka*”. Makna siapa yang berhati-hati akan beruntung dan siapa yang ‘teledor’ akan celaka adalah “*jika ingin beruntung atau selamat, maka berhati-hatilah, karena jika salah langkah (teledor), maka akan celaka*”. Maksud dari pesan di atas bisa dua hal. Pertama adalah pengingat, bahkan peringatan. Kedua, bisa dimaknai sebagai ‘ancaman’ atau upaya lepas tangan.

Sesungguhnya, kepada siapakah pesan ini ditujukan? Atau dari mana dan untuk siapakah pesan ini hadir dan dihadirkan? Apakah dari penguasa kepada rakyat, atau sebaliknya dari rakyat kepada penguasa? Atau dari rakyat ke sesama rakyat atau dari elite ke sesama elite? Atau, adakah yang lain? Soal dari mana pesan ini berasal dan ditujukan untuk siapa menjadi penting untuk melihat ‘relasi’ (hubungan) pemberi dan penerima pesan berikut implikasi (efek) yang diinginkan oleh penutur (pembuat pesan/ *encoder*) kepada penerima pesan (*decoder*).

Dalam kacamata pragmatik, implikasi dari sebuah pesan melalui bahasa dari pemberi pesan akan memberikan ‘efek’ kepada penerima pesan. Olehnya, sebuah pesan idealnya bertujuan memberikan implikasi sesuai dengan tujuan penutur (*encoder*). Pertanyaannya adalah, pesan yang ingin disampaikan dari slogan “*ya tutu ya upe, ya*

---

(psikologi bahasa), sosiolinguistik (sosiologi bahasa), dan analisis wacana. Sebuah produk bahasa dapat dibedah menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Termasuk sebuah slogan dalam poster.

*capa ya cilaka*” itu apa? Apakah ini berlaku secara universal (umum), atau ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan? Jika ya, maka implikasi apa yang diinginkan? Apakah rakyat yang memberikan kritik (*mapputane*) diminta untuk berhati-hati dan tidak sampai dianggap ‘teledor’? Atau justru pemerintah yang diminta demikian? Ataukah ada makna dan maksud lain dari pesan tersebut?

Sekali lagi, ini tergantung siapa yang membuat dan ditujukan kepada siapa? Atau, bisa jadi haluan berganti menjadi pesan diproduksi oleh siapa yang menyebarkan melalui poster-poster di media sosial kepada pembaca-pembacanya. Bagaimanapun, penting diketahui, bahwa praktik pemaknaan bersifat cair dan dinamis.

Akan tetapi, lazimnya, sebuah slogan yang mengandung pesan kebudayaan. Secara psikolinguistik (psikologi bahasa) sebuah pesan (*message*) sepatutnya bertujuan mendidik dan membangun motivasi. Dengan demikian, kalimat yang perlu dibangun adalah kalimat positif dan berimplikasi membangun motivasi dan inspirasi kepada penerima pesan (*decoder*). Jika nada yang dihasilkan kalimat pada slogan di atas justru mengandung unsur dan implikasi peringatan, bahkan ‘ancaman’, maka secara psikologis, slogan tersebut kurang baik secara implikatif.

## Teks dan Konteks Wacana

Dalam analisis wacana (*discourse analysis*) dikenal hubungan antara teks, konteks, dan praktik sosial. Dari teks slogan “*ya tutu ya upe, ya capa ya cilaka*”, dapat dibaca bahwa “ada mentalistik lepas tangan yang tertanam di pemimpin Bone (jika konteksnya produsen makna adalah pihak Pemda). Seolah-olah slogan tersebut bermaksud mengatakan, “rezeki dan pekerjaan itu dicari masing masing, silakan selamatkan diri masing-masing”. Begitu pandangan seorang peneliti bahasa yang sempat penulis tanya perihal ini. Pandangan ini bisa

lahir jika membedah teks slogan di atas dari kacamata analisis wacana.

Jika ditelisik lebih jauh dan lebih mendalam lagi, secara wacana, pada 'struktur batin' teks bahasa pada kalimat di atas<sup>6</sup>, "tampaknya masih ada perang tersembunyi di benak penulis slogan itu". Artinya, jika ditelisik lebih jauh, ada pesan (tersembunyi) bahkan bernada peringatan (lebih jauh lagi bisa dinilai sebagai ancaman) di balik kalimat slogan Hari Jadi Bone ke-691 ini. Salah satu yang paling gamblang adalah pesan literal yang jika dibalik maka akan bermakna "jika tidak ingin celaka, maka berhati-hatilah" (*kuteaki macilaka, akkaritutuki*). Implikasi dari makna pesan ini bercabang. Bisa dimaknai positif, bisa juga negatif. Tergantung konteksnya.

Nah, soal konteks ini yang menarik. Apakah yang sedang terjadi di Bone hari ini di peringatan hari jadinya yang ke-691? Tentunya, perihal ini, yang paling tahu adalah Tuhan YME, pemimpin Bone dan rakyat Bone itu sendiri. Apakah kira-kira 'konteks' dari slogan tersebut?

Jika boleh, mari kita mengira-ngira. Apakah ada hubungannya dengan peristiwa dan situasi sosial ekonomi, budaya, dan politik di Tana Bone akhir-akhir ini, atau setidaknya satu tahun terakhir? Wallahualam.

Ataukah, konteksnya adalah agenda setahun dua tahun ke depan yang akan dihelat di kabupaten yang memiliki slogan "Bone Beradat" tersebut? Hanya Tuhan dan Orang Bone kiranya yang bisa tahu secara pasti. Memahami dan memastikan soal konteks wacana slogan di atas butuh penyelidikan dan pengkajian yang lebih mendalam. Namun, menganalisa dan mengira-ngira, penulis pikir tak ada salahnya pula. Apa konteks wacana dari slogan tersebut? Mari kita pikirkan dan diskusikan bersama.

---

<sup>6</sup> Dalam ilmu bahasa dikenal struktur permukaan (*surface structure*) dan struktur batin (*deep structure*) bahasa.

Yang pasti, penyebaran poster hari jadi Bone tersebut berikut slogan yang nyaris seragam itu merupakan sebuah **praktik sosial**. Penyebaran slogan melalui poster-poster di media sosial yang merupakan praktik berwacana ini jamak dilakukan oleh warga Bone maupun yang mendaku diri berdarah Bone, meski barangkali tak lagi ber-KTP Bone. Atau, bisa jadi, ada yang turut meramaikan saja tanpa ada relasi ke-Bone-annya.

Dalam amatan penulis, setidaknya terdapat unsur ASN Bone, mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum menggunakan poster bergambar dirinya berikut ucapan Hari Jadi Bone ke-691 dengan slogan “*ya tutu ya upe , ya capa ya cilaka*” ini. Dengan demikian, bisa dikata, penyebaran praktik wacana slogan tersebut telah berlangsung secara masif (barangkali juga terlaksana secara terstruktur dan sistematis jika menjadi ‘instruksi’ atau imbauan pemerintah daerah kepada instansi-instansi berikut aparatnya hingga ke tingkatan terbawah). Artinya, secara praktik berkebudayaan, orang Bone bisa dinilai merayakan slogan ini dengan penuh semangat dan gegap gempita.

Perihal di atas, penulis sempat menanyakan kepada kolega<sup>7</sup> di universitas yang konsentrasi di bidang kajian bahasa. Tanggapannya seperti ini: secara sosiologis dan konteks wacana secara luas maka, “Dan jika dihubungkan dengan kondisi hukum dan keadilan di Indonesia saat ini, dengan rapuhnya masyarakat di hadapan UU ITE, diharapkan selalu berhati-hati berbicara, berkomentar, dan berbuat, karena itu tidak bisa dijamin keselamatannya (oleh pemerintah daerah)”. Tentu konteks dari pandangan ini adalah jika yang memproduksi teks slogan tersebut adalah pemerintah daerah atau disetujui oleh pemerintah daerah.

Selain itu, jika slogan itu diproduksi oleh orang banyak (*to maegae*) dan ditujukan kepada pemerintah daerah dan atau ke

---

<sup>7</sup> Bidang kajian dan keahlian narasumber penulis adalah linguistik (ilmu bahasa), khususnya psikolinguistik dan sosiolinguistik.

sesama maka praktik pemaknaannya akan berbeda lagi. Satu hal yang pasti, bahwa slogan tersebut berimplikasi beragam (multiinterpretasi) dan bisa dimaknai secara merdeka oleh publik. Dan secara tekstual dan kontekstual berpotensi dimaknai secara ‘negatif’.

## Refleksi dan Kritik Kebudayaan

Sebagai refleksi sekaligus kritik membangun, penting disampaikan bahwa sebagai hajatan resmi dan merupakan publikasi media (baik di media sosial maupun media massa), maka perlu penciptaan pesan dan slogan yang mengandung makna positif dan berimplikasi memotivasi serta menginspirasi *to maega/to tebbe’na* Tana Bone. Hal-hal yang berpotensi melahirkan multi-tafsir, misinterpretasi apalagi pemaknaan negatif sebaiknya dihindari. Ini demi kebaikan bersama sesama To-Bone dan publik secara luas.

Dengan demikian, perlulah kiranya suatu pekerjaan diserahkan kepada ahlinya. *Right man on the right place* (orang tepat di posisi yang tepat), kata orang Inggris. Atau minimal pelibatan unsur bersama dari ahli bahasa dan budaya, tokoh (budayawan), dan praktisi di lapangan.

Apalagi Bone yang dikenal dengan slogan “Bone Beradat” dan sudah memiliki instansi khusus yang menangani urusan kebudayaan—Dinas Kebudayaan perlu menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di bidang kebudayaan. Ditambah lagi, dibanyak Universitas, orang-orang Bone tak sedikit yang menjadi ahli dan akademisi di bidang bahasa dan budaya. Ke depan, sinergi dan kolaborasi perlu semakin ditingkatkan di hari-hari depan dalam rangka menghindari kekeliruan kecil yang bisa berdampak besar bagi hidup dan berkembangnya pemajuan kebudayaan di Tana Bone.

Demikian, semoga bermanfaat.

Selamat Hari Jadi Bone ke-691

*“Tellabu Essoe Ritengngana Pitarae”*

*Salama'ki tafada Salama'.*

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasi oleh *enews.com* dan *lintasfocus.com* beserta beberapa media online lainnya dalam bentuk rilis.



## Jokowi, Papua, dan Kalimantan

**P**apua dan Kalimantan adalah dua pulau terbesar di Indonesia. Tak ada seorang pun yang menyangkal kalau Papua dan Kalimantan adalah pulau yang kaya. Terlebih Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet dan pendukung setianya tentunya. Mereka pasti paham akan itu dan tidak bisa menyangkal kandungan kekayaan kedua pulau ini.

Papua dan Kalimantan kaya akan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan keanekaragaman hayati. Kekayaan linguistik berikut wujud dan unsur-unsur budaya yang menyertainya di kedua pulau ini ratusan bahkan bisa jadi ribuan jumlahnya. Pertambangan, hasil hutan, dan perkebunan menghasilkan banyak uang di pulau ini. Begitu pula keanekaragaman hayati, baik di hutan, sungai, dan laut, tak terhitung jumlahnya. Intinya, Papua dan Kalimantan kaya dan beragam dibanding pulau-pulau lain di Indonesia.

Papua dan Kalimantan didatangi oleh orang-orang dari beragam identitas. Dari kelas bawah sampai kelas atas, dari etnik A sampai etnik Z di negeri ini. Papua dan Kalimantan ibarat gula, para pendatang seperti semut yang tak henti-hentinya terus berdatangan.

Dengan demikian, jadilah Papua dan Kalimantan sebagai pulau dengan tingkat migrasi yang tinggi. Target para migran antarpulau di Indonesia. Para ahli menyebutnya sebagai migrasi internal (*internal migration*). Bahkan, di banyak tempat di kedua pulau ini, komposisi demografi antara migran dan penduduk lokal sudah tidak berimbang. Dalam artian bahasa sehari-harinya, 'pendatang sudah lebih banyak daripada penduduk asli'. Komposisi demografi seperti ini tentunya harus memperhatikan 'formasi kultural'-nya pula. Karena bagaimanapun, menurut Riwanto Tirtosudarmo dalam bukunya '*Mencari Indonesia*', migrasi manusia akan disertai pula oleh migrasi budaya-nya. Jika sudah demikian, formasi masyarakat 'multikultur' akan tercipta.

\*\*\*

Namun, apa yang kita saksikan dari kedua pulau di atas akhir-akhir ini?

Kekerasan di Papua dan kebakaran di Kalimantan adalah pemandangan ramai di media. Media sosial dan media massa memberi kita informasi akan 'kekacauan' di kedua pulau ini. Entah mengapa, kesan di publik mengisyaratkan bahwa, Presiden Joko Widodo terlihat kewalahan mengatasinya.

Secara politik, Jokowi sepatutnya berutang pada kedua pulau ini. Di setiap Pilpres, Jokowi bisa dikatakan menang secara kuantitatif di Kalimantan dan Papua. Dengan kepercayaan rakyat Papua dan Kalimantan tersebut, seharusnya Jokowi dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan yang tengah 'menyusahkan' orang Papua dan Kalimantan.

Ada beberapa hal yang penting ditangani secara khusus dan serius oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua. Kedua, ketimpangan akses dan kemajuan

antar-etnik di Kalimantan. Ketiga, ketertinggalan dan ketersingkirkan di sektor ekonomi dan politik bagi Orang Asli Papua (OAP) dan Orang Asli Kalimantan (OAK). Kelima, keselamatan lingkungan dan kearifan lokal OAP dan OAK yang harus mendapat tempat terdepan. Bukan hanya secara inklusif, tapi bisa dibayangkan sudah harus menjadi arus utama. Keenam, problem multikultural, kohesi sosial, dan hubungan antar-etnik dan antar-agama. Serta ketujuh, yakni kesenjangan ekonomi antarkelas sosial yang semakin menganga akibat kebijakan pencabutan subsidi yang kian menjadi-jadi.

Ketujuh perihal mendesak di atas sepatutnya menjadi prioritas Jokowi di kedua pulau ini. Tak mengapa Jokowi menerapkan '*affirmative policy*' alias kebijakan khusus kepada kedua pulau ini. Tak salah pula jika Presiden Jokowi mengadopsi saran Dr. Rizal Ramli soal bagi hasil sumber daya alam bagi daerah dan rakyat setempat secara langsung di daerah yang kaya SDA. Termasuk Papua dan Kalimantan, tentunya.

\*\*\*

Kepada Presiden Jokowi, di kedua pulau ini, kaum milenialnya juga sedang bertumbuh. Jangan buat mereka frustrasi tak ada kerja dan hidup susah. Sementara, di depan matanya miliaran hingga triliunan kekayaan alam nenek moyangnya diangkut setiap hari, setiap detik.

Pak Jokowi, asap dan rasisme, kebakaran dan kekerasan hanya dua titik di puncak gunung es di kedua pulau ini. Semakin ke dalam, semakin kompleks persoalan, tolong jangan menggampangkan persoalan. Tolong beritahu bawahan, *fans* setia, dan 'buzzer' Anda (jika ada) untuk tidak sembarang berkomentar perihal masalah di kedua pulau ini. Jangan sampai hanya melukai perasaan saudara-saudara kami/kita yang memang terkenal pendiam, sabar, dan gigih

bertahan hidup tanpa banyak mengeluh dibanding orang-orang kota dan di Jakarta sana.

Pak Jokowi, di Papua-Kalimantan, tanda tanya itu butuh jawaban. Jawaban yang benar, konkret dan menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan buat mereka/kami menyesal memangkukan kepentingan kepada Anda. Karena, menyesal pun tak ada gunanya sekarang. Begitu kiranya, Bapak Presiden, Pak Jokowi!

Anggana-Samarinda, 1 September 2019



**PENDIDIKAN  
DAN  
PEMBUDAYAAN**

## Cendekia di Luar Kampus

**T**ulisan ini adalah refleksi atas perjumpaan dengan beberapa cerdas pandai yang memilih berkarier di luar kampus. Menjadi cerdas dan terdidik (*being educated*) ternyata tak menjamin seseorang mau dan berkesempatan untuk menjadi akademisi di perguruan tinggi. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan tinggi kita di Indonesia.

Semenjak menjadi dosen lima tahun terakhir—baik sebagai dosen ‘sukarela’, dosen kontrak, maupun sebagai dosen CPNS— saya banyak bercakap dengan beberapa teman yang telah menyelesaikan studi master dan doktornya di kampus-kampus ternama di dalam dan luar negeri. Sayangnya, banyak dari mereka tak memilih dan tak berkesempatan menjadi dosen atau mengajar di kampus. Jujur saja, saya secara pribadi sangat menyangkan hal itu terjadi.

Alasan-alasan dan penyebab mengapa hal di atas terjadi sangatlah beragam, meski kebanyakan sebenarnya bisa saja diatasi. Mulai dari alasan biaya, kendala beasiswa, harus cepat nikah, ikut suami/istri, harus segera bekerja, dan alasan yang sedikit lucu dan ‘konyol’ adalah telanjur asyik pulang kampung.

Padahal, saya berkali-kali mengakui dan mengatakan secara jujur dan tulus hati ke mereka, bahwa jika ada yang ‘pantas’ untuk lanjut studi dan menjadi dosen serta mengajar di kampus, itu adalah mereka, bukan (tidak perlu) saya sebenarnya. Tapi, kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Saya yang secara akademik dan pengalaman tidaklah begitu ‘*expert*’ dan tak berkemampuan di atas rata-rata amat dibanding beberapa kawan yang saya akui cerdas, berotak encer, rajin, dan bahkan ada yang saya katai genius malah yang berkesempatan lanjut studi dan menjadi dosen.

Dengan begitu, kekecewaan dan rasa sayang saya menjadi berganda ketika ada teman potensial secara akademik dan pengalaman sudah memenuhi syarat administratif untuk menjadi dosen (akademisi) karena telah menyelesaikan studi master dan dokornya tapi nyatanya tidak juga memilih jadi dosen atau tak diberi kesempatan menjadi dosen. Itu ibarat mengabaikan emas yang sudah ada di depan mata.

## Ragam Penyebab dan Kendala

Memilih jalan untuk tidak menjadi dosen dari kawan-kawan yang saya sebutkan di atas bukanlah tanpa alasan. Beragam alasan baik secara pribadi maupun institusional menjadi penyebabnya.

Faktor penyebab *pertama*, Tak ada akses atau tak diberi akses. *Kedua*, institusi perguruan tinggi berkultur feodal. *Ketiga*, duitnya sedikit dibanding menjadi profesional, politisi, aktif di NGO, staf ahli, konsultan, membangun bisnis, ataupun *freelance*. *Keempat*, mekanismenya ribet. *Kelima*, beban kerjanya banyak bersifat administratif, sehingga bikin ribet dan tumpul otak makanya tidak menarik. Itulah alasan-alasan yang sempat terdaftar dari percakapan yang ada.



Kelima faktor di atas menyebabkan menjadi akademisi adalah pilihan kesekian dan terakhir dari mereka yang saya jumpai tersebut. Pun ada yang tetap mengajar, hanyalah sekedar menyalurkan hobi untuk berbagi, atau akan menjadi pilihan kalau sudah pensiun nanti. Sekali lagi, untuk pertimbangan produktivitas perguruan tinggi dan potensi yang terbuang dalam pemajuan pendidikan dan penelitian serta inovasi saintek, hal ini sangatlah disayangkan. Ada potensi yang dilewatkan secara sia-sia.

## Potensi yang Tak Tersalurkan

Sebenarnya, jika yang memilih jalan tak mengabdikan di kampus adalah sarjana yang hanya memiliki kemampuan rata-rata seperti saya, itu tak mengapa. Namun, bagaimana jika yang berpikir dan memilih jalan demikian adalah orang-orang cerdas, hebat, berdedikasi, *humble*, *friendly*—berkemampuan di atas rata-rata—namun tak ingin menjadi akademisi atau menjadi dosen karena alasan-alasan dan penyebab di atas? Siapakah yang rugi?

Yang merasakan kerugian tentu bukanlah mereka yang ada di dalam institusi pendidikan tinggi dan sedang menikmati segala *prestise*, fasilitas, dan tunjangan kesejahteraan yang ada. Yang rugi tentu mahasiswa dan masyarakat yang tidak mendapatkan menu ilmu pengetahuan bergizi dari seorang yang '*expert*', bernas, pendeknya ahli dan berdedikasi di bidangnya.

Di periode Kemenristekdikti sebelumnya, sempat ada formula men-dosenkan profesional di luar universitas untuk 'masuk kampus'. Ini rupanya dalam rangka membuka 'akses' para profesional dan kaum cerdas pandai—cendekia yang ada di luar sana untuk membagikan ilmunya ke dunia kampus. Polanya dengan memberikan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).

Namun, sepertinya terobosan tersebut adalah dalam rangka ‘mengaet’ dan menambah nilai jual jurusan ataupun kampus tersebut ‘semata’. Langkah tersebut sepertinya tidak disertai dengan ‘pembenahan’ ke dalam di mana faktor-faktor di atas — soal akses, kultur feodal, beban administrasi yang berat dan ribet serta tidak relevan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, apatah lagi *money take home* (penghasilan berupa uang) tidak berupaya untuk diubah ke arah yang lebih baik.

## ***Lesson Learnt***

Saya pun jadi ingat pelajaran dari Prof. Habibie beserta putranya Dr. Ilham Habibie, bahwa dengan diberhentikannya proyek strategis pesawat terbang di waktu krisis 1998, kita kehilangan ahli puluhan ribu yang terbang ke luar negeri. Karena, tanpa pekerjaan dan proyek pengembangan, para anak bangsa terdidik dan ahli di bidangnya tidak akan mengembangkan dan mempraktikkan *skill* dan pengetahuannya. Kita kehilangan satu generasi emas.

Akankah bangsa ini kembali kehilangan satu generasi emasnya hanya karena adanya pengabaian yang kesannya terjadi secara terstruktur dan tersistematis, lagi masif?

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *sketsaunmul.co*

## Intelektual dan Aktivis

**D**unia pengkajian gerakan sosial budaya (*Social and Cultural Movement*) semakin diminati saja di dunia akademis. Banyak sarjana hingga doktor berkonsentrasi di bidang ini. Bahkan, ilmu mapan yang dinamai sosiologi dan ilmu politik sekalipun acap kali mengkaji perihal ini di dunia nyata.

Representasi dan refleksi gerakan sosial budaya di karya sastra, film dan media juga tak jarang diteliti oleh Sarjana-Sarjana Sastra dan ilmu-ilmu humaniora. *Cultural Studies* (Kajian Budaya) adalah satu bidang ilmu yang rajin membedahnya belakangan. Kajiannya makin kompleks dengan pelibatan kajian lintas dan multidisiplin.

Berbicara mengenai gerakan sosial dan gerakan kebudayaan (selanjutnya disebut gerakan sosial budaya), secara agensi atau aktor penggerak akan mengarah kepada dua aktor: intelektual dan aktivis. Kedua aktor ini bertemu dalam satu kepentingan etik dan politik, yakni mencita-citakan perubahan ke arah lebih baik.

## Kerja Sama untuk Perubahan

Tugas intelektual adalah menghasilkan, mengasah, dan menyerukan gagasan akan perubahan. Sementara itu, tugas aktivis adalah mewujudkan perubahan itu. Dengan demikian perpaduan apik antara intelektual dan aktivis ibarat manis dan gula—tak terpisahkan.

Bisakah aktivis bergerak tanpa intelektual?

Bisa. Sebagaimana intelektual bisa hidup tanpa aktivis. Keduanya bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi, tidak cukup. Jika itu terjadi, yang ada adalah 'ego sektoral'. Kecuali orang itu *Superman*. Bisa melakonkan kedua-duanya—mumpuni secara ilmu pengetahuan sekaligus jago bertindak dan berkarya.

Aktivis tanpa intelektual itu ibarat perenang tanpa pelampung, atau penyelam tanpa tabung oksigen. Keduanya bisa berdiri sendiri, tapi lebih berarti dan berfungsi maksimal jika menyatu, untuk tidak bilang mereka wajib bersatu demi perubahan.

Kalau otaknya tidak cerdas-cerdas amat alias tidak berkapasitas dan berkemampuan di atas rata-rata, dan energinya tidak kuat-kuat amat di atas energi rata-rata manusia awam, maka jalan kolaborasi harus ditempuh. Kata seorang kawan, perlu me-lumbung, alias bergotong royong ala orang Indonesia. Bagaimanapun kisah manusia sempurna para nabi sudah tutup buku, dan manusia super juga banyak adanya di dunia dongeng dan karya fiksi saja.

Manusia egois, merasa jago sendiri, apalagi pesimis pada keadaan bukan tempatnya memang dalam jalan perubahan. Intelektual dan aktivis idealnya bersatu untuk perubahan. Tidak bisa tidak.

## **Apakah Orang Bisa Menjadi Intelektual Sekaligus Aktivis?**

Sebenarnya bisa saja. Ini persoalan alokasi waktu dan energi. Kita tahu, sehebat-hebatnya manusia hebat, tetap dia dibatasi oleh waktu selama 24 jam dalam satu hari. Berapa persen yang digunakan dalam sehari untuk melatih dan mengamalkan gagasan dan praktik? Itu pun mesti dipotong dengan alokasi waktu, sumber daya, dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dan urusan domestik sebagai kebutuhan dasar setiap manusia.

Jika tugas sebagai aktivis di luar urusan domestiknya bergerak di lapangan untuk melakukan tindakan, waktu yang perlu dialokasikan harus lebih banyak untuk bertindak. Begitu pula sebaliknya, curah dan asah ide serta pertarungan narasi dan wacana mesti lebih banyak dicurahkan oleh intelektual dibanding proporsi waktu, tenaga, dan sumber daya untuk bertindak dan berkarya layaknya aktivis.

Bagaimanapun, pegangan nilai dan gagasan tanpa tindakan dan karya akan 'tumpul'. Sementara itu, tindakan tanpa gagasan dan pegangan nilai akan 'buntu' serta tak tentu arah. Dengan begitu, kedua aktor perubahan ini mesti me-lumbung dan bergotong royong demi kebaikan dirinya dan orang banyak.

## **Proporsi dan Manajemen Diri**

Secara kuantitatif, intelektual mengabdikan waktu dan energinya sebanyak 70% untuk penyebaran dan pembudayaan nilai dan gagasan, sedangkan 30% untuk tindakan dan karya. Sementara itu, aktivis perlu mengalokasikan waktu dan energinya 70% untuk

tindakan di lapangan dan berkarya, serta 30% nya lagi untuk meng-*upgrade* ilmu pengetahuan dan penguatan nilai perjuangannya.

Dengan begitu, seorang pembelajar dan pejuang perubahan sosial budaya mampu memposisikan serta mengelola diri untuk melakoni aktivitas aktivis maupun intelektual. Tertata dengan baik, disiplin, serta tidak serampangan—maju gonrong (asal bergerak) kata anak Makassar. Bagaimanapun, seorang aktivis dan intelektual layaknya tokoh hero dalam cerita fiksi perlu mengelola (*me-manage*) dirinya agar tetap konsisten dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam bergerak.

## **Pemimpin dan Kepemimpinan Sosial**

Pada akhirnya, aktivis dan intelektual butuh seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang dengan kapasitas kepemimpinan 50:50. Lima puluh persen (50%) harus menguasai ilmu pengetahuan, dan 50% harus menguasai keterampilan dalam praktik. Singkatnya, seorang pemimpin ideal adalah seorang konseptor sekaligus eksekutor dengan komposisi yang seimbang. Seorang pemimpin adalah sosok yang harus mampu menerjemahkan dan mewujudkan idealitas seorang intelektual dan realitas seorang aktivis. Mengolahnya adalah keterampilan tersendiri. Itulah kepemimpinan sosial (*Social Leadership*).

Akan tetapi, seorang pemimpin hebat mesti ditopang oleh kehadiran intelektual yang mumpuni dan aktivis yang terlatih. Apakah sang pemimpin hadir dari ceruk intelektual atau aktivis, itu tidak soal. Akan tetapi, begitu dia menjadi pemimpin, maka porsi kuantitatif 70:30 di awal mesti bergeser ke 50:50. Harus seimbang dan proporsional. Kalau tidak, jalannya organisasi yang dipimpinnya bisa pincang lagi miring.

## Sang Hero dan Tokoh Bijak

Terakhir, sosok intelektual, aktivis, dan pemimpin layaknya tokoh-tokoh hero dalam dunia fiksi. Di *Hero's Journey*-nya Joseph Campbell dibilang bahwa dalam suatu alur cerita perjuangan dan kepahlawanan, akan ada suatu tantangan yang mahadahsyat. Di situlah 'tokoh bijak' dibutuhkan oleh sang 'hero'.

Pemimpin, intelektual, dan aktivis butuh *Wise(wo)man* (tokoh bijak) untuk sandaran nilai dan keteguhan jiwanya (*to empower the soul*) dalam gerakan dan kepemimpinan menuju perubahan, begitu kata Joseph Campbell. (nm)

Kuala Lumpur, 2 April 2021

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *sketsaunmul.co*

# Otonomi Unhas, Jebakan atau Tantangan?

**U**nhas, Universitas Hasanuddin. Universitas terbesar di Kawasan Timur Indonesia ini baru saja berubah status dari BLU ke PTN-BH. Dalam perjalanannya, Unhas melewati dua status sebelumnya untuk beranjak dari BLU. Status BHMN dan BHP adalah dua status sebelumnya yang tidak sempat disandang Unhas. BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dan BHP (Badan Hukum Pendidikan), adalah dua status sebelumnya yang menandai otonomi/mandirinya sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Keduanya, baik BHMN maupun BHP, kini berubah nama meski dengan spirit yang sama, menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) semenjak disahkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Apa di balik PTN-BH? Jawabannya adalah otonomi. Otonomi seperti apa? Otonomi akademik dan otonomi ekonomi. Artinya apa? Unhas berdaulat secara akademik sekaligus secara ekonomi. Maksudnya apa? Untuk bidang akademik, Unhas bisa menentukan orientasi akademiknya sendiri, di sinilah tantangannya. Untuk bidang



ekonomi (keuangan), Unhas harus menghidupi dirinya sendiri, mirip kampus swasta, di sinilah 'jebakan'-nya.

## Siasat Keluar Perangkap?

Hadirnya UU PT No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinilai menjadi kelanjutan semangat neoliberal di Indonesia. Ratifikasi kesepakatan WTO dengan semangat liberalisasi di sektor jasa, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan adalah dasarnya. Olehnya, PTN-BH sebagai produk UU PT merupakan bagian dari "*grand strategy*" sistem kapitalisme global. Jika sudah demikian, membangun strategi di dalam strategi besar, sepertinya nyaris mustahil, apalagi menolak sistem ini, Unhas mana berani. Dengan demikian, karena membangun strategi sendiri di atas strategi global nyaris mustahil, maka yang bisa dilakukan adalah menyusun "siasat".

Unhas harus bisa menyiasati perangkap atau jebakan yang menganga di depan gerbang. Majelis Amanah Unhas (MWA), Rektor dan Ikatan Alumni (IKA) harus mampu menyiasati perangkap yang sedang mengancam Unhas ini. Caranya bagaimana? Pertama, pembenahan struktur, sistem, dan kultur. Kedua, maksimalisasi Sumber Daya Manusia. Ketiga, maksimalisasi aset internal. Keempat, pelaksanaan kerja sama berdaulat.

Langkah pertama yakni pembenahan struktur, sistem, dan kultur mesti dilihat sebagai sesuatu yang mendesak. Albert Einstein bilang, "Jangan mengharapkan hasil yang sama, jika menggunakan cara yang sama pada masalah yang berbeda". Jadi, perubahan yang sedang dialami oleh Unhas hari ini mesti diikuti perubahan struktur, sistem, dan kultur juga. Tidak bisa menggunakan cara kerja lama dengan tantangan baru yang ada sekarang. Salah satu sistem yang Unhas harus bangun adalah bagaimana supaya kelas menengah ke

bawah di Kawasan Timur Indonesia tetap mampu bisa mengenyam pendidikan di Unhas.

Langkah kedua, maksimalisasi Sumber Daya Manusia. Pejabat, dosen, dan pegawai harus dibiasakan bekerja lebih profesional dan memiliki daya saing. Itu konsekuensi karena Unhas masuk ke dalam lingkaran persaingan terbuka. Profesionalitas menjadi kunci penting bagi SDM Unhas ke depan. Para ahli yang dimiliki Unhas juga bisa menjadi garda terdepan yang menjadikan Unhas memiliki nilai tawar. Tinggal bagaimana sumber daya dan kelebihan ini dikelola untuk kemaslahatan Unhas.

Langkah ketiga, maksimalisasi aset internal sebagai tulang punggung kemandirian. Maksimalisasi aset internal tidak harus diterjemahkan dengan komersialisasi dan komodifikasi gedung-gedung, termasuk ke mahasiswa sendiri. Itu adalah cara pandang yang keliru. Maksimalisasi aset internal harus dilakukan "*beyond komodifikasi*"--melampaui komodifikasi, apalagi komersialisasi. Aset harus dimaksimalkan di lini-lini strategis. Mesin-mesin uang harus maksimal di aset strategis, bukan pada fasilitas publik yang justru harus digunakan untuk melayani mahasiswa. Lagi-lagi, profesionalitas harus menjiwai pengelolaan aset sebagai BUMN-nya Unhas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri sebagai konsekuensi otonomi.

Langkah keempat yakni kerja sama berdaulat, mesti dilihat sebagai langkah taktis yang efektif. Posisi tawar penting dibangun agar Unhas tidak terkesan 'menjual diri' di hadapan perusahaan, lembaga, dan instansi mitra. Unhas harus keluar dari stigma bahwa sedang mengejar kerja sama karena butuh uang. Itu kenapa maksimalisasi aset internal sebagai sumber pemasukan utama harus berjalan. Sebagai institusi pendidikan, Unhas tentunya harus sadar diri untuk tidak memenuhi ruang publiknya dengan *brand* korporasi melulu. Selain tidak elok dipandang, hal itu juga jauh dari semangat edukatif itu sendiri. Perguruan tinggi bukanlah arena komersial untuk

menjajakan iklan-iklan korporasi. Olehnya, kerja sama harus berdaulat.

## Refleksi Kritis

Keempat langkah di atas hanyalah siasat, bukan strategi. Karena bagaimanapun, jika ingin membangun strategi, Unhas harus berani menolak dulu didikte oleh regulasi dan keputusan neoliberal itu sendiri, baru menyusun kebijakan dan strateginya sendiri. Siasat, hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menghindari keruntuhan institusi, sifatnya sementara.

Untuk jangka panjang, penting bagi Unhas untuk melihat ulang posisinya di tengah percaturan perguruan tinggi di level nasional, regional, dan global. Akreditasi A dan *brand "World (Without) Class University"* saja tidak cukup. Unhas harus melampaui itu, *beyond*.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *Harian Fajar*, Makassar

# Merefleksi Pendidikan Pasca-Pandemi

**P**andemi Covid-19 sudah setahun lamanya hadir di tengah kehidupan manusia di bumi. Di Indonesia, usia formalnya sekitar sembilan bulan sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama. Pandemi Covid-19 ibarat disrupsi yang hadir menyerang secara tiba-tiba. Efek kejutnya membuat kelabakan spesies manusia.

Pasca-pandemi (*post-pandemi*) dapat dimaknai sebagai kondisi sejak pandemi Covid-19 menyerang hingga setelahnya. Pasca-pandemi tidak mesti dimaknai ketika pandemi usai. Tidak demikian sepantasnya kata *post-* dimaknai. Pasca-pandemi boleh dimaknai sebagai ‘dampak’ pandemi virus korona sejak pertama kali menyerang hingga setelahnya selama dampak dan pengaruhnya masih terjadi. Pasca-pandemi adalah kemarin, hari ini dan hari depan ketika pengaruh pandemi memberikan dampaknya, baik secara praktik maupun dalam hal produksi pengetahuan dan kebudayaan.

Dunia pendidikan adalah satu dari sekian banyak sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Tatap muka di kelas dibatasi, semua serba daring (dalam jaringan) atau lebih dikenal serba *online*. Aplikasi-aplikasi pembelajaran daring mendadak *booming*. Manusia

dipaksa me-*restart* dirinya, termasuk caranya belajar mengajar di universitas.

## **Pandangan Filosofis Membaca Pandemi**

Sejak dekade 60-an abad XX, dunia sudah membicarakan pandangan filosof mengenai poststrukturalisme. Dunia dipandang tak mesti berpusat. Dalam hal ini, pemikir *poststructural* dan posmodern menggaungkan untuk mengakhiri cara pandang menganggap Barat hasil pencerahan sebagai pusat.

Satu hal yang berusaha dikikis oleh pemikir poststruktural dan posmodern adalah sentralisasi Eropa (Eropasentris) dan pemujaan atas modernitas. Barat yang modern tidaklah mesti menjadi pusat dan kiblat semua negara di dunia, apatah lagi negara bekas jajahan seperti Indonesia. Modernitas juga punya kelemahan, terutama dalam memperlakukan sesama manusia dan lingkungan hidup. Pemanasan global dan rasisme serta pelanggaran HAM adalah beberapa dari sekian tanda dari kegagalan pencerahan ala Eropa.

Meski demikian, pemikiran postrukturalisme dan posmodernisme dinilai banyak kalangan masih memiliki anasir antroposentrisme yang kuat. Manusia masih dianggap sebagai subjek dominan dari subjek lainnya, termasuk menjadikan virus sebagai subjek. Makhluk renik sejenis virus masih belum dihitung sebagai subjek setara hingga hadirnya virus korona menyerang.

## Virus Sebagai Subjek

Pandemi virus korona (Covid-19) mengkritik dan membanting habis antroposentrisme. Manusia ternyata bukanlah subjek dominan yang paling otoritatif. Manusia bisa tersingkir dan terkurung oleh subjek kecil dan makhluk renik bernama virus. Dalam kata lain, virus mendisrupsi dan mendekonstruksi kuasa dominan manusia sebagai 'khalifah' tunggal di bumi.

Pada tahun 2015 terbit buku dengan judul *The NonHuman Turn* yang diedit oleh Richard Grusin. Buku ini menegaskan bahwa non-manusia adalah subjek yang mesti diakui keberadaannya. Dengan sendirinya, manusia tak bisa lagi mendaku sebagai penguasa segalanya di bumi. Bahwa manusia bukanlah satu-satunya subjek dalam kelangsungan hidup semesta. Secara tak langsung, antroposentrisme dilucuti di dalam ide-ide di buku ini.

Senada dengan Buku *The NonHuman Turn*, salah satu penulis dari buku tersebut, yakni Timothy Morton menerbitkan bukunya berjudul *Being Ecological* pada tahun 2018. Buku ini menekankan pentingnya manusia mempertimbangkan faktor ekologis dalam kehidupannya di bumi. Menjadi ekologis adalah salah satu memperpanjang napas bumi dan memperpanjang napas manusia di bumi. Barangkali pesan lainnya adalah, sebelum bumi dan subjek lainnya menegur manusia yang terlalu dominan dan merusak, manusia sebaiknya bertobat duluan dan menjadi lebih ekologis—mencintai lingkungan.

Kedua buku di atas sesungguhnya banyak didiskusikan oleh kalangan terbatas akademisi dan sarjana belakangan ini. Inti pendiskusianya adalah melihat kembali 'egosentrisme' manusia dalam menjalani kehidupan selama ini hingga satu subjek non-manusia bernama virus mendisrupsi dan mendekonstruksi habis kuasa manusia di bumi.

Dapat dikatakan bahwa makhluk non-manusia jengah dengan ulah manusia yang menciptakan krisis ekologis, perubahan iklim, hingga pemanasan global. Pendeknya, kuasa manusia dalam antroposentrisme beberapa abad terakhir membuat makhluk lain gerah dan menegur manusia secara tegas. Hingga akhirnya, manusia sendiri tergopoh-gopoh dan berteriak tentang pandemi ketika satu dari sekian banyak makhluk itu menyerang.

Pertanyaannya kemudian adalah, tobatkah manusia? Berakhirkah kuasa antroposentrisme?

## **Pendidikan Pasca-Pandemi**

Di tengah pandemi, manusia akhirnya berakrobat dan tak kehilangan akal untuk lolos dari ‘amukan’ virus. Disrupsi dihadapi dengan inovasi. Bahkan dengan perlombaan menemukan vaksin, manusia sesungguhnya menunjukkan ‘watak’ dan perangai resistensi, alih-alih reflektif.

Berkaca dari pandangan Timothy Morton dan Richard Grusin dkk di atas, akankah pendidikan pasca-pandemi mengedepankan aspek intersubjektivitas dan *ecological oriented* (berorientasi lingkungan)?

Akankah pendidikan ke depan mengarah pada bagaimana manusia melakukan tobat ekologis?—meminjam salah satu judul artikel di salah satu media beberapa bulan lalu.

Akankah pendidikan di tengah pandemi ini akan mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk ‘mengurusi’ segala hal terkait krisis ekologis, pemanasan global, dan perubahan iklim yang membuat subjek-subjek non-manusia seperti virus tidak semakin menegaskan diri untuk menegur manusia yang terlalu dominan di bumi?

Terakhir, pertanyaan reflektif yang penting dijawab adalah: jelang awal dekade ketiga abad XXI ini akankah pendidikan mengarah dan diarahkan untuk menciptakan manusia yang lebih *being ecological*—menjadi ekologis—sebagaimana Morton tuliskan dalam bukunya di atas? Ataukah semakin ingin menjadi manusia segalanya di bumi?

Bagi Universitas Mulawarman, akankah keberlangsungan Hutan Tropis Lembap Kalimantan menjadi prioritas untuk diselamatkan di tengah ekspansi industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan monokultur kelapa sawit? Akankah UNMUL akan semakin *being ecological*?

Mari bercermin untuk menatap masa depan pendidikan untuk kehidupan umat manusia di bumi pasca-pandemi.

Selamat memasuki dekade ketiga abad XXI: 2021.

Semoga kita semakin reflektif dan lebih ekologis.

\*\*\*

Samarinda, 29 Desember 2020

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *sketsaunmul.co*



# Dari Produksi Pengetahuan Hingga Kebijakan

**K**ampus memproduksi pengetahuan, parlemen memproduksi aturan, pemerintah memproduksi kebijakan. Disadari atau tidak, ketiganya adalah tiga mata rantai menentukan dalam kehidupan di masyarakat.

Kampus, parlemen, dan pemerintah adalah tiga institusi penting dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke mana arah kehidupan berbangsa dan bernegara sedikit banyaknya ditentukan oleh ketiga institusi ini.

Kerja sama ketiga institusi ini sangat menentukan. Produksi pengetahuan, aturan, dan kebijakan ditentukan oleh ketiganya. Bahkan, persekongkolan ketiganya pun juga membahayakan. Sebuah kebijakan oleh pemerintah yang ingin diloloskan bisa saja dibuatkan aturan di parlemen dan dibenarkan secara ilmu pengetahuan oleh kampus.

Soal nantinya kebijakan itu berbuah kontroversi, dan atau bertentangan dengan kemaslahatan orang banyak, di belakang

persoalan. Yang jelas, aspek formalnya, lolos dulu. Ada “kesepakatan” melalui aturan, dan ada “pembenaran” oleh ilmu pengetahuan dari kampus. Sah.

Sebut misalnya sebuah aturan mengenai pendidikan tinggi. Justifikasi moral filosofis, argumen ilmu pengetahuan, hingga menjadi aturan dan mewujudkan ke kebijakan adalah sebuah perjalanan panjang. Perdebatan di tataran ilmu pengetahuan panjang sekali. Hanya saja yang menentukan adalah kekuasaan, pemerintah, dan parlemen tentunya. “Mazhab” dan orientasi pengetahuan apa yang ingin dipakai: konservatif, liberal, atau kritis? Atau ada kombinasi dari ketiganya?

Dalam konteks ini, produksi pengetahuan tidak boleh tidak dianggap sebagai hal yang politis. Produk pengetahuan yang dihasilkan, terutama yang berkenaan dengan aturan dan kebijakan pada umumnya adalah sepaket. Sebuah kebijakan ekonomi dan pendidikan misalnya, membutuhkan aturan untuk menjalankannya. Sementara itu, sebuah aturan paling tidak membutuhkan “*backing*”/landasan pengetahuan, minimal berupa naskah akademik.

Sementara itu, dalam ranah akademik, perdebatan teoretis dan filosofis tak berkesudahan. Lantas, filsafat, paradigma, teori, dan pendekatan mana yang digunakan pada naskah akademik aturan tersebut? Apakah berupa pesanan dari pembuat aturan atau empunya (calon) kebijakan? Perlu diperiksa baik-baik untuk membuktikannya. Yang jelas, harus dipilih dari sekian banyak pilihan.

\*\*\*

Dengan begitu, berarti apakah ilmu pengetahuan bukanlah hal yang netral dan bebas nilai? Memang.

Tak ada ilmu pengetahuan yang bersifat netral dan bebas nilai, sesungguhnya. Ilmu pengetahuan memiliki kepentingannya sendiri, kata Jurgen Habermas dalam karyanya *Knowledge and Human Interest*. Selalu ada kepentingan manusia pada setiap ilmu pengetahuan. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak.

Habermas membagi tiga jenis ilmu pengetahuan, berikut kepentingan atau agendanya. Pertama, ilmu-ilmu alam. Kedua, ilmu-ilmu sosial (masyarakat). Ketiga, ilmu ilmu humaniora/ilmu-ilmu budaya.

Jenis ilmu pengetahuan pertama bersifat positivis. Yang kedua bersifat konstruktifis. Yang ketiga bersifat kritis. Kepentingan yang pertama adalah regulatoris, keteraturan. Kepentingan yang kedua adalah agenda eksplanatoris, yaitu menjelaskan konstruksi masyarakat. Kepentingan yang ketiga adalah agenda emansipatoris, yakni membebaskan keterkungkungan manusia.

Dari ketiga paradigma pengetahuan di atas, maka dapat dicerminkan aturan dan kebijakan yang dihasilkan. Ke mana arah suatu aturan dan kebijakan, dapat dicek dari paradigma pengetahuan apa yang digunakan. Kepentingan di baliknya dapat dibaca. Untuk mengatur? Menjelaskan? Atau membebaskan?

\*\*\*

Dari uraian Habermas di atas, pahami kita bahwa *interest* (kepentingan) selalu menyertai hadirnya ilmu pengetahuan.

Ilmu-ilmu alam dengan paradigma positivismenya memang dihadirkan untuk menciptakan kepastian dan keteraturan. Sementara itu, ilmu-ilmu sosial dengan paradigma konstruktivismenya tercipta untuk mengurai dan menjelaskan bagaimana sebuah tatanan sosial masyarakat tercipta. Sedangkan, ilmu-ilmu budaya (humaniora)

dengan paradigma kritisnya hadir untuk membebaskan manusia dari keterkekangan.

Keterkekangan manusia dinilai oleh para ilmuwan kritis adalah hasil dari pencerahan yang terlalu menonjolkan positivisme ilmu-ilmu alam di segala bidang ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kekangan ilmu pengetahuan yang bersifat saintifik ini, adalah hasil dari beroperasinya paradigma dan metode ilmu-ilmu alam (sains) di ranah ilmu sosial dan humaniora. Termasuk pula di bidang ilmu hukum yang menghasilkan aturan, dan di bidang ilmu sosial politik yang menghasilkan kebijakan.

Olehnya, setiap aturan dan kebijakan lahir, tidak bisa tidak perdebatan paradigmatis dan kepentingan ada di dalamnya. Jika pun tidak terjadi perdebatan itu, maka bisa dipastikan ada passifikasi atau dominasi sebuah paradigma di dalamnya. Atau bisa juga, karena tidak ada naskah akademik yang serius atau pelibatan akademisi di dalamnya. Yang terakhir ini tentu merupakan sebuah ketertinggalan atau kemunduran peradaban bernegara.

Karena, bagaimana mungkin sebuah aturan dan kebijakan di zaman serbacanggih sekarang ini, diproduksi tanpa “afirmasi” ilmu pengetahuan? Pun, jika itu terjadi, nalar sehat bernegara yang demikian perlu dicek. Jangan-jangan mengurus negara dikira seperti mengurus warung atau usaha pribadi.

\*\*\*

Dengan memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan, aturan, dan kebijakan di atas, maka benarlah apa yang Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka pernah katakan, bahwa “Tak ada kedaulatan sains/ilmu pengetahuan tanpa kedaulatan ekonomi dan politik suatu negeri”.

Dengan begitu, jika sains/ilmu pengetahuan suatu negeri ingin merdeka, maka pertama kali yang harus dimerdekakan adalah ekonomi dan politik negeri itu. Jika tidak, ilmu pengetahuan tak lain dan tak bukan adalah pelayan dari kepentingan ekonomi dan politik “si empunya kuasa”.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *sketsaunmul.co*

# Universitas Komisaris

**A**pa jadinya ketika pimpinan universitas menjabat sebagai komisaris sebuah korporasi? Bukankah itu berarti mengurus dunia akademis dan dunia bisnis sekaligus? Lantas bagaimana ketika "jatah" komisaris identik dengan posisi politis? Bukankah jadinya dunia akademis, kepentingan bisnis, dan relasi politis padu menyatu?

Pantaskah pimpinan universitas yang mengurus perihal akademis sekaligus mengurus bidang bisnis di mana aroma politis berpotensi sarat di situ?

Belakangan, jabatan komisaris di BUMN diasosiasikan sebagai jabatan "politik" kepada para tim sukses pilpres lalu. Pasalnya, jamak yang diberi "jatah" komisaris berlatar tim pemenangan kandidat ketimbang berlatar bisnis, terutama kepada yang pengalaman mengurus perusahaan. Tempo misalnya merilis satu judul terbitan "*Terlalu Komisaris untuk Dilupakan*" untuk menandai diangkatnya menjadi komisaris salah satu personel grup band yang dikenal sebagai pendukung salah satu capres di pemilu lalu. Hal itu tentu cukup menggelitik nalar publik kita. Kok bisa sampai begitu?

Lantas bagaimana jika yang diberi jabatan/posisi itu adalah pimpinan universitas? Bagaimana jadinya dunia pendidikan tinggi kita?

\*\*\*

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) boleh dikata seperti memulai terbukanya kotak pandora (*Pandora Box*). Postingan bernada "satire" terhadap kinerja Presiden direspons dengan cepat oleh pihak rektorat UI. Sebetulnya, hal itu bisa menjadi hal biasa saja sekiranya tak ada respons yang dinilai berlebihan. Ditambah reaksi dari seorang dosen UI yang dinilai kurang elok oleh banyak kalangan itu menambah ramai suasana di jagat maya.

Tak berhenti dengan klarifikasi. Entah dari mana ke mana lantas wacana rektor UI rangkap jabatan komisaris BUMN mencuat. Di Timur Indonesia, lantas rektor salah satu universitas negeri juga teridentifikasi menjabat komisaris salah satu perusahaan? Dunia universitas, khususnya para pimpinannya seketika menjadi sorotan. Ibarat kisah klasik kotak pandora, isi kotak itu lantas beterbangan ke mana-mana, nyaris tak terkendali lagi.

Ada apa di balik wacana rektor universitas sekaligus komisaris perusahaan ini? Beragam analisis mencuat. Bahkan beberapa pertanyaan kritis mengemuka. Adakah hubungannya jabatan komisaris sang rektor dengan reaksinya dalam menyikapi kritik mahasiswa?

Layak dipertanyakan memang, ketika universitas yang sepatutnya menjadi kawah candradimuka mewujudnya kebebasan akademik dan kemerdekaan berpendapat tiba-tiba berubah menjadi protektif dan bahkan belakangan menjadi represif. Publik layak bertanya memang. Lagi pula, universitas yang merupakan institusi publik layak mendapat perhatian serius.

Bagaimanapun, sebagian besar masa depan pemimpin bangsa dan negeri ini dipertaruhkan di situ, di universitas. Maka, mengelola universitas dan menyiapkan generasi muda calon pemimpin bangsa sepatutnya dilakukan dengan tingkat kefokusannya tinggi, lagi penuh jiwa bersahabat dengan kaum muda yang sedang surplus itu.

Jika dikaitkan dengan momen surplus demografi hari ini dan beberapa tahun ke depan, anak muda Indonesia memang perlu penanganan serius lagi canggih. Pertaruhannya besar sekali: bonus demografi atau bencana demografi, kata para ahli.

Tak layak kiranya daya kritis dan produktivitas anak muda di universitas ditukar dengan jabatan komisaris sang rektor. Jika itu terus terjadi, publik bukan tak mungkin memproduksi satire baru lagi: "Universitas Komisaris" atau barangkali "Rektor Komisaris". Karena, ibarat kotak pandora yang telanjur terbuka, endapan "hantu-hantu" persoalan yang tersimpan rapat begitu lama, menggelinging dan menyebar ke mana-mana, hingga tak terkendali. Bisa "ruwet, mampet", meminjam istilah salah satu karakter politisi di adegan film *Di Balik 98*.

\*\*\*

Pihak universitas tentu punya jawaban dan pembenaran birokratis dan yuridis. Aturan boleh dibuka, ditafsir, dan diperdebatkan. Juga soal prosedur birokrasi yang menyertainya. Sayangnya, persoalan utama dan perihal mendasarnya bukan di situ. Soal utama adalah kepantasan etik sang pemimpin universitas, sang rektor.

Tak menarik lagi, meski tetap penting, bicara soal rangkap jabatan dan atau apa di balik posisi komisaris. Hal paling mendasar adalah perihal etik: "kepantasan". Karena, jika tak sampai pada taraf itu, maka tak heran jika pimpinan universitas pun dapat dinilai sedang



"mabuk jabatan". Tak puas dengan jabatan satunya, ditambah lagi posisi lainnya.

Selain soal rangkap posisi---jika kata jabatan menuai kontroversi--menarik menelisik gramatika kepemimpinan dunia yang sedang hangat belakangan ini. Profesor Emil Salim tak lama ini menerangkan perihal *Greedy politic* dan *Green Politic*: politik serakah dan politik hijau. Keduanya boleh kita sandingkan dengan perihal kepemimpinan menjadi: *greedy leadership* dan *green leadership*--kepemimpinan serakah yang rakus nan ekstraktif dan kepemimpinan hijau yang tak rakus lagi pro lingkungan dan kemanusiaan.

Kedua karakter politik yang sudah barang tentu memengaruhi karakter kepemimpinan ini, termasuk kepemimpinan universitas, menjadi dua tata bahasa kepemimpinan dunia hari ini. Dari tuntunan Prof. Emil Salim di atas, dapatlah kiranya dijadikan cermin, apakah rektor sekaligus komisaris adalah bagian dari *greedy leadership* atau *green leadership*?

Lantas, bagaimana nasib universitas dan anak muda negeri ini di hadapan pemimpinnya yang tak lain juga seorang komisaris? Masih pantaskah universitas dikelilingi "aroma" bisnis, yang juga cenderung politis, di hadapan kepentingan akademis yang tak lain merupakan tugas utama universitas?

\*\*\*

Publik layak mencegah keberlanjutan universitas untuk terlalu "komisaris" akibat laku "politis" pimpinan dan penyelenggaranya. Selain tak pantas, perilaku ini berpotensi menyingkirkan sikap akademis dan marwah etis universitas yang merupakan amanah konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas tak boleh dibiarkan kehilangan spirit dan tugas konstitusional itu.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *makassarterkini.id*

# Mahasiswa Cerdas dan Mahasiswa Progresif

Tulisan ini tak bermaksud mendikotomi antara mahasiswa cerdas dengan prestasi akademiknya dengan mahasiswa progresif dengan prestasi organisasinya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kedua karakter tersebut dan potensinya untuk berkolaborasi demi kemajuan bersama.

Dua karakter di atas, yakni cerdas sekaligus progresif bisa ada dalam seorang mahasiswa. Sosok seperti inilah yang sangat pas menjadi pemimpin, meski akan langka ditemukan. Sosok pertama ini saya sebut sebagai mahasiswa ideal. Karakter yang banyak adalah mahasiswa yang dominan memiliki satu karakter dari keduanya. Ada mahasiswa pintar secara akademik namun minus di organisasi, saya menyebut karakter kedua ini sebagai mahasiswa cerdas. Ada pula mahasiswa yang terampil berorganisasi, namun pas-pasan dalam hal akademik. Karakter ketiga ini saya sebut dengan mahasiswa progresif. Namun, ada pula ciri mahasiswa yang tidak dominan di keduanya—tidak cerdas secara akademik, tidak pula menonjol di bidang organisasi. Karakter keempat seperti ini lebih banyak menjadi

pengikut (*follower*). Saya menyebutnya sebagai mahasiswa kebanyakan.

Keempat karakter yang saya definisikan di atas—mahasiswa ideal, mahasiswa cerdas, mahasiswa progresif, dan mahasiswa kebanyakan—tentulah memiliki potensi dan proyeksinya masing-masing. Mahasiswa ideal layak menjadi pemimpin ideal. Mahasiswa cerdas pas menjadi ilmuwan, analis, akademisi, konsultan, profesional, dan penemu. Mahasiswa progresif akan berproyeksi menjadi aktivis cum intelektual, politisi, usahawan/entrepreneur, pekerja sosial, dan pemimpin sosial dan struktural. Sementara itu, mahasiswa kebanyakan potensial menjadi pengikut dari ketiga karakter mahasiswa sebelumnya. Fungsi *supporting*, akan lebih banyak diperankan oleh karakter mahasiswa keempat ini.

Potensi dan proyeksi keempat karakter mahasiswa di atas tentulah bukan hal yang final. Bukankah tak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri, kan? Akan tetapi, jika mencermati kondisi kekinian, keempat karakter mahasiswa di atas berikut potensi dan proyeksi ke depannya, mengarah ke hal-hal yang disebutkan di atas.

Namun, bagaimana jika sosok mahasiswa ideal dengan kecerdasan dan kegeniusan di atas rata-rata sekaligus aktif di organisasi semakin langka atau bahkan tidak ditemukan sama sekali pada rentang waktu tertentu? Bagaimana pula seandainya yang ada hanya mahasiswa dengan IPK super tinggi saja dan mahasiswa yang aktif berorganisasi dan berdemonstrasi saja, dan sisanya mahasiswa 'kupu-kupu' (kuliah pulang, kuliah pulang) saja? Skenario kepemimpinan apa dan bagaimana yang sepatutnya memungkinkan diwujudkan ke depan?

\*\*\*

Sebelum menjawab pertanyaan pertanyaan yang rumit dan kompleks di atas, alangkah baiknya kita sedikit reflektif sejenak.

Para ahli sesungguhnya masih berdebat soal bagaimana kepemimpinan ideal diciptakan. Para ahli pun ada yang berpandangan bahwa pemimpin dapat dibentuk melalui sistem kaderisasi. Bahwa pemimpin dapat dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Olehnya, semua orang bisa menjadi pemimpin. Pandangan ini dikenal sebagai cara pandang liberal. Ada pula sekelompok ahli yang percaya bahwa kepemimpinan bersifat 'genetik', diwariskan berdasarkan garis keturunan dengan harapan keunggulan-keunggulannya sebagai pemimpin pun turut diturunkan. Pandangan jenis ini lazim dikenal sebagai pandangan konservatif.

Kedua cara pandang tersebut masih lazim diyakini dan dipraktikkan oleh banyak masyarakat. Terakhir, sejarawan fenomenal sekaligus kontroversial Yuval Noah Harari mengatakan dalam *Sapiens*-nya, bahwa: "baik yang dibilang konservatif, maupun yang dilabeli dan mendaku liberal, sama-sama memuja—apa yang disebutnya sebagai salah satu yang membuat spesies Sapiens mampu bertahan hidup dan adidaya dari spesies lain—: fiksi dan mitos". Baik yang mengusung bahwa semua manusia sama/setara dan ada manusia unggul, kata Harari, adalah sama sama mengusung fiksi—karena secara biologis-genetis DNA manusia sudah pasti berbeda alias tidak ada yang sama sekaligus punya keunggulan masing-masing.

Namun, luar biasanya, justru karena kemampuan mengelola 'yang fiksional dan mitologis' itulah yang menjadi salah satu faktor manusia (*Sapiens*) mampu bertahan hidup dan menjadi unggul dari spesies lainnya. Dengan begitu, Harari mau bilang bahwa tidak ada kesetaraan apatah lagi kesamaan secara biologis-genetis sebagaimana klaim kaum liberal. Tidak ada pula keunggulan hierarkis yang bersifat tetap ala kaum konservatif. Pun, kalau 'dianggap ada', itu hanya 'diada-adakan' untuk kepentingan tertentu melalui strategi

penciptaan ‘mitos’. Sekali lagi, kata Harari, itu hanyalah strategi bertahan hidup dan juga strategi untuk berkuasa (*the strategy to survive and the will to power*).

Bahkan, dalam model memilih pemimpin sekalipun hingga hari ini tak sama. Monarki dan demokrasi masih tarik ulur. Bahkan, tak sedikit yang mencoba berdamai dengan menggabungkan monarki dan demokrasi. Maka lahirlah demokrasi konstitusional. Belum lagi model seperti RRC yang menggabungkan sistem politik yang tertutup dan sistem ekonomi yang terbuka. Lebih rumit lagi. Intinya tak ada sistem yang baku dan fix serta menjadi *role model* untuk semua.

Terlebih lagi, makin ke sini, kolaborasi kreatif—baik secara sistem maupun aktor—makin menunjukkan tingkat keberhasilannya menghadapi tantangan zaman. Mengutip Nassim Nicholas Taleb penulis *Black Swan*, dunia yang kita hidupi hari ini adalah dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian (*the age of complexity and uncertainty*). Olehnya, salah satu hal yang perlu disiapkan adalah bagaimana menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian itu. Rumit, kan?

\*\*\*

Abad XXI sering dibilang abadinya informasi dan teknologi. Budaya manusia di-*drive* oleh teknologi. Orang-orang banyak menyebutnya sebagai teknologi digital dan kecerdasan buatan. Bahkan kecanggihan teknologi dan kecerdasan buatan tersebut sampai bisa mengalahkan kecanggihan dan kecerdasan manusia itu sendiri.

Dengan kompleksitas, ketidakpastian, dan hidup serbacepat di abad informasi ini, maka menjadi mahasiswa cerdas atau progresif saja sepertinya tidaklah lagi relevan. Menjadi mahasiswa di abad XXI ini rupanya mesti juga berpengetahuan dan berketerampilan

kompleks jika ingin tetap relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

Gerak zaman sepertinya menuntut hadirnya mahasiswa ideal dengan kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional yang mumpuni sekaligus. Mahasiswa ‘sepotong-sepotong’ dengan mengandalkan kecerdasan saja dan atau kemampuan organisasional saja tak cukup, apatah lagi mahasiswa yang tak punya keunggulan dari keduanya alias mahasiswa kebanyakan. Sudah dipastikan mahasiswa tipe terakhir akan menjadi *follower* dan konsumen saja. Ibarat daun kering, di mana angin berembus di situ pulalah mereka beterbangan.

Bicara soal mahasiswa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, saya tak bisa tidak mengingat pesan Profesor B.J. Habibie. Ilmuwan sekaligus *former* presiden Indonesia pemilik IQ di atas ilmuwan sekaliber Einstein dan Newton serta IQ di atas presiden-presiden dunia sekaliber Abraham Lincoln itu memiliki dua kata kunci: “pendidikan” dan “pembudayaan”.

Selain itu, dua kata kunci selanjutnya adalah penguasaan “Iptek” (Ilmu pengetahuan dan teknologi) dan “Imtak” (Iman dan takwa) pada setiap SDM Indonesia. Itulah kapasitas manusia Indonesia yang dicita-citakan ilmuwan genius cum presiden ber-IQ tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia dan dunia tersebut. Darinya kita belajar bahwa tak cukup dengan menjadi mahasiswa cerdas saja, tak cukup pula dengan menjadi mahasiswa ‘baik-baik’ saja, termasuk ‘baik dalam hal ber-organisasi’.

\*\*\*

Lantas, bagaimana jika sosok ‘mahasiswa’ ideal tersebut sulit terbentuk dengan segala faktor, tantangan, dan syarat-syarat khusus yang merintanginya?

Kembali ke 'sang bijak' yang senantiasa menasihati agar di tengah segala kekurangan: "berkolaborasi". Ber-gotongroyong-lah adalah kosakata yang lekat di ingatan bangsa Indonesia.

Bahwa mahasiswa cerdas butuh mahasiswa progresif untuk mobilitas-nya. Di sisi lain, mahasiswa progresif butuh mahasiswa cerdas untuk memantapkan analisisnya. Sementara itu, mahasiswa kebanyakan butuh kehadiran kolaboratif keduanya untuk mereka ikuti. Dan pada akhirnya, mahasiswa ideal kita syukuri jika ada, pun jika tidak hadir biarlah menjadi cita-cita seperti bintang-bintang di langit yang eksis dan indah hanya di malam hari.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *sketsaunmul.co*





# **BUDAYA DAN POLITIK**

## Kekuasaan Berlebih

**D**i dunia kesehatan dan kedokteran, dikenal setidaknya dua penyebab suatu penyakit. Pertama, penyakit karena kekurangan nutrisi tertentu. Kedua, penyakit karena kelebihan nutrisi tertentu. Keduanya, sama-sama pernah dan sedang memiliki angka jumlah kasus dan kematian yang tinggi. Dunia kesehatan mencatat, angka kematian di Afrika pernah sangat tinggi karena kekurangan makanan, bencana kelaparan.

Kini, statistik kesehatan dunia sedang dicermati karena tingginya angka kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh kelebihan makanan. Kelebihan lemak, gula, dan kolesterol misalnya, adalah beberapa di antaranya. Pembaca tentu lebih mengenal nama-nama penyakit yang mengikuti kelebihan tersebut.

Uniknya, jenis penyakit akibat kasus kedua, yakni karena kelebihan makanan ini, selain karena faktor keturunan, lebih banyak diderita oleh kalangan menengah ke atas. Sebaliknya, kita tahu, jenis penyakit yang pertama diderita oleh mayoritas kalangan menengah ke bawah.

Apa yang ada di bidang kesehatan dan kedokteran rupanya tak sulit diadaptasi oleh bidang sosial dan budaya. Termasuk bidang politik dan kekuasaan. Bukankah di awal-awal ilmu sosial humaniora diisi oleh mereka yang berlatar ilmu-ilmu alam? Sebut misalnya Emile Durkheim, pencetus teori sosiologi itu adalah orang yang mulanya adalah ilmuwan fisika dan serumpunnya. Noam Chomsky, yang kini dikenal sebagai bapak linguistik dunia hingga komentator politik tersohor adalah seorang yang berlatar ilmu biologi.

Dalam ilmu politik, terutama jika dikaitkan dengan analisis sosial budaya, rupanya juga dikenal adanya kelebihan kekuasaan. Fenomena kelebihan makanan, meski tak sepenuhnya serupa, dapat disandingkan dengan gejala kelebihan kekuasaan di dunia politik dan kekuasaan dewasa ini.

### ***Dinasti Politik dan Oligarki Politik***

Beragam istilah dan terminologi yang mewakili substansi dari kekuasaan yang berlebihan. Ada istilah “politik dinasti” yang sering tertukar dengan “dinasti politik”. Ada pula yang mengoreksi dengan istilah “oligarki politik”. Dan, ada pula yang menyebutnya sebagai keserakahan politik atau politik yang serakah (*greedy politic*).

Para pendukung teori “politik dinasti” dan atau “dinasti politik”—umumnya dari ahli atau yang disebut pengamat politik—berargumen bahwa di alam demokrasi, ternyata ada saja keluarga yang seperti menurunkan kekuasaannya ke anak, menantu, ponakan, dan istrinya laksana di era monarki. Bedanya, di masa monarki mekanisme dan prosedurnya lebih banyak berlangsung secara otomatis, sementara di alam demokrasi, dipilih oleh rakyat—meski kadang pilihannya terbatas dan atau dibatasi secara tidak langsung. Belakangan, terutama di tanah air, media memang dinilai turut andil dalam

memproduksi dan mereproduksi istilah “dinasti politik” dan atau “politik dinasti” ini.

Sementara itu, para pendukung istilah dan teori “oligarki politik”—di antaranya oleh para ahli bahasa dan analisis sosial budaya—menilai bahwa istilah “dinasti” adalah milik “monarki”. Sekarang masanya demokrasi. Selayaknya, ketika monarki diganti demokrasi, istilah dinasti juga sepatutnya berakhir. Pun, jika ada jejaring dan simpul keluarga yang muncul berkuasa dan bertahan, itu lebih layak disebut “oligarki”. Bukan “dinasti”. Begitu argumen dasar pencetus dan pendukung teori ini.

Penggunaan istilah “dinasti politik” dewasa ini di tanah air, oleh penyokong teori oligarki politik, dinilai menungggalkan pemaknaan terhadap kata “dinasti” menjadi negatif. Di mana, mulanya dinasti memiliki pemaknaan yang tidak selamanya dimaknai buruk. Pendapat para pendukung teori “oligarki politik” ini, tentu saja terbuka untuk diperdebatkan sebagaimana pendapat dinasti politik sebelumnya.

Secara substansial, kesamaan teori di atas adanya “kekuasaan berlebih”. Kelebihan kekuasaan oleh segelintir orang. Di titik ini, para pen-teori dinasti politik dan oligarki politik sama-sama sepakat. Bahwa kelebihan kekuasaan, sebagaimana kelebihan makanan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan itu tidak baik. Jika perlu, lebih baik dicegah sedari dini sebelum menjadi “penyakit akut”.

Bukankah dalil politik klasik memang bilang bahwa “*power tends to corrupt*” (kekuasaan cenderung korup)? Kekuasaan berlebih juga berpotensi menciptakan “kanker” pada “demokrasi”. Sayangnya memang, sebabnya adalah satu hal: nafsu atau hasrat berlebih. Tepatnya, nafsu mengonsumsi dan nafsu berkuasa. Dalam bahasa sehari-harinya keberlebihan ini dibayangkan sebagai “sifat rakus” (*greedy*).

## ***Greedy Politics vs Green Politics: Politik Rakus vs Politik Hijau***

*Greedy politics* (politik serakah) setidaknya menengahi perdebatan terminologis dan konseptual antara istilah dinasti politik (*political dynasty*) dan oligarki politik (*political oligarchy*), di atas. Keduanya pun bersepakat bahwa yang mereka maksud adalah menandai dan memaknai “politik yang serakah” (*greedy politics*).

Gramatika (tata bahasa) politik dunia hari ini memang sedang menyoroti dua istilah terbaru: politik rakus dan politik hijau (*greedy politics and green politics*). Yang pertama dinilai berlebihan, yang kedua diproyeksi lebih berkelanjutan. Dalilnya adalah, politik rakus cenderung memangsa kemanusiaan dan hijaunya alam ciptaan Tuhan. Sementara itu, politik hijau diharapkan dan menjanjikan keberlanjutan kehidupan (*sustainability of life*).

### **Konteks Indonesia dan Kalimantan Timur**

Di tanah air, terkhusus beberapa daerah, termasuk Kalimantan Timur, telah lama menjadi wacana mengenai dinasti politik, politik dinasti, dan oligarki politik ini. Baik di masa pilkada, pilgub, bahkan pilpres yang lalu. Kaltim menjadi sorotan karena alamnya yang hijau dinilai “dikuras” oleh sistem politik yang ada hari ini.

Terbaru, muncul berita tentang isu pergantian pucuk pimpinan lembaga legislatif Kaltim. Oleh perbincangan di arus bawah, ini dinilai tak lepas dari pertarungan elite politik di Bumi Etam. Media ramai memberitakan. Pengamat pun dimintai pendapat. Hangatlah jadinya.

Namun, yang luput dibincangkan secara kritis adalah, apakah ini praktik “dinasti” atau “oligarki” politik? Atau jangan–jangan ini adalah fenomena perebutan elite—yang sebenarnya sudah “surplus” kuasa?

Apa pun itu, yang perlu diingat adalah sebagaimana makanan berlebih dapat menciptakan “kanker” pada tubuh manusia, kekuasaan berlebih dapat pula menciptakan “kanker” dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Selalu ada titik balik (*turning point*) pada setiap hal yang dilakukan secara berlebih.

Terakhir, ketimbang terjebak pada politik serakah (*greedy politics*) dan keserakahan kekuasaan, lebih terhormat ketika politik hijau (*green politics*) yang lebih bermoral, beretika, berkemanusiaan, dan berkelanjutan untuk alam dan manusia, diamalkan. *Wabil* khusus bagi Kalimantan Timur, Bumi Etam.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Disway Kaltim/[nomorsatukaltim.com](http://nomorsatukaltim.com)

# Menjaga Moral dan Etika Publik

**P**ara politisi dan penyelenggara negara sepatutnya menghormati dan menjaga moralitas dan etika publik di era demokrasi dewasa ini. Hal ini penting dalam rangka menciptakan dan menjaga keadaban berdemokrasi. Terutama sekali di Bumi Etam, Kalimantan Timur.

Moral dan etika mesti menjadi dasar dari penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Baik di tataran kebijakan publik, maupun di dalam pengelolaan partai politik sebagai salah satu elemen penentu berjalannya demokrasi suatu negara. Tak ada demokrasi beradab tanpa partai politik yang bermartabat.

Dalam iklim demokrasi, terutama yang oleh Yudi Latif sebut sebagai “demokrasi luhur adab”, etika, moral, dan keadilan untuk semua adalah kunci utama yang perlu dijaga, dilindungi, dan diwujudkan. Bahkan, moral dianggap roh dari konstitusi. Bukan deretan pasal di dalamnya, apatah lagi tumpukan aturan-aturan yang mengikutinya.

Masyarakat Kalimantan Timur yang pernah akrab dengan slogan “*Membangun Kaltim untuk Semua*”, tentu paham betul arti sebuah



keadilan yang terdistribusi untuk semua kalangan. Bukan untuk kelompok tertentu saja, terlebih bagi keluarga tersendiri semata. Keadilan publik yang dilandasi moral dan etika publik bermaksud mendistribusikan keadilan kepada semua *citizen* (warga negara).

Aktualisasi dari dasar moral mewujudkan dalam etika. Etika, dapat dimaknai sebagai tata perilaku yang melekat pada diri seseorang. Etika dan moral berkenaan dengan baik buruk dan kepatutan sebuah tindakan. Tidak semata bicara akan benar dan salah sebagaimana aturan hukum yang senantiasa “dicari celahnya” oleh kalangan oportunistis dan pragmatis berkepentingan sesaat.

Olehnya itu, tak berlebihan kiranya Yudi Latif mengilustrasikan bahwa “hukum berenang di atas etika pada negara dengan demokrasi luhur adab”. Tak perlu banyak aturan dengan beragam perdebatan tafsir yang mengikutinya. Apatah lagi, lembaga penafsir aturan. Warga negara, terlebih pejabat publik sudah paham apa yang patut dan apa yang tak pantas dalam urusan publik. Itu kalau di negara dengan demokrasi berkeadaban.

Dalam negara yang demokrasi berkeadaban tersebut, moral dan etika publik benar-benar dijaga. Kepatutan di muka umum dihormati. Tak ada pejabat atau politisi yang *krasak-krusuk* hingga menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Apatah lagi berambisi mendudukkan keluarga dan kerabat dekatnya dalam jabatan publik. *Enough is enough* (cukup, sudah cukup), kata George Washington, presiden pertama Amerika.

## **Moral dan Etika Publik**

Moral dan etika ketika dihadapkan dengan urusan publik, maka keduanya mesti dilihat dalam kacamata kepentingan publik. Urusan publik adalah urusan mendistribusikan keadilan kata Jürgen

Habermas. Olehnya, moral publik adalah perihal bagaimana baik dan buruknya seseorang di hadapan pendistribusian keadilan publik. Sementara itu, etika publik memeriksa tata perilaku seseorang dalam mewujudkan kebijakan publik. Apakah langkah yang dilakukan pantas atau tidak secara etika?

Para filsuf dan ilmuwan mengingatkan bahwa aturan hukum dan perilaku politik yang baik secara moral dan pantas secara etika, adalah yang berenang di atas lautan etika dan moral. Dengan kata lain, seorang politikus dan juga penegak hukum tak perlu undang-undang berikut aturan yang menumpuk ketika landasan moral dan etika dipahami dan diamalkan dengan baik.

## **Merawat Keadilan Publik**

Dari penjelasan di atas, maka tak sulit untuk menilai laku politisi, wakil rakyat, dan penyelenggara negara dalam menjaga dan menegakkan moral dan etika publik. Cukup memperhatikan seberapa setia mereka mengabdikan diri dalam mendistribusikan keadilan kepada masyarakat luas (publik). Bukan dengan “membenarkan” segala cara untuk berkuasa. Terlebih jika kekuasaan itu diperuntukkan bagi sanak keluarga dan kolega dekatnya sebagaimana perilaku oligarki yang marak disoroti belakangan. Perilaku demikian bukan saja cacat secara moral, namun juga minus etika.

Apatah lagi, di tengah keberagaman Indonesia, dan terkhusus di Kalimantan Timur, moral publik dan etika berkehidupan berbangsa dengan keragaman etnik, agama, ras, dan afiliasi sosial budaya serta politik, penting untuk terus dijaga dan dirawat dengan baik. Kalimantan memiliki pengalaman manis sekaligus pahit dalam menjalani kehidupan berbangsa. Ingatan masyarakat Kalimantan,

khususnya Bumi Etam terlalu pendek untuk melupakan ujian–ujian kebangsaan kita yang tak ada duanya dari segi keberagaman ini.

Kita mesti terus mengingat dan saling mengingatkan bahwa di tengah ketimpangan sosial ekonomi, dan semakin defisitnya moral dan etika publik para politikus dan kaum beruang, kehidupan berbangsa penting untuk terus dijaga. Perilaku serakah (*greedy*) tentu tak berkesesuaian dengan tujuan merawat kebangsaan dan terdistribusinya keadilan publik sebagaimana dalil Habermas di atas. Politikus minus etika dan cacat moral dikarenakan oleh bermainnya uang di segala sektor dan diburunya jabatan publik dengan berbagai cara, merupakan awan mendung bagi demokrasi kita hari ini.

Menjadi kaya dan berkuasa tentu tidak dilarang oleh negara dan agama mana pun. Namun, landasan moral dan pagar etik tak boleh dilabrak begitu saja. Keadilan dan perasaan publik tetap harus dihormati. Kepentingan publik tentu tak cukup terakomodasi jika negara hanya diselenggarakan atas nama perburuan kekuasaan dan pertahanan kekayaan ala politikus oportunistis dan kaum oligark semata.

Publik Kaltim pantas menjaga *dignity* (marwahnya) demi keadaban berdemokrasi di Bumi Etam ini.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Disway Kaltim/[nomorsatukaltim.com](http://nomorsatukaltim.com)

# Membela Hak dan Kepentingan Publik

**M**asih segar dalam ingatan para sarjana dan penikmat media sebuah satire dari Prof. Yusril Ihza Mahendra beberapa tahun lalu mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola. “Negara” bagi Prof. Yusril, sapaan Profesor Yusril Ihza Mahendra ini, bukanlah “warung”, apatah lagi perusahaan keluarga, untuk konteks hari ini.

“Mengurus negara jangan seperti mengurus warung,” komentar Prof. Yusril kala itu yang lantas ramai dikutip oleh media.

Hari ini, di tengah banyaknya pengusaha yang terjun ke dunia politik hingga ke pemerintahan, maka bukan tak mungkin, sindiran sekaligus peringatan Prof. Yusril di atas masih dan makin relevan. Namun, mengurus negara tak lagi bisa dimaknai sebagai “amatiran” semata seperti mengurus warung, tapi bisa dimaknai lebih dari itu.

Mengurus warung dan perusahaan keluarga tentu berbeda dari segi level manajemen. Tapi, keduanya sama tidak cocoknya dengan bagaimana “mengurus negara”. Prof. Yusril seperti ingin menyindir para politisi dan penyelenggara negara—yang bisa jadi adalah

penguasa baru—untuk tidak kelihatan “amatiran” dan atau “menyimpang” jauh dalam mengelola negara.

\*\*\*

Perlu diketahui bahwa mengurus negara, dengan menjadi pejabat negara, hari ini telah mengalami perubahan paradigma. Urusan negara hari ini adalah urusan publik. Olehnya, pejabat negara berubah menjadi pejabat publik. Urusan publik, oleh pejabat publik adalah urusan mendistribusikan keadilan kepada publik, kepada masyarakat luas.

Mengelola negara, sebagaimana teguran Prof. Yusril di atas, sudah berkembang menjadi bagaimana mengelola “kepentingan publik”. Yakni, kepentingan akan keadilan yang terdistribusi mulai dari akses terhadap fasilitas publik hingga distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata.

### ***Hak Publik dan Kepentingan Publik***

Hak publik lazim dikenal di negara yang menganut prinsip demokrasi. Salah satu pemikir utamanya adalah Jurgen Habermas. Habermas dikenal dengan teorinya mengenai *public sphere*.

*Public sphere* (mental publik) dalam artian sebenarnya berbeda dengan *public space* (ruang publik). Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua lebih bersifat material. Keduanya, meski demikian, membicarakan hal yang sama, yakni hak publik di hadapan penyelenggara negara.

Alwy Rachman, akademisi ilmu budaya *cum* budayawan, menyebut *public sphere* adalah ruang bagi masyarakat luas (*society*) untuk “mendiskusikan kebijakan” (*to discuss policy*) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat percakapan dan pikiran kritis di dalamnya. Sementara itu, *public space*, seperti taman kota dan fasilitas umum lainnya adalah ruang yang bisa dinikmati secara fisik dan bersifat material.

Intinya adalah “yang publik”, baik dalam arti “*space*” maupun “*sphere*” merupakan arena untuk memberikan “akses” sekaligus “mendistribusikan” keadilan bagi masyarakat. Olehnya, urusan publik adalah urusan keadilan bagi rakyat banyak.

Keadilan, merupakan hak publik yang menjadi kepentingan publik utama di dalam prinsip-prinsip negara demokrasi. Olehnya itu, kepentingan publik perlu didahulukan. Kepentingan publik ini mesti berada di atas kepentingan pribadi—“dalam analogi sebagai pemilik warung”—dan di atas kepentingan keluarga dan golongan—“bagi pemilik usaha keluarga”.

Kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, mestilah dipisahkan dari kepentingan publik ketika hendak ataupun telah menjadi penyelenggara negara. Pengetahuan dan praktik ini penting pula dipahami secara mendalam oleh para politisi di partai politik yang hari ini sedang banyak diisi oleh kalangan pengusaha, khususnya yang berkiprah di parlemen.

### ***Etika Publik dan Keadaban Politisi***

“Dalam demokrasi luhur adab, hukum berenang di lautan etika. Dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konstitusi dan undang-undang tak membuat kepastian dan tertib hukum, melainkan selalu dicari celahnya demi kepentingan sesaat.”

Kutipan kalimat-kalimat ini adalah milik Yudi Latif, seorang pemikir bangsa terkemuka dewasa ini, di salah satu media nasional. Kutipan ini menegaskan pentingnya “etika publik” untuk menegakkan apa yang disebutnya sebagai “demokrasi luhur adab” atau demokrasi yang “berkeadaban” dalam bahasa lain. Dalam demokrasi berkeadaban, moral politik dan etika publik adalah “kompas etis” bagi para pelakunya.

Lawan dari demokrasi luhur adab, masih menurut Yudi Latif, adalah “demokrasi rendah adab”. Demokrasi yang “tidak berkeadaban”, nama lainnya. Demokrasi yang tidak berkeadaban dicirikan oleh perilaku yang suka mencari-cari celah aturan untuk kepentingan sesaat. Dalam model berdemokrasi ini, para politisi tak lain seperti “predator” yang selalu haus dan lapar akan kepentingan sesaat dan siap memangsa apa saja di depannya, termasuk moralitas sebagai politisi dan etika publik itu sendiri.

“Kompas etis”, dalam istilah Yudi Latif di atas adalah kunci dalam menjalankan “demokrasi berkeadaban”. Tanpanya, yang ada adalah pengingkaran terhadap moral. Dengan begitu, pengingkaran terhadap moral berpotensi menghadirkan laku berdemokrasi rendah adab di mana hak dan kepentingan publik bisa diterabas begitu saja. Apatah lagi, jika kepentingan “warung sendiri” dan “usaha keluarga” ada di baliknya, terlebih pula jika uang dianggap mampu menyelesaikan segalanya.

\*\*\*

Berkaca dari peringatan Prof. Yusril dan Yudi Latif di atas, penting kiranya, publik mencermati bagaimana laku “pemilik warung dan pemilik usaha keluarga” ketika mendapat amanah mengurus urusan publik.

Apakah amanah dalam menjaga hak publik dan menjalankan kepentingan publik untuk mendistribusikan keadilan itu tetap berjalan? Jika tidak, tentu publik berkewajiban membela hak dan kepentingan publik miliknya.

Membela hak dan kepentingan publik itu penting, tak lain dan tak bukan demi terwujudnya demokrasi luhur adab dan berkeadaban di negeri ini. Tak terkecuali di Bumi Etam.

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Disway Kaltim/[nomorsatukaltim.com](http://nomorsatukaltim.com)



# Elite dan Oligark dalam Demokrasi

**E**lite dan oligark adalah penguasa sesungguhnya di banyak negeri. Kedua kelompok kecil ini adalah pemilik kekuasaan istimewa yang membedakannya dengan rakyat kebanyakan.

Professor Jeffrey Winters (2011) dalam karyanya *Oligarchy* sepuluh tahun lalu menerangkan bagaimana oligark menjalankan oligarki dari masa ke masa. Termasuk bersekutu dengan elite yang memiliki kekuasaan lain selain kekuasaan atas kekayaan material. Elite memiliki kekuasaan atas hak politik formal, kekuasaan jabatan, kekuasaan mobilisasi, dan kekuasaan koersif (pemaksa). Sementara itu, oligark selain memiliki keempatnya, kekuasaan istimewanya adalah kekuasaan material/kekayaan.

Kepentingan oligark adalah mempertahankan kekuasaan materialnya, sementara kepentingan elite adalah mempertahankan kedudukannya pada kekuasaan yang dimilikinya. Atau bisa jadi seorang elite berhasrat menjadi seorang oligark. Di titik kepentingan inilah keduanya sering bersekutu meski tak jarang pula berselisih.

## Catatan Historis

Di masa kolonial, para peneliti dan sarjana kolonial Belanda mengamati dan mencari tahu dua hal yang dimiliki seorang tokoh yang dimata-matai yaitu uang dan senjata yang dimiliki. Artinya, di masa kolonial, perhitungan akan potensi perlawanan pemilik uang (kekuasaan material) dan pemilik senjata (kekuasaan koersif) sudah diperhitungkan.

Sebagai contoh, untuk mencari tahu potensi yang dimiliki oleh orang-orang Hadramaut, khususnya keturunan Nabi Muhammad, seorang sarjana Belanda dikirim ke Hadramaut untuk meneliti bagaimana kehidupan orang Hadramaut di Yaman. Selain itu, ditelusuri bagaimana mereka datang ke Nusantara kala itu, apa motifnya, dan siapa saja mereka yang datang?

Di Hadramaut sendiri, peneliti mencari tahu, siapa pemilik uang paling banyak dan pemilik senjata paling banyak di masa itu, atau pemilik keduanya? Setelah itu, orang-orang Hadramaut yang datang ke Batavia juga dicari tahu kehidupannya. Siapa saja yang punya toko, siapa yang punya uang dan aset yang banyak serta punya senjata?

Hal yang dapat direfleksikan adalah rupanya sejak masa kolonial dan mungkin sebelumnya juga, kekuasaan elite adalah instrumen yang sangat diperhatikan secara jeli oleh penguasa. Dalam kasus di atas, elite pemilik kekuasaan koersif dan 'oligark' pemilik kekuasaan material akan dimata-matai oleh Belanda. Akan semakin intens diperhatikan lagi jika seseorang memiliki keduanya—uang/ kekayaan dan senjata (kekuasaan koersif dan kekuasaan material)—karena mereka merupakan elite sekaligus oligark.

## Perilaku dan Nasib Partai Politik

Praktik mempertahankan kekayaan kalau bahkan semakin memperbanyaknya tidak bisa tidak menyebabkan para oligark berkoalisi dengan elite. Koalisi atau persekutuan ini adalah sebuah tindakan bertujuan dalam rangka menghindari ‘redistribusi’ ke bawah (kepada rakyat) atau akuisisi ke samping (oligark lain) kekayaan para oligark.

Para oligark kekinian, termasuk di Indonesia terus berusaha mempertahankan kekayaan mereka dengan berbagai cara, terutama lewat jalan politik di rezim demokrasi sekalipun. Di dunia politik, peraturan ditentukan. Di dunia politik, aktornya adalah partai politik berikut ‘pemilik partai’ dan politisi-politisinya. Dengan ‘memegang’ dan ‘mengendalikan’ partai-partai politik, bisa dipastikan bidang legislatif di DPR dan koalisi di kabinet eksekutif bisa ‘diamankan’.

Dengan begitu, apakah partai politik dikuasai dan dikendalikan oleh oligark? Sepenuhnya bisa jadi tidak, tapi potensi untuk demikian, bukan tak mungkin. Selain sebagai pembuat peraturan, fungsi DPR—di mana partai politik berperan besar di situ—adalah melakukan fungsi *budgeting*. Uang negara ‘dibagi’ di lembaga ini bersama eksekutif. Distribusi anggaran hendak diarahkan ke mana adalah salah satu hak DPR—tempat partai politik bergelut. Tentu, kepentingan oligark juga ada di sini.

Terkhusus di Indonesia, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dapat dikatakan diisi oleh para elite bahkan oligark itu sendiri. Beberapa oligark tercatat menjadi anggota partai politik, pendiri partai politik, hingga menjadi pimpinan partai politik. Jadi oligark di Indonesia, dalam upaya menciptakan pertahanan kekayaannya, sampai menjadi elite di partai politik itu sendiri. Baik sebagai pendiri dan ketua umum maupun sebagai anggota. Dengan demikian, partai politik seperti itu tidak lagi hanya sebagai pilar

demokrasi, tapi sudah menjadi 'alat' pertahanan kekayaan para oligark.

## Masihkah Ada Harapan?

Bisakah oligark dijinakkan? Atau bahkan dikalahkan sekaligus? Jawabannya bisa dan tergantung pada syarat-syaratnya. Selama ada kekuatan yang mampu mengendalikan negara selain oligark untuk membuat oligark tunduk pada negara, hal itu tidak mustahil dilakukan.

Prof. Jeffrey Winters menegaskan bahwa salah satu yang paling bisa menjadikan kuatnya peran negara dan menundukkan oligark, bahkan meredistribusi kekayaan material para oligark adalah kekuatan *grass root* yang terorganisasi. Seperti mengusir penjajah di masa kolonial, 'menjinakkan' dan 'menundukkan' oligark salah satunya masih mengandalkan kekuatan '*grass root*' (akar rumput) dan masyarakat sipil yang kuat. Supremasi hukum dan redistribusi material hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat sipil dan gerakan *grass root* yang kuat.

Upaya meredistribusi penguasaan kekayaan material secara adil dan merata adalah kunci menjawab ketimpangan yang ada oleh sistem oligarki ini. Karena, ketimpangan penguasaan material-lah yang menciptakan hadirnya oligarki dan melahirkan para oligark, maka ketika ketimpangan itu hilang dan distribusi kekayaan material merata, oligarki dengan para oligarknya juga akan hilang dengan sendirinya. Dari kondisi itu, demokrasi akhirnya kembali menjadi milik rakyat (*demos*). Dan, bisa jadi para elite tiba-tiba akan berpaling dari persekutuannya dengan para oligark. Mungkinkah?

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Disway Kaltim/[nomorsatukaltim.com](http://nomorsatukaltim.com)

# Kritik, Demokrasi, dan Rasa Takut

*Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan politik formal tersebar.*

(Profesor Jeffrey Winters)

**K**ekuasaan politik yang tersebar adalah agenda utama demokrasi. Profesor Jeffrey Winters dalam kutipan di awal tulisan ini menegaskan bahwa kekuasaan politik yang mulanya terpusat harus disebar pada sistem demokrasi. Salah satu wujud kekuasaan yang disebar dalam demokrasi adalah hak menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin kepada setiap warga negara. Termasuk, menyampaikan pendapat melalui kritik.

Namun, bagaimana jika di alam demokrasi kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat justru menjadi hal menakutkan untuk dilakukan? Tentu ada yang salah, bukan?

## Demokrasi dan Kritik

Benarlah apa yang Machiavelli pernah bilang bahwa di sistem monarki, bisa saja pemerintahan berjalan secara demokratis. Dan, di sistem demokrasi justru yang ditemukan adalah hal sebaliknya.

Apa yang Machiavelli pernah ujkarkan dari utara di Italia sana berabad-abad lalu itu, sedikit banyak ada benarnya akhir-akhir ini di beberapa belahan dunia. Bahkan, beberapa ahli menegaskan fenomenanya sedang terjadi di negeri ini. Setidaknya, begitu pendakuan beberapa tokoh, akademisi, dan mereka yang dilabeli media sebagai 'pengamat'. Demokrasi sedang diuji.

Di alam demokrasi, kritik ibaratnya energi (*charge*) bagi sebuah 'smartphone'. Jika energi hasil 'charging'-nya habis, maka matilah 'smartphone' itu. Jangankan menjadi 'phone' yang 'smart', menjadi 'phone' saja hanya tinggal nama. Tidak berfungsi.

Jadi, salah satu syarat utama demokrasi adalah adanya kritik sebagai sumber energi bagi kekuasaan. Selain itu, bukankah demokrasi memiliki pra-syarat menyebar kekuasaan? Dengan begitu, langkah awal dalam menyebar kekuasaan dan memberi asupan energi kepada demokrasi adalah dengan memberikan ruang seluas mungkin kepada kritik.

Tentu saja, di era demokrasi digital ini pula, pemerintah dan masyarakat sipil (publik) perlu bersepaham bahwa 'kritik', berbeda dengan 'ujaran kebencian' (*hate speech*), dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Agar demokrasi menjadi sehat, pemerintah dan masyarakat sipil perlu bersepaham dan bersepakat soal ini. Bahwa ujaran kebencian dan berita bohong berbeda dengan kritik.

## Demokrasi dan Rasa Takut

Para pemikir dan pelaku sejarah berusaha menciptakan demokrasi karena 'jengah' dengan praktik otoriter monarki yang suka menyebar rasa takut. Tak ada kebebasan dan kemerdekaan berpendapat di sistem otoriter. Dengan begitu, sistem demokrasi bertujuan sejak awal melawan atau mengganti sistem yang bertindak otoriter demi kemerdekaan dan kebebasan serta menghilangkan rasa takut. Setidaknya, begitu pada mulanya mengapa 'republik' lahir menggantikan monarki. Republik yang dicita-citakan bertindak demokratis, monarki yang ditinggal karena perilaku otoriternya.

Sikap otoritarianisme tentu menyimpan sebuah trauma. Trauma, di mana-mana mencipta ketakutan untuk kembali. Maka, *move on*-lah mereka yang trauma dan yang menolak untuk trauma ini.

Singkat cerita, digantilah model bernegara dan sistem berpemerintahan dari monarki ke republik, dari yang dibilang otokrasi menjadi demokrasi. Dari yang dibilang otoriter menjadi yang diharap demokratis. Dari yang pernah menakutkan menjadi yang diharap membahagiakan. Demokrasi bercita-cita untuk melawan dan meninggalkan 'rasa takut' akan trauma otoritarianisme di masa lalu.

## Lantas Bagaimana dengan Indonesia?

Di era pascakolonial dan pasca-orba di Indonesia dewasa ini, demokrasi tentu mengalami tantangan hebat. Termasuk bagaimana melawan 'trauma' akan rasa takut pada sistem otoriter sebelumnya. Di alam demokrasi yang masih relatif muda seperti di Indonesia, di mana demokrasi berjumpa dengan budaya digital dengan pengguna media sosial yang tinggi, demokrasi berpotensi menjadi 'banal'. Indonesia sedang berada di tengah ujian itu.



Bahkan, jika benar adanya wacana tentang *buzzer* yang terorganisasi untuk melakukan '*personal attack*' (serangan personal) kepada peng-kritik yang dianggap berpengaruh, maka semakin 'banal'-lah demokrasi itu. Lebih celaka lagi, jika tindakan 'persekusi digital' di media sosial itu membuat orang 'ketakutan', minimal 'enggan' dan 'malas' melakukan kritik karena menilai demokrasi tak lagi sehat. Jika hal itu terjadi, maka udara berkehidupan sosial budaya masyarakat kita juga akan tercemar seiring tercemarnya ruang publik kita oleh yang disebut *buzzer* tersebut—terlepas siapa yang mengorganisasi dan kepada siapa serta untuk kepentingan apa dia bekerja.

Indonesia sedang menjalani ujian sekaligus takdir demokrasinya. Di usia yang relatif muda, demokrasi Indonesia sedang berproses untuk menjadi dan menemukan bentuk idealnya. Dari kesadaran akan kondisi *in-progress* itu, maka dialog, debat, hingga kritik tak boleh berhenti atau dihentikan. Karena, jika itu terhenti, maka berhenti pulalah 'proses menjadi' Indonesia sebagai bangsa dan negara yang demokratis.

## **Mengembalikan Fungsi Kritik**

Sebagai refleksi, untuk menjaga 'proses menjadi'-nya demokrasi di Indonesia, fungsi kritik tentu penting dan perlu dalam mengoreksi dan mengevaluasi kekuasaan. Kebebasan melakukan kritik adalah cara untuk mendistribusikan kekuasaan kepada pemilik hak politik formal sebagaimana marwah demokrasi. Kritik adalah hak setiap warga negara.

Demokrasi bertalian erat dengan kritik, bukan dengan ujaran kebencian apalagi berita bohong. Itu yang perlu dipahami dan disepakati bersama. Dengan kejelasan, kesepahaman, dan

kesepakatan demikian, maka kritik sepantasnya bukanlah hal menakutkan, apalagi sampai menakut-nakuti para pengkritik. Fungsi kritik mestilah dikembalikan untuk menjaga marwah demokrasi (*dignity of democracy*).

Karena, ketika kritik di alam demokrasi berubah menjadi rasa takut, bukankah itu tanda-tanda "*how democracies (will) die*"?— Bagaimana demokrasi (akan) mati?

Kita tentu tidak ingin demokrasi mati, bukan?

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Disway Kaltim/[nomorsatukaltim.com](http://nomorsatukaltim.com)

## Aktivis '98 dan Angkatan 2019

**K**ekuasaan selalu melahirkan panggung dan 'hero'. Begitu pula panggung kekuasaan, dia punya 'hero' sebagai karakter dan subjek kolektif untuk mengisinya. Panggung dan 'hero' pun dapat memproduksi dan mereproduksi (akses) kekuasaan. Maka tak heran jika 'panggung' (*stage*), selalu menjadi rebutan para 'hero' untuk mengakses dan atau merebut kekuasaan.

\*\*\*

Beberapa waktu lalu, Fadjroel Rahman dan Fahri Hamzah diwawancarai pada salah satu *talkshow* di sebuah televisi swasta. Keduanya diakui sebagai aktivis '98. Generasi yang dinilai menumbangkan Orde Baru, rezim Soeharto. Keduanya ibarat 'hero' di masanya, hingga masa kini setelah dua puluh satu tahun reformasi. Namun, kali ini, keduanya, dan generasi di angkatannya, sedang berhadapan dengan generasi 'anti-hero'-nya. Siapakah mereka?

Generasi anti-hero yang dimaksud adalah generasi angkatan 2019. Dalam gerakannya, generasi angkatan 2019 ini dikenal memiliki

'hashtag' #ReformasiDikorupsi. Perjuangannya menuntut dan menolak Revisi UU KPK, RKUHP, dan beberapa RUU lainnya. Angkatan 2019 melakukan aksi dengan masif di hampir seluruh kota di tanah air.

Mengapa kedua angkatan ini dianggap berhadap-hadapan? Tak lain dan tak bukan karena mahfum diketahui, baik di DPR maupun di lingkaran Presiden Jokowi, aktivis '98 banyak yang mendapat tempat di sana. Sebut misalnya Budiman Sudjatmiko, Adian Napitupulu, dan Masinton Pasaribu. Ketiganya adalah Politisi PDI-P di DPR yang menyepakati Revisi UU KPK. Selain itu, PDI-P sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi adalah partai ketiga eksponen '98 tersebut. Sementara itu, sebagai wakil ketua DPR (kala itu), Fahri Hamzah yang juga dikenal eksponen '98 ini bahkan memimpin rapat pengesahan RUU KPK di DPR. Belum lagi Fadjoel Rahman dkk yang berada di lingkaran Komisararis BUMN dan Staf Kepresidenan. Lingkaran aktivis '98 ini bisa dikatakan sedang berada di dalam kekuasaan ketika angkatan 2019 hadir mengoreksi keadaan yang dihasilkan masa pemerintahan ketika para aktivis '98 ini berada di sana.

Kembali ke acara *talkshow* tersebut, keduanya, (Fadjoel dan Fahri) pun diminta oleh pemandu acara untuk menilai aksi generasi sekarang, yang disebutnya sebagai generasi Z. Generasi yang juga belakangan lazim disebut sebagai aktivis angkatan 2019 ini. Keduanya pun menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap angkatan 2019 ini. Angkatan ini bisa dikata sebagai 'anti-hero' dari aktivis '98 ini yang selama 21 tahun menyandang sebagai 'hero' karena dinilai atau menilai diri sebagai penumbang Orde Baru.

Satu hal yang menarik di sini adalah penilaian terhadap generasi angkatan 2019 ini. Tidak bisa dimungkiri, keduanya (Fadjoel dan Fahri) cenderung menggunakan tolok ukur dirinya dan generasinya untuk menilai generasi sekarang. Meskipun ada usaha untuk menilai secara *fair*, namun tetap saja angkatan 2019 ini menjadi

'terobjektifikasi'. Dengan begitu, bisa dibilang, angkatan '98 memandang (*encode*) angkatan 2019. Ada proses objektivikasi di situ.

\*\*\*

Mau tidak mau, suka tidak suka, aktivis angkatan 2019 sudah lahir dengan berbagai ciri, karakter, dan penandanya. Berikut pula tuntutan dan cara pandangnya melihat negara bekerja. Apakah menguntungkan mereka atau tidak, yang pasti angkatan ini telah berani tampil dalam mengoreksi keadaan.

Angkatan '98 tentunya tidak bisa memaksa angkatan 2019 ini untuk seperti mereka. Tidak elok pula jika memasang tolok ukur seperti dirinya. Yang Kelihatan hanya 'ego' poetika politik tua yang memang sudah bisa dibilang semakin menua. Semakin aktivis '98 menyoroti angkatan 2019 ini, semakin ada kesan kalau mereka khawatir 'panggung' generasi kontra-orba ini akan direbut oleh angkatan 2019.

Kekhawatiran itu bisa dianggap sebagai sebuah kewajaran. Sebagai 'juara bertahan', bukan tak mungkin bisa tak kuat lagi narasi heroisme menumbangkan Orde Baru-nya. Narasi ini sesungguhnya berpotensi dijadikan 'komoditas' politik untuk menjadi pintu masuk ke lingkaran kekuasaan. Apakah itu sebuah kekhawatiran akan kehilangan panggung dan akses karena tidak lagi dianggap juara ('hero') bertahan? Yang pasti panggung itu barangkali menjadi terancam untuk direbut oleh angkatan 2019 ini.

\*\*\*

Banyak orang bertanya, jika tak ditunggangi, apa yang membuat generasi 2019 ini bergerak begitu masif? Dengan mencoba

menganalisis, dapat disimpulkan bahwa angkatan 2019 ini bisa dibalang muak dan murka dengan keadaan. Termasuk dengan keterlibatan aktivis '98 di lingkaran kekuasaan yang 'dinilai' tidak bisa memperbaiki keadaan sesuai harapan rakyat banyak.

Dua puluh satu (21) tahun lamanya gelar juara bertahan ini di tangan. Kemudian hadir angkatan 2019 yang meneriaki mereka setelah dinilai 'keasyikan' berada di lingkaran kekuasaan. Kerjanya dikoreksi, panggungnya direbut. Kira-kira begitu alurnya.

Kita tunggu, seberapa mampu angkatan 2019 ini menggantikan panggung sang juara bertahan pemegang piala (hero) yang dipegang angkatan '98? Bagaimana pula efeknya dengan kekuasaan? Mengingat angkatan '98 tak sedikit merapat di sana.

Dapatkah angkatan 2019 ini menggantikan panggung sang 'hero', aktivis '98, yang selama ini menjadi juara bertahan?

Apakah narasi heroik dan panggung politik angkatan '98 digeser/digantikan oleh angkatan 2019 ini?

Wallahualam.

Kita nantikan ....

\*\*\*

Samarinda, 7 Oktober 2019

\*) Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh *makassarterkini.id*

# Oposisi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi

**K**emarin malam, saya menyempatkan diri menonton berita di televisi hingga larut malam dan akhirnya tertidur di depannya. Bahasa pos rondanya, awalnya nonton televisi, lama-lama ditonton televisi.

Apa yang ada di kanal-kanal berita televisi tersebut adalah demonstrasi mahasiswa dan juga keterlibatan para pelajar STM di dalamnya. Saya lantas terpikir secara tiba-tiba, apa yang menjadi penyebab demikian? Kenapa mahasiswa turun begitu masifnya? Lantas kenapa pula pelajar STM dan SMA sederajat juga berpartisipasi begitu garangnya?

“Pasti ada jawabannya,” gumamku.

“Tapi apa?”

Ditanggapi?

Bukankah lawan capres kemarin sudah ‘rekonsiliasi’?

Bukankah partai-partai di DPR pada umumnya sepakat untuk beberapa agenda kontroversialnya akhir-akhir ini?

Lalu apa?

Pikiran saya akhirnya bertualang hingga mengingat sebuah dalil tentang masyarakat sipil. Juga ada sedikit ingatan tentang oposisi yang kebetulan beberapa bulan lalu sempat saya bagikan di dinding media sosial saya.

Bahwa:

Satu,

‘Jika partai oposisi tidak ada, maka ketika pemerintah membuat kesalahan, dia berpotensi berhadapan langsung dengan kekuatan rakyat.’

Dua,

‘Masyarakat sipil adalah katup pengaman dari perubahan (baca: revolusi). Jika masyarakat sipil kuat, maka perubahan bisa dimediasi dan ditransformasi secara *soft*.’

Dalam iklim demokrasi, keduanya—oposisi dan masyarakat sipil—bukan hanya dibutuhkan, tapi sepatutnya menjadi keharusan. Itu jika dalil pertama dan kedua tidak diinginkan terjadi. Jika dan hanya jika (partai) oposisi bermesraan, dikooptasi, atau malah diberangus oleh penguasa, maka barangkali itu kenapa kekuatan rakyat banyak yang langsung dihadapi oleh penguasa. Bisa jadi, itu kenapa gelombang demonstrasi dari bawah menjadi masif dan berhadapan-hadapan langsung dengan kekuasaan.

Tapi, pertanyaan lagi muncul kemudian. Kenapa mahasiswa dan STM/SMA yang jadi ‘*avant garde*’ (garda terdepan) di tahun 2019 ini? Apakah kedua elemen ini mewakili masyarakat sipil? Mengapa bukan



elemen *mainstream* masyarakat sipil seperti Ornop/NGO/LSM dan Ormas tampil di depan?

Jawabannya bisa dua. Pertama, elemen *mainstream* ini sedang melemah dan atau dilemahkan. Kedua, jangan-jangan pentolan-pentolannya (mohon maaf) juga sedang berada di lingkaran kekuasaan. Sehingga, 'tidak enak' (semoga saja tidak keenakan) untuk tampil terdepan mengoreksi keadaan yang kian semrawut dan meresahkan.

Kedua kemungkinan di atas bisa jadi benar sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan tetapi, perihal kedua yang menyimpan persoalan serius. Prof. Effendi Gazali dalam pidato pengukuhan Guru Besar-nya dan di sebuah kesempatan beberapa waktu lalu menyatakan bahwa,

'Ketika banyak aktivis yang merapat ke istana, peran mereka banyak diambil oleh penceramah (agama) dalam mengoreksi kebijakan pemerintah.'

Artinya apa? Ada kekosongan pos yang ditinggalkan oleh para pegiat gerakan sosial yang bisa jadi (sekali saya mohon maaf) 'keenakan menikmati istana', sehingga 'tidak enak' mengoreksi kekuasaan.

Padahal, di alam demokrasi sekarang ini, aktivis sosial adalah keharusan mutlak untuk mengisi pos menjadi 'katup demokrasi' guna mentransformasikan perubahan secara '*soft*'. Jika itu hilang/menipis, maka jangan heran jika angkatan muda milenial, dalam hal ini mahasiswa dan pelajar STM/SMA yang tampil terdepan. Pertanyaan awamnya adalah, karena siapa lagi yang diharap? Pun kita tidak berharap, pertanyaannya kemudian adalah 'siapa yang bakal mengisi' (secara otomatis) katup 'pos kosong' demokrasi tersebut.

Soal bagaimana ekspresinya, kita selayaknya tidak boleh *ngiri* apalagi *nyinyir*. Kaum milenial Indonesia merebut zamannya. Soal

pemerintah represif dan tidak bisa membaca kemajuan zaman anak anak bangsa-nya, itu sangat disayangkan dan pantas disesali. Kita boleh berkabung karenanya.

Soal jatuh korban di Kendari, Sulawesi Tenggara dan di berbagai daerah di negeri ini, kita berduka secara mendalam dan berbelasungkawa atas peristiwa ini. Bangsa Indonesia tertunduk sedih. Ibu pertiwi kembali menangisi anak bangsanya yang pergi dan luka-luka. Semoga kita banyak belajar dan berubah dari ini semua. Terutama bagi yang dipangkukan kepentingan oleh rakyat.

Dan, terakhir, terkhusus kaum muda milenial Indonesia, mari menundukkan kepala sejenak atas 'duka demokrasi' kita hari ini.

Kita boleh berduka dan bersedih sedalam-dalamnya karena kehilangan kawan, saudara sesama anak bangsa, tapi kita tak boleh kehilangan harapan akan masa depan esok yang lebih cerah di negeri ini.

Samarinda, 27 September 2019

# Paras Depan Manusia dan Ruang Terdalam Kebudayaan

Jika pantai adalah paras terluar suatu pulau, dan belantara adalah pedalamannya, manusia pun demikian. Manusia memiliki paras depan dan pedalaman jiwa. Apa yang tampak di paras depan, tak bisa menunjukkan sepenuhnya apa yang ada di pedalaman. Tapi, ilmu psikologi dan analisis karakter dalam ilmu sastra telah mengajarkan kita untuk membacanya. Sebagaimana Dokter Martinet telah membuat kagum Minke di roman *Bumi Manusia* Pramoedya Ananta Toer karena kemampuannya membaca ruang pedalaman pasiennya.

Ilmu bahasa, atau lebih akrab dengan linguistik telah mengajarkan kita akan konsep struktur permukaan dan struktur batin dari bahasa. *Surface structure and deep structure*. Teori transformasional linguistik Noam Chomsky khatam menjelaskan demikian. Bahwa ada transformasi makna dari struktur batin ke struktur permukaan dari sebuah bahasa, khususnya pada sebuah teks bahasa.

Pada psikologi dan juga ilmu-ilmu budaya dikenal konsep demikian. Psikologi mengenalkan bahwa manusia memiliki raga dan

jiwa. Memiliki paras depan dan ruang terdalam. Yang satu mudah diindrai, yang kedua tak mudah diindrai.

Ilmu-ilmu budaya dengan teori gunung es kebudayaan-nya pun demikian. Teori ini membagi wujud budaya ke dalam wujud yang bersifat material dan non-material. Wujud budaya material atau yang dapat diindrai terdiri dari wujud artefak (benda) dan perilaku. Sedangkan wujud budaya immaterial adalah wujud budaya berupa nilai budaya dan gagasan/ide budaya. Keduanya juga dikenal dengan sifat eksplisit (terungkap langsung) dan implisit (tak disampaikan langsung) pada kebudayaan.

Dalam pembacaan dua dimensi tersebut, hal menarik adalah bagaimana proporsinya. Teori gunung es kebudayaan (*iceberg theory of culture*) mengatakan bahwa hanya 10% wujud budaya manusia yang ada pada permukaan (wujud benda dan perilaku), yakni yang bisa diindrai. Selebihnya, 90% berada pada ruang/struktur dalam gunung es itu sendiri, yakni pada wujud nilai dan gagasan kebudayaan. Dalam arti lain, yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil saja. Meski hal tersebut yang paling banyak dipoles karena terutama untuk tujuan pajangan dan pameran.

Di perbincangan sehari-hari, dikenal istilah fenomena gunung es (*iceberg phenomena*) untuk menandai sebuah fenomena yang sebenarnya banyak terjadi namun tidak muncul saja di permukaan. Seperti misalnya, politik uang di setiap pemilu, korupsi dan kolusi para pejabat dan pengusaha, atau fenomena selebritas yang menjadi pengguna atau pecandu narkoba. Jamak namun tak terlalu mencolok di publik. Sesekali saja muncul sebagai skandal, namun sebenarnya banyak dipraktikkan “di bawah permukaan” air laut--yang menutupi dasar gunung es yang 90% itu.

Lantas, bagaimana dengan manusia? Andai saja mengikuti pola kebudayaan, meski memang bisa dikata demikian, maka apa yang ada di paras depan manusia juga hanyalah 10% dari keseluruhan kediriannya. Selebihnya 90% adalah yang tak terungkap oleh

tangkapan pancaindra manusia. Olehnya, jika ada seorang yang merasa paling mengenali seseorang yang lain hanya dalam sekali dua kali perjumpaan, maka orang tersebut adalah orang yang hebat. Untuk tak mengatakan penuh bualan dengan 10% pengetahuannya namun merasa sudah tahu segalanya. Yah, seperti Belanda menulis sejarah Indonesia dari geladak kapal VOC. Minim sekali.

Dari uraian di atas, dapat dipahami kiranya bahwa manusia dan kebudayaan memiliki dua dimensi, yakni dimensi luar dan dimensi dalam. Satunya memberikan informasi sedikit saja di permukaan, sementara pedalaman menyimpan jauh lebih banyak pengetahuan dan informasi tentang kedirian manusia dan kebudayaan itu sendiri.

Sehingga, membaca manusia dan kebudayaan, menggunakan ilmu psikologi dan ilmu budaya mestilah menyentuh sisi luar dan sisi dalamnya. Karena, seperti manusia, kebudayaan sebuah komunitas masyarakat akan menyimpan rahasia-rahasia berharga di ruang terdalamnya. Paras depan hanyalah rupa-rupa pajangan saja yang berusaha dibuat elok dengan solekan kosmetik. Bukan rupa yang sesungguhnya. Yang didandani kosmetik dan solekan salon hanyalah sepersepuluh dari diri manusia, selebihnya tersimpan rapat di ruang terdalam bernama jiwa/batin manusia dan kebudayaan itu.

*So, don't judge a (wo)men by their fesyen. Sebagaimana Don't judge the book by their cover.* Jangan nilai orang dan buku hanya dari sisi luarnya saja. Menilai dan memilih pemimpin juga selayaknya begitu. Periksa sisi luar sampai ruang terdalamnya para kandidat. Siapa tahu ada yang disembunyikan rapat di ruang terdalam sana.

Samarinda, 17 Maret 2019

\*) Ditulis menjelang debat cawapres, sebulan sebelum pemilu.



# BIODATA PENULIS

**N**asrullah Mappatang. Saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman Samarinda. Menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar dan Program Magister di jurusan Kajian Budaya dan Media di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Selain mengajar dan meneliti, penulis juga aktif dalam kegiatan literasi di perkumpulan Skolastra (Sekolah Sastra) dengan berusaha menyiapkan bacaan kepada anak muda di Samarinda dan Makassar secara luring dan di seluruh Indonesia secara daring. Selain itu, aktif mengajak anak muda berdiskusi tentang sastra dan budaya, serta memfasilitasi kegiatan penulisan dan produksi karya bagi generasi milenial.

Karya-karya penulis dapat diakses melalui daring di laman *[www.ullamappatang.com](http://www.ullamappatang.com)*. Selain itu, dapat pula dikontak melalui alamat surel *[ullamappatang@gmail.com](mailto:ullamappatang@gmail.com)*.